



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI**

KALIMANTAN SELATAN

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA**

SELATAN

TAHUN 2024

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI, MEMERIKSA DAN
MENGESAHKAN ALAT BUKTI TAMBAHAN**

J A K A R T A

RABU, 29 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

**Rabu, 29 Mei 2024, Pukul 08.02 – 12.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Alboin Pasaribu
2. Abdul Ghoffar
3. Erlina Maria Christin Sinaga

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Putu Bravo Timothy
2. Army Mulyanto

B. Ahli Pemohon Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dian Permata

C. Saksi Pemohon Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Fitzgerald Lintin

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Totok Prasetyanto
2. Herdiyan Bayu Samodro

E. Saksi Pemohon Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Emanuel B. D. Basagai
2. Maximus Anumanggi
3. Mohamad Nur Aan La Djaharia
4. Lodifikus Mahatam

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Subani
2. Muhammad Zainuddin

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Paskaria Tombi
2. M. Nuzul Wibawa

H. Saksi Pemohon Perkara Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Maksimus Serin
2. Johana Resubun
3. Ludy Sirec
4. Yoel Manggaprou
5. Heribertus Silvinus Silubun

I. Termohon:

1. Hasyim Ashari
2. Helda Richarda Ambay (KPU Papua Selatan)
3. Andi Tenri Somba (KPU Kalimantan Selatan)
4. Riza Anshari (KPU Kalimantan Selatan)

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Nurkhayat Santosa
2. Ilhamsyah
3. Yusuf Purnama Agung
4. Pither Ponda Barany

K. Saksi Termohon:

1. Nazaruddin Ikhwan
2. Suko Yuwono
3. Muhammad Sakra Efendi
4. Subhani
5. Yati Enoch
6. Hence Oku
7. Abraham Jamlean
8. Frits Gandaimu
9. Hironimus Markus Fofid
10. Helda Richarda Ambay
11. Aloysia Hahare
12. Yonathan Ewemakat
13. Yohanis Berpesty
14. Siprianus Iramakat

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Ridho Fuadi
2. Darul Huda Mustaqim

M. Ahli Pihak Terkait Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Agus Riwanto

N. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Wahyudi
2. Azhar
3. M. Kurniawan Putra
4. H. Awan Subarkah
5. Agus Sudarto

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Nasdem):

1. Pangeran
2. Ferdian Sutanto

P. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Nasdem):

1. Jechlin Madarch Lufkey

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PKB):

1. Erry Ayudhiansyah
2. Raden Adidarmo Pramudji

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PAN):

1. Nur Ikhsan Hasanuddin
2. Ramdhany Tri Saputra

S. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PAN):

1. Albertus Muyak
2. Rudolof Ronde

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Wahyu
2. Muhammad Amril Imran

U. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sulhaji Sutran Wijaya Saputra Mulla
2. Felisitas Masriat

V. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Herwyn J.H. Malonda | |
| 2. Yewuw M. Felix Tethool | (Bawaslu Provinsi Papua Selatan) |
| 3. B. Tukijo | (Bawaslu Provinsi Papua Selatan) |
| 4. Akhmad Mukhlis | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 5. Thessa Aji Budiono | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 6. Petrus Paulus Sarkol | (Bawaslu Kabupaten Asmat) |
| 7. Hasan Haruna | (Bawaslu Kabupaten Asmat) |
| 8. Micahel Maipen | (Bawaslu Kabupaten Mappi) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PHPU, DPR, DPRD, dan termasuk DPD untuk tahun 2024. Perkara Nomor 271, 264, 267, dan 191 dari Provinsi Papua Selatan dan Kalimantan Selatan, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Pihak tidak kami periksa lagi kehadirannya karena tadi sudah diabsen dari bagian persidangan. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dari Para Pihak. Kemudian nanti pengesahan bukti dari Majelis Hakim, sepanjang yang mengajukan bukti, dan belum disahkan untuk sampai hari ini. Baik untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pemohon 271 untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:47]

Kami dari Kuasa Hukum Pemohon Register Perkara 271, yang hadir, saya Paskaria Tombi bersama rekan saya M. Nuzul Wibawa. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

Baik Ibu. Kemudian, dari 264, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [02:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya, kami dari Kuasa Hukum Pemohon Perkara 264. Nama Herdiyan Bayu Samodro dan rekan saya Pak Totok Prasetyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Baik. Dari 267, PKB silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:27]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:30]

Walaikumsalam.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:32]

Izin Yang Mulia, kami dari Perkara 267, Asmat 3. Perkenalkan, dari Kuasa Hukum Muhammad Zainuddin dan Bapak Subani. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

Baik. Dari 191?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PUTU BRAVO TIMOTHY [02:51]

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan, kami Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 191, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya sendiri Putu Bravo dan rekan saya Army Mulyanto, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:06]

Baik. Dari KPU RI, silakan, Termohon.

14. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:12]

Terima kasih Majelis. Termohon, saya Hasyim Asy'Ari, Ketua KPU, hadir bersama kami teman-teman dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sempa, Ketua dan Riza Anshari, Anggota. Kemudian, dari KPU Provinsi Papua Selatan hadir, Helda Ambay beserta beberapa anggota KPU Kabupaten Asmat. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:37]

Baik. Dari Kuasa Hukum tidak memperkenalkan? Silakan, Pak.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [03:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Pither Ponda Barany, Kuasa Hukum Perkara 271. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:49]

Baik. 264?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [03:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ilhamsyah dari Kantor Hukum Muhammad Rullyandi, mewakili Perkara 264. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:58]

267?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF PURNAMA AGUNG [04:01]

Mohon izin, Yang Mulia, kami bersama rekan Kuasa Hukum Termohon hadir untuk Perkara 267

21. KETUA: SUHARTOYO [04:08]

Baik. 191?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [04:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Nurkhayat Santosa Kuasa Termohon untuk Perkara Nomor 191. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:24]

Baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait PAN untuk Perkara 271, silakan.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [04:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi Inti Partai PAN hari ini hadir untuk Perkara 271, saya Muhammad Wahyu dengan rekan saya Muhammad Amril Imran. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:46]

Baik. Untuk 264 dari PAN juga, silakan.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [04:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, hari ini mewakili untuk Perkara 264 yang hadir Ramdhany Tri Saputra dan rekan saya Nur Ikhsan Hasanuddin. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:07]

Baik. Dari PKB?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [05:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Perkara 264 dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang hadir saya Erry Ayudhiansyah dan rekan saya Adidarmo Pramudji. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:24]

Baik. Dari Nasdem?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [05:28]

Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Partai Nasdem, saya Ferdian Sutanto bersama rekan saya Pangeran. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

Baik. Dari 91[sic!] perkara dari Pihak Terkait PAN, silakan.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [05:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, hadir Muhammad Ridho Fuadi dan saya sendiri Darul Huda Mustaqim. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:52]

Dari Bawaslu, silakan.

34. BAWASLU: HERWYN J.H. MALONDA [05:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu saya Herwyn Malonda, didampingi oleh rekan-rekan dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Felix Tethool dan Tukijo. Kabupaten Asmat, Paulus Sarkol, Hasan Haruna. Bawaslu Kabupaten Mappi, Micahel Maipen dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Mukhlis dan Thessa Aji Budiono. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Baik. Perkara yang pertama yang akan diperiksa adalah Perkara 271, Pemohonnya PDIP, saksi supaya maju, Maksimus Serin, Johana Resubun, Ludy Sirec, Yoel Manggaprou, Heribertus Silvinus Silubun, maju ke depan sini.

Kemudian dari Termohon saksinya, Yonathan Ewemakat, Yohanis Berpesty, Siprianus Iramakat, Aloysia Hahare, silahkan maju.

Kemudian, dari Pihak Terkait PAN, Sulhaji Sutran, Felisitas Masriat, hanya dua, ya? Ya. Dari Pihak Terkait PAN, saksinya cuma dua, ya, Pak.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [07:22]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [07:25]

Baik. Ke depan semua Pak, Saya absen sekali lagi Maksimus yang mana? Agamanya Katolik ya, Johana Resubun, Ludy Sirec, Yoel Manggaprou, Yoel Manggaprou mana? Heribertus? Yoel, Kristen, ya? Heribertus, Katolik?

Oke. Kemudian Termohon, Yonathan, mana Yonathan? Katolik, ya? Yohanis? Katolik juga. Siprianus? Katolik. Aloysia Hahare? Kristen? Bukan Katolik?

Kemudian dari saksinya Pihak Terkait, Sulhaji, Islam Pak, ya? Felisitas Masriat, apa agamanya? Katolik. Yang masih jadi penyelenggara aktif ada? Komisioner atau? Enggak ada? Ibu jadi apa? Ketua KPU? Sudah selesai? Sudah? Masih? Tapi Ibu diajukan dari Pihak Termohon, ya? Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan jadi saksi? KPU kan? KPU, ya? Baik. Jadi Ibu tidak perlu mengucapkan sumpah lagi. Masih melekat sumpahnya ketika menjadi Komisioner.

Selebihnya, mengucapkan sumpah dulu akan dipandu, Yang Mulia Bapak Daniel. Dipersilakan, Yang Mulia. Untuk yang Katolik dulu. Nanti yang Islam, Yang Mulia Prof Guntur.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Nanti yang beragama Katolik, jarinya tiga, ya. Kalau yang Protestan, jarinya dua. Oke. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya. Silakan. Oke. Sudah ya.

39. KETUA: SUHARTOYO [10:17]

Ini bukan kode nomor partai, ya. Ini untuk sumpah, ya.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:21]

Baik.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

41. SELURUH SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH [10:47]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:53]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [10:47]

Ya. Silakan, Prof.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:52]

Saudara Saksi, ikut lafal sumpah yang saya sampaikan.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."
Terima kasih.

45. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [11:52]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

46. KETUA: SUHARTOYO [11:11]

Baik. Silakan kembali ke tempat. Jangan tertukar, ya. Nanti tertukar lagi tempat duduknya. Maxi ... Maksimus Serin yang mana? Ya, duduk, Pak. Jadi saksi mandat PDIP ya, Pak, ya?

47. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [11:49]

Ya, Pak.

48. KETUA: SUHARTOYO [11:50]

Di tingkat apa?

49. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [11:53]

Ya, Pak?

50. KETUA: SUHARTOYO [11:54]

Di TPS, di PPK, kabupaten, atau provinsi, atau?

51. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [12:00]

Di distrik, Pak.

52. KETUA: SUHARTOYO [12:01]

Distrik. Distrik itu kecamatan, ya?

53. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [12:03]

Ya, Pak.

54. KETUA: SUHARTOYO [12:06]

Apa yang ingin Bapak ceritakan?

55. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [12:10]

Pada saat tanggal 26 Februari, itu dari PPD melakukan pleno tingkat distrik.

56. KETUA: SUHARTOYO [12:19]

Ya.

57. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [12:20]

Dan saat PPD membacakan hasil rekapitulasi, tidak sesuai dengan data ... data kami C.Salinan.

58. KETUA: SUHARTOYO [12:32]

Apa yang tidak sesuai? Ini di kecamatan mana? Di distrik?

59. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [12:35]

Distrik. Ya, Distrik Sor Ep.

60. KETUA: SUHARTOYO [12:37]

Distrik?

61. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [12:39]

Sor Ep.

62. KETUA: SUHARTOYO [12:40]

Sor Ep?

63. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [12:41]

Ya. Tapi kegiatannya dilaksanakan di Distrik Akat.

64. KETUA: SUHARTOYO [12:46]

Dilaksanakan di Distrik Akat?

65. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [12:48]

Ya, Pak.

66. KETUA: SUHARTOYO [12:49]

Kenapa kok dipindah?

67. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [12:52]

Karena dua distrik itu hanya punya satu PPD.

68. KETUA: SUHARTOYO [12:55]

Oh, jadi digabung di Distrik Akat?

69. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [13:00]

Ya, Pak.

70. KETUA: SUHARTOYO [13:00]

Apa yang terjadi dengan rekapitulasi untuk PDIP yang di Distrik Sor Ep?

71. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [13:09]

Itu untuk PAN dia naik sampai 715, yang data sebenarnya hanya 373 karena saya kawal dari lapangan.

72. KETUA: SUHARTOYO [13:24]

Yang PAN sebenarnya 373 naik menjadi?

73. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [13:31]

715.

74. KETUA: SUHARTOYO [13:33]

715. Dari hitungan salinan yang Saudara pegang? Atau? Ya?

75. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [13:40]

Yang saya pegang C.Salinan.

76. KETUA: SUHARTOYO [13:42]

Ya. Itu hanya?

77. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [13:44]

373.

78. KETUA: SUHARTOYO [13:45]

373 untuk Distrik Sor Ep itu?

79. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [13:47]

Sor Ep. Ya, Pak.

80. KETUA: SUHARTOYO [13:48]

Berapa TPS sih Distrik Sor Ep itu?

81. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [13:51]

Itu ada 7 TPS.

82. KETUA: SUHARTOYO [13:54]

7 TPS. Satu distrik 7 TPS?

83. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [13:56]

Ya, Pak.

84. KETUA: SUHARTOYO [13:59]

Betul itu?

85. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [14:00]

Ya, Pak. Ada 6 kampung, hanya Kampung Manep yang punya TPS 1 dan TPS 2.

86. KETUA: SUHARTOYO [14:07]

Oh, gabung?

87. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [14:07]

Ya, Pak.

88. KETUA: SUHARTOYO [14:10]

Apa lagi mau disampaikan? Cukup? Ada keberatan Saudara di tingkat?

89. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [14:14]

Ya. Saat itu saya mengajukan keberatan. Saya Saksi PDIP dan juga Saksi PKS saat itu. Kami mengajukan (...)

90. KETUA: SUHARTOYO [14:21]

Saksi apa dulu?

91. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [14:22]

Saya Saksi PDIP Perjuangan dan juga hari itu Saksi PKS juga mengajukan keberatan.

92. KETUA: SUHARTOYO [14:28]

Oh, keberatan.

93. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [14:29]

Ya.

94. KETUA: SUHARTOYO [14:30]

Saya kira (...)

95. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [14:30]

Tapi secara lisan.

96. KETUA: SUHARTOYO [14:32]

Tidak mengisi Form Keberatan?

97. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [14:35]

Tidak mengisi Form Keberatan.

98. KETUA: SUHARTOYO [14:36]

Tidak disampaikan ke (...)

99. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [14:37]

Karena tidak ... tidak tersedia.

100. KETUA: SUHARTOYO [14:39]

Tidak tersedia atau Saudara tidak mengisi?

101. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [14:43]

Tidak tersedia.

102. KETUA: SUHARTOYO [14:45]

Ada lapor ke panwas?

103. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [14:48]

Saya sudah lapor ke PPD.

104. KETUA: SUHARTOYO [14:53]

Bukan ke panwas?

105. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [14:55]

Di situ juga ada panwas dan panwas juga menyaksikan itu.

106. KETUA: SUHARTOYO [14:58]

Bukan. Saudara secara resmi lapor tidak ke panwas?

107. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [15:02]

Saya lapor waktu itu.

108. KETUA: SUHARTOYO [15:04]

Lapor apa tidak?

109. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [15:06]

Lapor sama pak ketua.

110. KETUA: SUHARTOYO [15:08]

Pak ketua apa?

111. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [15:09]

Panwas distrik.

112. KETUA: SUHARTOYO [15:11]

Panwas. Terus apa bentuk laporannya?

113. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [15:13]

Itu dikembalikan ... berunding sama PPD ... dan PPD (...)

114. KETUA: SUHARTOYO [15:17]

Laporan Saudara ter ... formal tertulis atau hanya (...)

115. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [15:20]

Lisan, Pak.

116. KETUA: SUHARTOYO [15:22]

Dikembalikan ke?

117. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [15:23]

Ya, Pak.

118. KETUA: SUHARTOYO [15:26]

Apa tindak lanjut dari PPD?

119. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [15:28]

PPD menyampaikan kepada kami, para saksi, mereka tidak punya banyak cukup waktu untuk melakukan perbaikan di distrik karena mereka didesak untuk harus ke kabupaten.

120. KETUA: SUHARTOYO [15:39] I

Ya. Jadim, enggak ada tindak lanjut?

121. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [15:42]

Ya, Pak.

122. KETUA: SUHARTOYO [15:42]

Kemudian, di tingkat kabupaten Saudara ada kawal sana?

123. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [15:47]

Ya. Saya kawal sampai tingkat kabupaten, Pak.

124. KETUA: SUHARTOYO [15:49]

Masih keberatan juga di sana untuk yang Distrik Sor Ep?

125. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [15:53]

Ya.

126. KETUA: SUHARTOYO [15:54]

Ya?

127. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [15:54]

Ya.

128. KETUA: SUHARTOYO [15:55]

Siapa yang jadi saksi mandat di tingkat kabupaten? Oke, nanti ditanya.

Johana, apa yang mau disampaikan?

129. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [16:07]

Ya. Izin, Yang Mulia. Saya akan memberikan kesaksian terkait rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara tingkat distrik pemilu tahun 2024.

130. KETUA: SUHARTOYO [16:18]

Di distrik?

131. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [16:20]

Di Distrik Akat.

132. KETUA: SUHARTOYO [16:21]

Akat?

133. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [16:22]

Ya.

134. KETUA: SUHARTOYO [16:23]

Memang betul ya, digabung, ya?

135. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [16:24]

Ya, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [16:25]

Dengan Sor Ep ini?

137. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [16:26]

Ya, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [16:31]

Saudara sebagai apa?

139. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [16:32]

Saya sebagai Anggota PPD.

140. KETUA: SUHARTOYO [16:34]

Anggota PPD. Baik. Apa yang mau disampaikan?

141. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [16:38]

Ya, terima kasih. Proses pleno tingkat Distrik Akat dimulai pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, bertempat di Aula Kantor Distrik Akat. Dengan pemimpin rapat pleno adalah Ketua PPD Distrik Akat Sor Ep, yang dihadiri ... yang dihadiri oleh Kepala Distrik Akat dan Sor Ep, Kapolsek Distrik Akat, Pandis dan jajarannya, Ketua PPS, Ketua KPPS, peserta saksi-saksi parpol, dan semua peserta lainnya yang menyaksikan rapat pleno (...)

142. KETUA: SUHARTOYO [17:13]

Ya, itu enggak usah diceritakan. Itu kan yang normalnya itu.

143. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [17:14]

Ya.

144. KETUA: SUHARTOYO [17:18]

Kejadian yang khusus apa yang terjadi di Distrik Akat, Bu?

145. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [17:21]

Ya, kejadian khusus yang terjadi di sana itu adalah kami Anggota PPD, kami mengetahui bahwa di situ ada penggelembungan suara untuk Distrik Sor Ep. Dia melebihi jumlah DPT, yaitu 1.742.

146. KETUA: SUHARTOYO [17:34]

1.700?

147. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [17:36]

42.

148. KETUA: SUHARTOYO [17:38]

Ini bukan kaitannya dengan yang PAN tadi?

149. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [17:43]

Kami belum bisa menyimpulkan itu, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [17:46]

Tapi kok, Ibu tahu kalau itu terjadi di Sor Ep?

151. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [17:50]

Karena memang dari data yang kami punya C.Hasil itu kan, di Distrik Sor Ep itu yang adanya penggelembungan suara, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [17:59]

Itu yang 1.000 berapa, Bu?

153. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [18:01]

1.742.

154. KETUA: SUHARTOYO [18:03]

Ya itu, 1.742 itu akumulasi dari ... ini digelembungkan di partai apa?

155. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [18:13]

Di situ ada dari beberapa TPS, tapi yang kami lihat itu memang di Partai PAN.

156. KETUA: SUHARTOYO [18:20]

Partai PAN ada penambahan?

157. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [18:21]

Ya, ada penambahan di situ, Yang Mulia.

158. KETUA: SUHARTOYO [18:22]

Penambahannya berapa?

159. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [18:25]

Penambahan di situ untuk akumulasi keseluruhan untuk Partai PAN itu dia naik jadi 715.

160. KETUA: SUHARTOYO [18:33]

715.

161. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [18:34]

Ya.

162. KETUA: SUHARTOYO [18:34]

Kok kemudian 1.742 tambahan untuk partai apa?

163. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [18:40]

Itu jumlah DPT-nya, Yang Mulia. Jumlah DPT (...)

164. KETUA: SUHARTOYO [18:44]

Jumlah DPT apa ini?

165. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [18:44]

Distrik Sor Ep.

166. KETUA: SUHARTOYO [18:46]

Sor Ep?

167. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [18:47]

Ya, Yang Mulia.

168. KETUA: SUHARTOYO [18:47]

Tadi jumlah penggelembungan, penambahan, atau ini DPT yang Ibu kata anu ... cerita ... ceritakan itu?

169. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [18:56]

Dari hasil rekapan yang kami buat itu, di situ jumlah perolehan rekapitulasi itu dia melebihi dari jumlah DPT.

170. KETUA: SUHARTOYO [19:04]

Oh, yang kelebihanannya 1.700 ini ataukah memang DPT-nya 1.700 ini?

171. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [19:10]

DPT-nya itu adalah 1.742 Yang Mulia.

172. KETUA: SUHARTOYO [19:11]

Oh, kok tadi ada penggelembungan 1.700?

173. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [19:15]

1.700.

174. KETUA: SUHARTOYO [19:17]

Nah, kemudian penggelembungan itu, apa yang Ibu maksud sama dengan yang diceritakan si Maksimus itu bukan?

175. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [19:24]

Ya. Di situ penggelembungan (...)

176. KETUA: SUHARTOYO [19:26]

Ada suara PAN yang bertambah 715 ini?

177. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [19:30]

Ya, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [19:31]

Nah, ketika itu Saudara sebagai PPD apa yang dilakukan?

179. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [19:36]

Pada waktu itu, Yang Mulia, kami itu ... kami semua anggota PPD mengetahui hal itu. Tetapi kami pada saat selesai membacakan hasil rekap ... rekapitulasi, memang ada keberatan dari beberapa saksi PDIP, Nasdem (...)

180. KETUA: SUHARTOYO [19:51]

Ya.

181. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [19:52]

PKS, memang mereka mengajukan keberatan. Tetapi waktu itu kami sudah didesak oleh Korwil Dapil 1 untuk segera melakukan itu pergeseran logistik ke (...)

182. KETUA: SUHARTOYO [20:01]

Jadi enggak direspons?

183. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [20:02]

Ya. Kami buat janji kesepakatan saja dengan mereka, saksi parpol bahwa nanti kita sampai di Agats, baru kami berikan itu Form Keberatan.

184. KETUA: SUHARTOYO [20:11]

Di atas mana?

185. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [20:12]

Karena kami sudah didesak oleh (...)

186. KETUA: SUHARTOYO [20:11]

Di atas mana?

187. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [20:13]

Di Kabupaten Agats, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [20:16]

Oh, akan direspons di tingkat kabupaten?

189. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [20:20]

Ya, Yang Mulia.

190. KETUA: SUHARTOYO [20:20]

Direspons tidak akhirnya? Saudara ikut ... ikut terlibat ketika rekapitulasi tingkat kabupaten?

191. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [20:30]

Ya, tingkat kabupaten juga saya ikut, Yang Mulia.

192. KETUA: SUHARTOYO [20:32]

Terus apa yang kemudian ditindaklanjuti untuk Sor Ep, ini?

193. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [20:37]

Untuk tingkat Sor Ep itu karena waktu kami di distrik, Yang Mulia, kami hanya pleno itu 1 jenis kotak suara, yaitu kabupaten/kota (...)

194. KETUA: SUHARTOYO [20:46]

Ya. Ini sudah, sudah lewat (...)

195. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [20:49]

Kami melakukan (...)

196. KETUA: SUHARTOYO [20:49]

Distrik sudah lewat, sekarang (...)

197. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [20:51]

Ya.

198. KETUA: SUHARTOYO [20:52]

Yang ditanya ketika di kabupaten?

199. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [20:54]

Di kabupaten, Yang Mulia. Kami tidak sempat juga memberikan mereka Form Keberatan.

200. KETUA: SUHARTOYO [20:59]

Nah, semua jadi PHP terus di distrik, katanya mau direspons di kabupaten, kabupaten katanya enggak ada waktu lagi.

201. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [21:07]

Ya, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [21:08]

Akhirnya tidak ditindaklanjuti yang kejadian atau kasus yang berkaitan dengan Sor Ep itu?

203. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [21:14]

Itu ditindaklanjuti di penetapan kabupaten tanggal 6.

204. KETUA: SUHARTOYO [21:20]

Apa bentuk ... bentuk... tindaklanjutnya apa?

205. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [21:22]

Bentuk tindaklanjutnya itu sebelum kami pleno, untuk pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, kami memang didatangi oleh Saksi, Saksi Saudara Maksi. Dia menyampaikan bahwa di sini ada kekurangan suara untuk Caleg PDIP Nomor Urut 1, itu pengurangan suara itu 205.

206. KETUA: SUHARTOYO [21:47]

Bukan, ini yang berkaitan dengan penggelembungan tadi lho Bu. Di tingkat kabupaten ditindaklanjuti bentuk apa?

207. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [21:52]

Oh, ya. Untuk ditindaklanjuti itu kami melakukan itu perbaikan data. Kami melakukan perbaikan data di situ (...)

208. KETUA: SUHARTOYO [22:01]

Yang melakukan perbaikan di tingkat kabupaten?

209. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [22:04]

Ya. Bahwa (...)

210. KETUA: SUHARTOYO [22:04]

Berarti apa ... KPU tingkat kabupaten?

211. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [22:09]

Ya, di tingkat kabupaten (...)

212. KETUA: SUHARTOYO [22:09]

Apa dari Sor Ep?

213. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [22:11]

Dari Sor Ep itu yang kami lakukan itu adalah kami ... kami di-skorsing oleh pemimpin sidang ketua KPU, lalu kami dikasih (...)

214. KETUA: SUHARTOYO [22:18]

Ya, sudah, nanti ditanya ke ... anu apa ... ketika berekapitulasi tingkat kabupaten.

Ludy Sirec, mau menjelaskan apa ini?

215. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [22:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan melanjutkan kronologis apa yang disampaikan oleh Saudara saya Ibu Johana.

216. KETUA: SUHARTOYO [22:45]

Waktu itu Bapak sebagai apa? Ketua PPD, ya?

217. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [22:49]

Saya sebagai Ketua PPD Distrik (...)

218. KETUA: SUHARTOYO [22:50]

Nah, yang mau dijelaskan sama enggak dengan yang dijelaskan Saksi sebelumnya? Sama kasusnya?

219. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [22:58]

Sama.

220. KETUA: SUHARTOYO [22:59]

Sama. Apa, apa yang mau Bapak tambahkan? Yang belum disampaikan oleh Saksi, dua Saksi sebelumnya apa yang mau Bapak tambahkan?

221. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [23:11]

Pada saat itu kami menyandingkan data pada tanggal 6.

222. KETUA: SUHARTOYO [23:19]

6 apa itu?

223. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [23:21]

Tanggal 6.

224. KETUA: SUHARTOYO [23:24]

6 apa?

225. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [23:21]

Maret 2024.

226. KETUA: SUHARTOYO [23:24]

6 Maret. Ini sudah ada rekapitulasi tingkat kabupaten belum?

227. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [23:30]

Itu sudah pleno tingkat kabupaten.

228. KETUA: SUHARTOYO [23:37]

Sudah. Kemudian untuk apa urgensinya atau kaitannya di distrik masih menyandingkan data?

229. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [23:49]

Sesuai dengan apa ... kelanjutan kronologis dari Saudara Ibu Johana.

230. KETUA: SUHARTOYO [23:56]

Itu selesai tidak waktu di tingkat kabupaten? Rekapitulasi tingkat kabupaten sudah selesai belum berkaitan dengan Sor Ep ini?

231. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [24:10]

D.Hasil yang perbaikan sudah kami perbaiki dan diparaf oleh saksi dan keberatan, yaitu (...)

232. KETUA: SUHARTOYO [24:19]

Ini sudah perhitungan di tingkat mana Bapak koreksi itu?

233. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [24:21]

Di tingkat kabupaten.

234. KETUA: SUHARTOYO [24:22]

Tingkat kabupaten.

235. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [24:23]

Ya. Tingkat kabupaten.

236. KETUA: SUHARTOYO [24:26]

Sudah dikoreksi. Jadi, sudah selesai kalau begitu? Persoalan ... ada penambahan suara PAN yang diceritakan Saksi-Saksi tadi sudah selesai kalau begitu?

237. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [24:39]

Pada saat itu belum selesai.

238. KETUA: SUHARTOYO [24:42]

Apa yang Bapak koreksi kalau begitu?

239. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [24:45]

Kami sandingkan data malam itu, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [24:46]

Hasilnya apa?

241. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [24:50]

Sandingkan data dari beberapa saksi parpol dan juga Bawaslu.

242. KETUA: SUHARTOYO [24:58]

Apa yang disandingkan? Data kan?

243. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [24:59]

Ya.

244. KETUA: SUHARTOYO [25:00]

Hasil?

245. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [25:00]

C.Hasil.

246. KETUA: SUHARTOYO [25:02]

Hasilnya gimana, Pak? Hasil finalnya, terakhirnya?

247. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [25:07]

Ya. Setelah kami sandingkan data, ditandatangani oleh para saksi (...)

248. KETUA: SUHARTOYO [25:15]

Ya, hasilnya seperti apa? Apa benar suara PAN itu hanya 373 ataukah 715?

249. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [25:23]

Setelah kita sandingkan data sama-sama dari beberapa saksi dan juga para teman-teman dari Bawaslu, ternyata benar dari PAN suara yang normal 373. Itu yang data riil (...)

250. KETUA: SUHARTOYO [25:42]

Terus yang ... ya. Terus yang, yang riilnya yang dihitung berapa? 373 atau 715?

251. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [25:51]

737 ... 373.

252. KETUA: SUHARTOYO [25:55]

Yang dihitung untuk rekapitulasi resmi?

253. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [25:57]

Ya.

254. KETUA: SUHARTOYO [25:58]

373?

255. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [25:59]

373.

256. KETUA: SUHARTOYO [26:01]

Eenggak ada masalah dong kalau begitu?

257. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [26:02]

Yang sudah ditetapkan.

258. KETUA: SUHARTOYO [26:04]

Selesai kalau begitu, sudah?

259. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [26:05]

Ya.

260. KETUA: SUHARTOYO [26:08]

Yoel Ma ... Pak Yoel, apa ini? Saksi Mandat PDIP tingkat apa?

261. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [26:13]

Tingkat kabupaten, Yang Mulia.

262. KETUA: SUHARTOYO [26:15]

Baik. Masih mau cerita tentang isu yang sama atau isu lain?

263. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [26:23]

Ada tambahan, Yang Mulia.

264. KETUA: SUHARTOYO [26:23]

Apa tambahannya?

265. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [26:26]

Pleno tingkat kabupaten pada tanggal 9 Maret tahun 2024, saya mengikuti, saya Saksi dari PDI Perjuangan mengikuti pleno tersebut dan dalam pleno tersebut, ketua KPU menyampaikan pada sambutannya bahwa dalam pleno tingkat kabupaten ini tidak diberikan kesempatan atau tidak ada keberatan.

266. KETUA: SUHARTOYO [26:59]

Tidak boleh ada keberatan.

267. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [27:01]

Tidak boleh ada keberatan dari para saksi dan kalau dari saksi ada keberatan, silakan mengajukannya secara tertulis lewat form yang sudah disediakan.

268. KETUA: SUHARTOYO [27:16]

Gitu, ya? Oke. Tambahannya itu atau tambahan ada lagi?

269. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [27:20]

Ya, setelah mengikuti pleno, terjadi perbedaan suara, yaitu pada Dapil 1 dengan Dapil 3. Nah, sehingga saya setelah selesai pleno mengisi form keberatan yang ditujukan kepada (...)

270. KETUA: SUHARTOYO [27:42]

Perbedaannya seperti apa, Pak?

271. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [27:45]

Perbedaan pada Dapil 1, yaitu di jumlah suara PAN yang bertambah.

272. KETUA: SUHARTOYO [27:56]

Bertambah berapa?

273. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [27:58]

Bertambah dari ... bertambah menjadi 1.712 suara.

274. KETUA: SUHARTOYO [28:01]

1.700?

275. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [28:09]

Untuk Distrik Sor Ep.

276. KETUA: SUHARTOYO [28:11]

1.700?

277. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [28:14]

1.700 (...)

278. KETUA: SUHARTOYO [28:25]

Bukan yang 715 tadi?

279. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [28:27]

Yang saya sebutkan itu totalnya. Total akumulasi keseluruhan suara PAN.

280. KETUA: SUHARTOYO [28:35]

Katanya dari Sor Ep tadi Bapak mau sampaikan.

281. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [28:38]

Maksud saya yang penambahannya dari distriknya. Sehingga (...)

282. KETUA: SUHARTOYO [28:39]

Distrik Sor Ep?

283. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [28:41]

Ya, total akumulasinya bertambah seperti itu.

284. KETUA: SUHARTOYO [28:43]

Jumlahnya berapa?

285. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [28:44]

Yang bertambahnya total keseluruhan suara PAN itu 1.712.

286. KETUA: SUHARTOYO [28:53]

12? Beda lagi ini. Yang seharusnya hanya berapa? Seharusnya hanya berapa, Pak?

287. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [29:11]

Kalau yang seharusnya di Sor Ep itu 1.715.

288. KETUA: SUHARTOYO [29:14]

Untuk?

289. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [29:14]

Eh ... 715.

290. KETUA: SUHARTOYO [29:17]

715. Terus? Yang dihitung berapa?

291. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [29:24]

Ya, harusnya suaranya itu 373.

292. KETUA: SUHARTOYO [29:34]

Duh. Bapak, Bapak. Untuk Dapil 1 katanya tadi dari Sor Ep 1.712.

293. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [29:35]

Ya.

294. KETUA: SUHARTOYO [29:39]

Sudah berubah 1.715.

295. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [29:40]

Maaf.

296. KETUA: SUHARTOYO [29:45]

Kemudian, mestinya 715. Yang benar seperti apa?

297. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [29:46]

Maaf, Yang Mulia, yang saya sebutkan 1.700 sekian itu jumlah keseluruhan.

298. KETUA: SUHARTOYO [29:52]

Ya, keseluruhan dari mana? Kan ada penggelembungann dari 373 menjadi 715 kalau mengikuti cerita-cerita Saksi sebelumnya. Nah, kemudian kalau Bapak mengatakan akumulasinya 1.700-an itu akumulasi dari mana lagi? Ini kalau keterangan Saksi tidak konsisten nanti dikesampingkan oleh Hakim, lho. Enggak bisa dijadikan bukti yang kemudian meyakinkan kalau saling apa ... tidak konsisten antara Saksi satu dengan lainnya itu.

Ayo, Pak Yoel, masih mau jelaskan enggak? Kalau enggak, kami pindah ke Pak Heribertus ini.

299. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [30:36]

Izin, Yang Mulia. Saya saksi partai.

300. KETUA: SUHARTOYO [30:41]

Sudah, tadi sudah ditanya, kan?

301. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [30:44]

Sudah.

302. KETUA: SUHARTOYO [30:43]

Sudah ditanya. Ini Pak Yoel.

303. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [30:45]

Ya. Setelah pleno, saya juga tidak diberikan D.Hasil Kabupaten, Yang Mulia.

304. KETUA: SUHARTOYO [30:52]

Tidak, ya. Tapi kejadian yang Bapak ceritakan tadi kan seharusnya tetap bisa diceritakan. Meskipun D.Hasil tidak diberikan, itu persoalan lain. Soal angka-angka tadi lho, Pak yang Bapak ... Bapak kan Saksi mandat di tingkat kabupaten.

305. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [31:06]

Siap.

306. KETUA: SUHARTOYO [31:07]

Dari PDIP. Yang benar untuk Sor Ep itu ada persoalan angka itu yang Bapak tahu 1.700-an itu atau 373 menjadi 715? Oh, ini Hakim sudah bantu-bantu anu ini ... untuk mengingatkan supaya sesuai, tapi Bapak juga malah ... gimana? Oke, untuk dapil yang lain seperti apa, Pak? Tadi kan ada 2 dapil. Dapil 1 ini dapil berapa? Dapil 3?

307. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [31:45]

Ya. Dapil 1 dengan Dapil 3.

308. KETUA: SUHARTOYO [31:46]

Ya, kalau Dapil 3 apa yang terjadi, Pak?

309. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [31:50]

Kalau Dapil 3 itu, yang awalnya PKB tidak ada ... tidak masuk dalam apa ... daftar perhitungan perolehan suara. Ternyata dalam

penetapan di tingkat kabupaten, PKB, menurut data saya, PKB itu akan mendapatkan suara. Nah, itu berarti (...)

310. KETUA: SUHARTOYO [32:21]

Akan mendapatkan atau mendapatkan?

311. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [32:23]

Mendapatkan.

312. KETUA: SUHARTOYO [32:23]

Berapa?

313. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [32:25]

Itu berarti PDIP akan kehilangan satu kursi, dari empat tinggal tiga.

314. KETUA: SUHARTOYO [32:30]

Ya, satu kursi itu kan harus, Bapak harus bisa merinci Dapil 3 ada perolehan suara untuk PKB yang semula tidak mendapatkan, menjadi mendapatkan, itu dari berapa ke berapa? Kalau tidak mendapatkan dari nol, kemudian mendapatkan berapa?

315. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YOEL MANGGAPROU [32:53]

Kalau untuk angkanya, saya tidak begitu ingat.

316. KETUA: SUHARTOYO [32:55]

Ya, oke.

317. KETUA: SUHARTOYO [32:57]

Ini Bu Paska gimana Saksi Ibu ini?
Pak Heribertus, apa yang diketahui?

318. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [33:07]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya saksi partai pada saat pleno KPU Provinsi. Pada tanggal 10 Maret, saya dilapor ... karena saya juga sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Selatan.

319. KETUA: SUHARTOYO [33:24]

Provinsi ya, Pak? Bapak jadi Saksi ketika pleno, anu ya, Provinsi, ya?

320. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [33:28]

Siap.

321. KETUA: SUHARTOYO [33:30]

Apa yang Bapak mau jelaskan? Singkat saja, Pak.

322. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [33:31]

Ya. Pertama pada tanggal 10, saya dilaporkan lisan bahwa PDI Perjuangan di Asmat untuk Dapil 1 dan Dapil 3, itu kita kehilangan kursi karena ada penggelembungan suara (...)

323. KETUA: SUHARTOYO [33:43]

Asmat ya, Pak?

324. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [33:45]

Ya. Kabupaten Asmat.

325. KETUA: SUHARTOYO [33:46]

Dapil 1 dan Dapil 3 (...)

326. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [33:47]

Dapil 3. Bahwa kita PDI Perjuangan kehilangan kursi, sehingga saya sarankan untuk membuat laporan tertulis ke Bawaslu Kabupaten. Lalu DPC Partai membuat laporan tertulis pada tanggal 10 itu dan saya minta untuk juga dilaporkan kepada kami di Provinsi DPD.

327. KETUA: SUHARTOYO [34:06]

Ya. Bentuk kehilangannya seperti apa, Pak?

328. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [34:11]

Menurut laporan dari DPC Partai pada saat itu, suara PAN untuk Distrik Sor Ep itu ada 373 suara. Nah, itu yang riilnya.

329. KETUA: SUHARTOYO [34:27]

Ya.

330. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [34:28]

Tetapi pada saat pleno di tingkat distrik, itu ada pengelembungan kurang-lebih 200 suara.

331. KETUA: SUHARTOYO [34:31]

Ya. Itu kemudian di tingkat kabupatennya bagaimana dan di tingkat provinsi, kan Bapak jadi saksi.

332. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [34:41]

Siap, ya. Jadi (...)

333. KETUA: SUHARTOYO [34:43]

Bagaimana sikap Bapak ketika jadi saksi di tingkat provinsi?

334. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [34:48]

Ya. Waktu kami di provinsi pada awal pleno sambil menunggu KPU Asmat mempersiapkan dokumen untuk dibacakan, saya menyampaikan pertanyaan bahwa sejak hari pertama kita pleno di KPU Provinsi, persoalan yang muncul hanya ada pada level perolehan suara tingkat provinsi. Nah, bagaimana kalau kemudian kami dari PDI Perjuangan punya masalah, tetapi ini terkait dengan perolehan suara tingkat Kabupaten? Nah, apakah kemudian terkait dengan persoalan perolehan suara tingkat Kabupaten ini bisa juga diselesaikan di tingkat Provinsi?

335. KETUA: SUHARTOYO [35:28]

Nah, terus apa katanya?

336. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [35:31]

Waktu itu baik Bawaslu maupun KPU Provinsi meminta waktu untuk meminta petunjuk dari KPU RI dan Bawaslu RI.

337. KETUA: SUHARTOYO [35:38]

Ya, akhirnya persoalan itu terselesaikan enggak di tingkat provinsi, Pak?

338. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [35:43]

Ya, terselesaikan waktu itu dengan kemudian pada pleno berikutnya setelah saya mempertanyakan lagi, Bawaslu sampaikan bahwa kami diberi petunjuk untuk bisa melakukan penyandingan data dan bisa diselesaikan di tingkat provinsi. Nah, saat itu dilakukanlah penyandingan data untuk 2 dapil. Dan untuk Dapil 3 itu bisa diselesaikan karena saat itu D.Hasil distrik yang punya saksi partai dari kami dan juga D.Hasil distrik yang punya Bawaslu kabupaten itu cocok.

339. KETUA: SUHARTOYO [36:18]

Ya. Oke, jadi untuk Dapil 3 bisa diselesaikan?

340. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [36:21]

Bisa diselesaikan.

341. KETUA: SUHARTOYO [36:23]

Bentuk penyelesaiannya apa?

342. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [36:25]

Saat itu dikeluarkan rekomendasi Bawaslu provinsi kepada KPU kabupaten untuk melakukan penyesuaian dengan data yang sebenarnya, berdasarkan hasil penyandingan.

343. KETUA: SUHARTOYO [36:35]

Artinya, selesai pada tingkat ada rekomendasi dari Bawaslu?

344. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [36:38]

Provinsi ... Bawaslu.

345. KETUA: SUHARTOYO [36:41]

Untuk dilakukan penyandingan.

346. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [36:43]

Siap.

347. KETUA: SUHARTOYO [36:44]

Sudah dilakukan?

348. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [36:46]

Sudah.

349. KETUA: SUHARTOYO [36:46]

Ada persoalan?

350. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [36:48]

Yang persoalan itu Dapil 1, karena (...)

351. KETUA: SUHARTOYO [36:51]

Bukan. Yang Dapil 3 dulu, Bapak.

352. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [36:52]

Tidak ada persoalan.

353. KETUA: SUHARTOYO [36:54]

Enggak ada. Sudah selesai, ya.

354. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [36:54]

Dapil 3 selesai, ya.

355. KETUA: SUHARTOYO [36:55]

Kemudian Dapil 1, masih terkait dengan PAN ini?

356. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [36:56]

Ya. Siap, masih dengan PAN.

357. KETUA: SUHARTOYO [37:03]

Apa bentuk penyelesaiannya di tingkat provinsi untuk Dapil 1?

358. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [37:06]

Ya. Jadi, untuk Dapil 1 saat disandingkan data untuk D.Hasil itu memang berbeda-beda. Karena kami dari saksi partai itu mendapat

D.Hasil perbaikan pada saat pleno di kabupaten. Sementara D.Hasil perbaikan itu tidak diberikan oleh KPU kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu kabupaten tidak mempunyai pegangan untuk penyandingan. Jadi, Bawaslu itu masih pakai dokumen yang lama, kami pakai yang perbaikan.

Nah, saat itu dari Bawaslu provinsi menjelaskan ke saya, "Pak Heri, minta maaf, kami tidak bisa menyandingkan data karena dari hasil sandingan ini berbeda." Lalu saya ajukan keberatan, saya sampaikan, "Bapak mohon izin, kami punya C.Salinan. Apakah tidak boleh kami sandingkan data dari C.Salinan dengan D.Hasil jika itu ada perbedaan?"

359. KETUA: SUHARTOYO [38:01]

Terus bagaimana?

360. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [38:02]

Dari Bawaslu jelaskan bahwa mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan penyandingan sampai di tingkat C.Salinan, sehingga kalau PDI Perjuangan keberatan, silakan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu, Majelis Hakim Yang Mulia.

361. KETUA: SUHARTOYO [38:16]

Jadi, untuk Dapil 1 tidak ada penyelesaian?

362. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN [38:19]

Tidak ada penyelesaian.

363. KETUA: SUHARTOYO [38:24]

Yonathan Ewemakat, Anggota PPD Akat, Sor Ep. Apa yang mau disampaikan? Nih sesama anggota PPD nih, sebenarnya.

364. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [38:41]

Baik. Terima kasih, Pak Mulia. Saya mau sampaikan tentang proses pemungutan suara di tingkat kampung sampai kabupaten berjalan dengan baik. Proses sandingan data atau pleno (...)

365. KETUA: SUHARTOYO [39:03]

Pleno tingkat mana ini?

366. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:06]

Pleno tingkat distrik.

367. KETUA: SUHARTOYO [39:09]

Distrik. Distrik mana?

368. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:09]

Akat.

369. KETUA: SUHARTOYO [39:09]

Akat. Ini yang ada persoalan Distrik Sor Ep.

370. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:14]

Akat, Sor Ep.

371. KETUA: SUHARTOYO [39:15]

Gimana? Gabung, Pak? Gabung atau pisah?

372. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:16]

Gabung, Pak.

373. KETUA: SUHARTOYO [39:19]

Gabung?

374. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:19]

Ya.

375. KETUA: SUHARTOYO [39:19]

Plenonya juga gabung?

376. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:20]

Gabung, Pak.

377. KETUA: SUHARTOYO [39:23]

Oke. Ketika Pleno Sor Ep, gimana?

378. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:28]

Prosesnya itu jalannya baik.

379. KETUA: SUHARTOYO [39:29]

Berjalan baik.

380. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:41]

Siap.

381. KETUA: SUHARTOYO [39:31]

Bukan jalannya baik, Pak. Berjalan baik. Terus?

382. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:37]

Ada berapa saksi partai yang memasukkan keberatan.

383. KETUA: SUHARTOYO [39:41]

Partai apa, Pak?

384. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:43]

PDIP.

385. KETUA: SUHARTOYO [39:45]

Apa yang diajukan keberatannya?

386. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:55]

Ajukannya yang seperti apa?

387. KETUA: SUHARTOYO [39:56]

Penambahan suara itu betul?

388. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [39:57]

Saya rasa tidak, Pak, itu tidak.

389. KETUA: SUHARTOYO [39:58]

Yang 373 jadi 715 itu betul tidak?

390. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [40:00]

Tidak, Pak.

391. KETUA: SUHARTOYO [40:02]

Tidak?

392. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [40:03]

Tidak.

393. KETUA: SUHARTOYO [40:06]

Apa kalau begitu PDIP keberatan apa?

394. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [40:09]

Kalau yang PDIP itu cuma internal partai, Pak.

395. KETUA: SUHARTOYO [40:14]

Bagaimana?

396. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [40:15]

Internal partai, Pak.

397. KETUA: SUHARTOYO [40:15]

Apa? Internal partai dibawa ke tingkat distrik apa?

398. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [40:22]

Tingkat kabupaten.

399. KETUA: SUHARTOYO [40:23]

Ini yang ditanya ketika pleno di tingkat Sor Ep, Distrik. Apa yang keberatan PDIP itu keberatannya soal apa?

400. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [40:39]

Maaf, minta maaf. Tingkat kabupaten itu untuk tingkat distrik itu tidak ada, Pak.

401. KETUA: SUHARTOYO [40:49]

Tidak ada keberatan?

402. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [40:53]

Siap.

403. KETUA: SUHARTOYO [40:53]

Bapak sudah disumpah tadi? Benar, ya, tidak ada keberatan ya?

404. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [40:55]

Siap.

405. KETUA: SUHARTOYO [40:59]

Termasuk ada keberatan dari Saksi Maksimus soal ada penambahan suara untuk PAN tidak benar itu?

406. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [41:06]

Tidak benar, Pak.

407. KETUA: SUHARTOYO [41:10]

Yohanis Berpesty, apa yang dijelaskan?

408. SAKSI TERMOHON: YOHANIS BERPESTY [41:17]

Terima kasih, Bapak Yang Mulia. Yang saya mau jelaskan, saya sebagai Sekretaris PPD di Distrik Akat. Penjelasannya sama.

409. KETUA: SUHARTOYO [41:34]

Apa? Tidak ada proses pleno, tidak ada keberatan?

410. SAKSI TERMOHON: YOHANIS BERPESTY [41:39]

Tidak ada keberatan dari beberapa saksi partai di distrik itu, sehingga pleno tingkat kabupaten lanjut seperti biasa di kabupaten.

411. KETUA: SUHARTOYO [41:54]

Yang waktu ada keberatan katanya PAN ada penambahan suara kemudian PDIP mengajukan keberatan?

412. SAKSI TERMOHON: YOHANIS BERPESTY [41:54]

Itu di tingkat kabupaten, Bapak.

413. KETUA: SUHARTOYO [42:07]

Bukan di tingkat pleno Sor Ep?

414. SAKSI TERMOHON: YOHANIS BERPESTY [42:09]

Bukan.

415. KETUA: SUHARTOYO [42:12]

Maksimus, Saudara waktu hasil akhirnya itu tanda tangan tidak?

416. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [42:18]

Waktu di distrik?

417. KETUA: SUHARTOYO [42:21]

He eh.

418. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [42:28]

Waktu di distrik tidak dibagikan D.Hasil, Pak.

419. KETUA: SUHARTOYO [42:24]

Jadi, tidak ada?

420. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAKSIMUS SERIN [42:23]

Ya. Tidak ditandatangani.

421. KETUA: SUHARTOYO [42:22]

Ya. Pak Yonathan betul itu Saudara sebagai Anggota PPD dan mengetahui bahwa tidak ada pembagian hasil pleno itu?

422. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [42:39]

Tidak ada keberatan, Pak?

423. KETUA: SUHARTOYO [42:40]

Ha?

424. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [42:42]

Tidak ada keberatan. Waktu (...)

425. KETUA: SUHARTOYO [42:45]

Bukan tidak ada keberatan.

426. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [42:47]

Untuk yang tanda tangan D.Hasil?

427. KETUA: SUHARTOYO [42:46]

Bukan itu. Ada tidak informasi ke Bapak atau Bapak sendiri yang mengetahui bahwa memang D.Hasil itu tidak dibagi. Sehingga saksi-saksi mandat tidak bisa tanda tangan atau bagaimana? Ini Kuasa Hukum

3 ... 271 jadi bukti apa enggak hasil rekapitulasi tingkat Sor Ep? Di T berapa, Pak?

428. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [43:23]

D.Hasilnya dibagi.

429. KETUA: SUHARTOYO [43:23]

Dibagi? Coba.

430. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [43:31]

T-4, Majelis.

431. KETUA: SUHARTOYO [43:29]

T-4 ya?

432. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [43:31]

T-4 untuk kabupaten.

433. KETUA: SUHARTOYO [43:36]

T berapa untuk Sor Ep dan Akat? Yohanis sama ya, keterangannya, ya? Jadi, tidak ada keberatan? Benar tidak bahwa hasil (ucapan tidak terdengar jelas) itu tidak dibagi, sehingga tidak ada kesempatan tanda tangan?

434. SAKSI TERMOHON: YOHANIS BERPESTY [43:57]

Tidak ada keberatan, Pak.

435. KETUA: SUHARTOYO [43:57]

Bukan itu. Soal yang saksi mandat kemudian tidak bisa tanda tangan karena tidak dibagi hasil itu.

436. SAKSI TERMOHON: YOHANIS BERPESTY [44:02]

Dibagi.

437. KETUA: SUHARTOYO [44:05]

Ha?

438. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [44:06]

Jadi, ada T-5, Majelis.

439. KETUA: SUHARTOYO [44:07]

T?

440. SAKSI TERMOHON: YOHANIS BERPESTY [44:07]

T-5 dengan T-4 itu untuk hasil rekap kabupaten dan distrik.

441. KETUA: SUHARTOYO [44:13]

Ini Saksi-Saksi ini berangkatnya bareng enggak kemarin dari (...)

442. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [44:17]

Mungkin kecapean baru dari Asmat tiba kemarin siang.

443. KETUA: SUHARTOYO [44:17]

Oke. Pak Siprianus, apa yang mau dijelaskan, Pak?

444. SAKSI TERMOHON: SIPRIANUS IRAMAKAT [44:36]

Baik, Yang Mulia. Di sini yang saya mau jelaskan itu proses rekapitulasi.

445. KETUA: SUHARTOYO [44:43]

Ya. Di tingkat distrik ya, sama dengan yang diceritakan Saksi sebelumnya.

446. SAKSI TERMOHON: SIPRIANUS IRAMAKAT [44:48]

Betul.

447. KETUA: SUHARTOYO [44:49]

Apa yang ditambahkan, Pak?

448. SAKSI TERMOHON: SIPRIANUS IRAMAKAT [44:52]

Di tingkat distrik waktu kami pleno itu, dari saksi, dari saksi partai PDPI tidak mengajukan keberatan, itu sah saja.

449. KETUA: SUHARTOYO [45:01]

Tanda tangan di ... bukan sah saja, tanda tangan enggak dari saksi, semua saksi?

450. SAKSI TERMOHON: SIPRIANUS IRAMAKAT [45:06]

Ditandatangani.

451. KETUA: SUHARTOYO [45:07]

Termasuk Maksimus tanda tangan, tidak?

452. SAKSI TERMOHON: SIPRIANUS IRAMAKAT [45:09]

Maksi juga tanda tangan.

453. KETUA: SUHARTOYO [45:12]

Bapak lihat? Bapak lihat enggak tanda tangannya dia atau pas tanda tangan? Atau Form Hasilnya itu, Bapak lihat ada tanda tangannya dia?

454. SAKSI TERMOHON: SIPRIANUS IRAMAKAT [45:27]

Ada tanda tangan, Pak.

455. KETUA: SUHARTOYO [45:29]

Bapak lihat? Bapak lihat tanda tangan Maksimus itu? Ya, gitu dong kalau memang betul ada tanda tangan. Kok terus mandek, stop Bapak.

Bapak lihat tidak tanda tangannya itu atau Hasil D-nya yang ada tanda tangannya para saksi ada tidak? Bapak lihat enggak?

456. SAKSI TERMOHON: SIPRIANUS IRAMAKAT [45:53]

Lihat.

457. KETUA: SUHARTOYO [45:53]

Lihat?

458. SAKSI TERMOHON: SIPRIANUS IRAMAKAT [45:53]

Ya.

459. KETUA: SUHARTOYO [46:01]

Pak Aloysia Hahare, apa yang mau ditambahkan? Ibu ya, maaf ya. Silakan apa yang mau dijelaskan, Ibu.

460. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [46:22]

Saya mau jelaskan bahwa saya mau tambahkan pleno di tingkat distrik tidak ada keberatan.

461. KETUA: SUHARTOYO [46:29]

Ibu jadi Ketua KPU, ya?

462. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [46:31]

Ya, saya Ketua KPU Kabupaten Asmat.

463. KETUA: SUHARTOYO [46:32]

Ketua KPU Kabupaten?

464. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [46:34]

Ya.

465. KETUA: SUHARTOYO [46:35]

Kabupaten?

466. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [46:35]

Kabupaten Asmat.

467. KETUA: SUHARTOYO [46:36]

Asmat, ya. Di distrik tidak ada keberatan?

468. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [46:40]

Ya, pleno di tingkat distrik tidak ada keberatan.

469. KETUA: SUHARTOYO [46:43]

Ibu memang ikut pleno di distrik?

470. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [46:45]

Itu dibuktikan dengan video. Video (...)

471. KETUA: SUHARTOYO [46:49]

Video ... ada videonya, Pak?

472. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [46:50]

Ada videonya itu disampaikan pada saat (...)

473. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [46:52]

Ada video tambahan bukti kami, sudah masuk, Majelis.

474. KETUA: SUHARTOYO [46:56]

Yang Ibu tahu saja, yang video kan itu diketahui dari pihak lain atau didengar dari orang lain, itu kan bukan substansi kesaksian. Kesaksian itu Saksi itu yang dilihat sendiri, dialami sendiri, didengar sendiri, kalau gambar-gambar yang informasi dari pihak lain, gimana? Untuk di tingkat Asmat saja, Bu.

475. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [47:22]

Ya.

476. KETUA: SUHARTOYO [47:22]

Untuk kasus yang dipersoalkan oleh Pemohon itu, diangkat tidak ketika itu?

477. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [47:29]

Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten ada keberatan dari Saksi partai politik, termasuk saksi dari partai PDIP juga.

478. KETUA: SUHARTOYO [47:40]

Ya. Keberatannya apa, Bu?

479. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [47:41]

Namun keberatan yang diajukan itu terkait kasu ... terkait nilai di Distrik Akat, itu (...)

480. KETUA: SUHARTOYO [47:52]

Akat atau Sor Ep?

481. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [47:52]

Nilai di Distrik Akat.

482. KETUA: SUHARTOYO [47:53]

Bukan Sor Ep?

483. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [47:54]

Ya.

484. KETUA: SUHARTOYO [47:55]

Mengenai apa itu kalau Akat?

485. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [47:58]

Itu mengenai suara dari Hairullah yang dipindahkan ke Pak Bruno Amanko.

486. KETUA: SUHARTOYO [48:05]

Oh, bukan berkaitan dengan Partai PAN dengan (...)

487. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [48:08]

Bukan. Itu internal Partai PDIP.

488. KETUA: SUHARTOYO [48:14]

Internal gimana sih maksudnya, Ibu?

489. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [48:16]

Ya, antara Nomor 1 dan 2 terjadi perpindahan suara (...)

490. KETUA: SUHARTOYO [48:20]

Bukan. Ini yang ditambahkan untuk PAN, kata (...)

491. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [48:24]

Tidak, itu tidak diajukan dalam ... keberatan itu tidak disampaikan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten.

492. KETUA: SUHARTOYO [48:29]

Rekapitulasi tingkat kabupaten. Betul?

493. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [48:33]

Benar.

494. KETUA: SUHARTOYO [48:35]

Jadi, kapan Ibu tahu kalau ada persoalan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon tadi, kalau ada penambahan untuk suara PAN dari 373 ke 715, itu kapan Ibu mulai tahu?

495. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [48:50]

Itu saya mulai tahu setelah ... setelah penetapan ... setelah penetapan hasil ada massa datang demo di kantor KPU baru saya (...)

496. KETUA: SUHARTOYO [49:00]

Berapa (...)

497. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [49:01]

Mulai tahu ... ada D.Hasil yang angka 373.

498. KETUA: SUHARTOYO [49:04]

Berapa lama setelah penetapan hasil?

499. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [49:07]

Setelah penetapan rekapitulasi hasil pleno tingkat Distrik Sor Ep dengan Akat.

500. KETUA: SUHARTOYO [49:15]

Bukan setelah penetapan hasil di tingkat kabupaten?

501. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [49:20]

Bukan.

502. KETUA: SUHARTOYO [49:20]

Bukan?

503. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [49:20]

Penetapan hasilnya tanggal 9. Sedangkan saya mulai tahu kejadian itu tanggal ... dengan teman-teman komisioner, kami mulai tahu tanggal 8.

504. KETUA: SUHARTOYO [49:29]

Satu hari sebelumnya?

505. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [49:30]

Ya, satu hari sebelumnya.

506. KETUA: SUHARTOYO [49:32]

Nah, ketika di tingkat kabupaten, dipersoalkan tidak itu yang didemo itu?

507. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [49:35]

Itu (...)

508. KETUA: SUHARTOYO [49:40]

Dipersoalkan tidak soal perolehan 373 yang kemudian (...)

509. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [49:49]

Ya. Yang didemo itu, itu dipersoalkan oleh beberapa partai termasuk Partai PAN. Mereka protes angkanya yang dari 594, kenapa bisa berubah jadi 373.

510. KETUA: SUHARTOYO [50:01]

594 menjadi 373. Bukan dari 715, ya?

511. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [50:07]

Yang 715 itu, itu di, di, di ... itu jadi keberatan Partai PAN pada saat ... pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Partai PAN (...)

512. KETUA: SUHARTOYO [50:19]

Yang keberatan PAN atau PDIP?

513. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [50:20]

PAN.

514. KETUA: SUHARTOYO [50:21]

PAN.

515. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [50:21]

PAN yang menyampaikan keberatan itu dia punya suara 714.

516. KETUA: SUHARTOYO [50:27]

714.

517. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [50:27]

714 dibacakan di pleno distrik.

518. KETUA: SUHARTOYO [50:31]

Ya.

519. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [50:31]

Terus di rekapitulasi tingkat kabupaten di D.Hasil yang dibagikan (...)

520. KETUA: SUHARTOYO [50:36]

Itu berapa?

521. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [50:36]

Itu di sana angkanya 594. Ini yang menyebabkan PAN dan PKS (...)

522. KETUA: SUHARTOYO [50:42]

Keberatan?

523. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [50:42]

Ya, PAN (...)

524. KETUA: SUHARTOYO [50:43]

Dia maunya 714? Ya, PAN? PAN menurut PAN 714, ya?

525. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [50:48]

Ya. PAN ... PAN keberatan dan sampaikan harus kembalikan angkanya ke 715 ... 714.

526. KETUA: SUHARTOYO [50:57]

715? 714?

527. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [50:58]

714.

528. KETUA: SUHARTOYO [51:00]

Kalau yang PDIP ada keberatan, tidak?

529. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [51:03]

PDIP tidak ada keberatan lagi. Ada keberatan di awal itu terkait yang ... itu yang suara dari Nomor Urut 1 PDIP, pindah ke Nomor Urut 2.

530. KETUA: SUHARTOYO [51:15]

Bukan berkaitan dengan penggelembungan atau penambahan untuk PAN?

531. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [51:18]

Bukan. Bukan berkaitan terkait itu. Itu digugat oleh partai (...)

532. KETUA: SUHARTOYO [51:21]

Pak Sulhaji Sutran. Apa Pak, yang mau dijelaskan, Pak, Saksinya Pihak Terkait.

533. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [51:28]

Izin, Yang Mulia. Jadi ... apa ... suara PAN waktu pleno distrik, itu 714.

534. KETUA: SUHARTOYO [51:37]

Distrik, ya?

535. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [51:38]

Ya, pleno distrik itu 714.

536. KETUA: SUHARTOYO [51:40]

Bapak sebagai apa?

537. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [51:41]

Saksi di tingkat rekapitulasi tingkat kabupaten dan tingkat provinsi.

538. KETUA: SUHARTOYO [51:46]

Tingkat kabupaten ... yang 715 itu di tingkat apa tadi?

539. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [51:51]

714, Yang Mulia.

540. KETUA: SUHARTOYO [51:53]

714, di tingkat?

541. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [51:53]

714 di tingkat distrik.

542. KETUA: SUHARTOYO [51:55]

Ya.

543. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [51:56]

Pada saat pleno rekapitulasi berubah menjadi 614. 20 di Akat. 594 di Sor Ep.

544. KETUA: SUHARTOYO [52:06]

Jadi, di Sor Ep berapa?

545. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [52:08]

Di Sor Ep=594. Di Akat=20. Jadi, total 614.

546. KETUA: SUHARTOYO [52:13]

Di Akat berapa?

547. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [52:15]

20 Suara.

548. KETUA: SUHARTOYO [52:17]

20. Jadi, hanya?

549. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [52:20]

Total 614.

550. KETUA: SUHARTOYO [52:22]

614. Terus?

551. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [52:24]

Di pleno rekapitulasi itu resmi sah.

552. KETUA: SUHARTOYO [52:27]

614, itu?

553. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [52:29]

614, itu.

554. KETUA: SUHARTOYO [52:30]

Di tingkat apa ini?

555. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [52:31]

Pada saat kami mau ambil D.Hasil Perbaikan itu, tanggal 8 sekitar jam 03.00 sore itu, D.Hasil-nya berubah, dari 594 di Sor Ep itu berubah menjadi 373. Angka 373 ini (...)

556. KETUA: SUHARTOYO [52:48]

Dari 614. 614, kan?

557. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [52:52]

504 ... 594 Sor Ep, Pak.

558. KETUA: SUHARTOYO [52:54]

Ya, menjadi?

559. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [52:56]

373.

560. KETUA: SUHARTOYO [52:58]

373. Terus?

561. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [52:58]

373 ini angka yang muncul setelah pleno penetapan rekapitulasi.

562. KETUA: SUHARTOYO [53:04]

Tingkat apa?

563. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:05]

Setelah pleno penetapan rekapitulasi.

564. KETUA: SUHARTOYO [53:08]

Tingkat apa?

565. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:08]

Kabupaten.

566. KETUA: SUHARTOYO [53:09]

Kabupaten. Itu turun menjadi 373?

567. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:11]

Ya.

568. KETUA: SUHARTOYO [53:014]

Terus?

569. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:14]

Jadi, angka ini tidak pernah muncul di tingkat distrik.

570. KETUA: SUHARTOYO [53:16]

Distrik, tapi (...)

571. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:17]

Pleno rekapitulasi tidak muncul, tetapi setelah pleno rekapitulasi itu muncul.

572. KETUA: SUHARTOYO [53:21]

Oke. Dan 373 ini (...)

573. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:24]

D.Hasil (...)

574. KETUA: SUHARTOYO [53:26]

Jawab yang saya tanya, Pak. Jangan tabrakan gitu. Jadi, di tingkat kabupaten, kemudian untuk Sor Ep ini munculnya 373?

575. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:36]

Di pleno rekapitulasi 594. Terus berubah di D.Hasil menjadi 373, ya.

576. KETUA: SUHARTOYO [53:41]

Di tingkat kabupaten?

577. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:42]

Di tingkat kabupaten.

578. KETUA: SUHARTOYO [53:43]

Oke. Di D.Hasil, ya?

579. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:44]

Ya.

580. KETUA: SUHARTOYO [53:45]

Kemudian, kalau yang Akat?

581. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:47]

Akat 20.

582. KETUA: SUHARTOYO [53:48]

20, tetap. Kemudian, Saudara jadi Saksi Mandat di tingkat kabupaten, kan?

583. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:55]

Kabupaten dan Provinsi.

584. KETUA: SUHARTOYO [53:56]

Apa yang Saudara dilakukan?

585. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [53:58]

Di tingkat ... di pleno penetapan suara tingkat kabupaten, angka kami kembali 614. 20 di Akat. 594 di Sor Ep. Itu hasil penetapan suara.

586. KETUA: SUHARTOYO [54:13]

Penetapan di tingkat kabupaten kembali lagi normal, ya?

587. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [54:15]

Ya. Normal.

588. KETUA: SUHARTOYO [54:16]

594 dan?

589. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [54:17]

20.

590. KETUA: SUHARTOYO [54:18]

20. 64 ... 614? Oke.

591. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [54:21]

Ya. Di pleno perubahan di tanggal 18 Maret di provinsi (...)

592. KETUA: SUHARTOYO [54:25]

Saudara tanda tangan?

593. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [54:26]

Tanda tangan.

594. KETUA: SUHARTOYO [54:27]

Kalau dari PDIP ada keberatan ketika itu? Saudara lihat?

595. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [54:31]

Keberatan di PDIP itu internal PDIP sendiri.

596. KETUA: SUHARTOYO [54:34]

Bukan, yang berkaitan dengan penambahan PAN.

597. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULHAJI SUTRAN WIJAYA SAPUTRA MULLA [54:38]

Tidak ada. Itu ... waktu pleno rekapitulasi (...)

598. KETUA: SUHARTOYO [54:44]

Cukup, Pak.

Felisitas Masriat, apa yang mau dijelaskan, Ibu?

599. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT [54:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Waktu yang diberikan sama saya. Saya ... yang saya mengetahui di lapangan pada saat rekapitulasi distrik, tingkat Distrik Sor Ep dan Akat, pada saat itu saya sebagai saksi mandat dari Partai PAN, eh, dari Partai Nasdem. Dan pada saat itu yang saya mengetahui nilai angka yang PAN dapatkan, yaitu 714. Dan sampai di kabupaten pleno penetapan kabupaten, yaitu 594. Itu saja yang saya ketahui, Pak. Terima kasih.

600. KETUA: SUHARTOYO [55:36]

Untuk ... ini untuk distrik mana, Bu?

601. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT [55:39]

Distrik Akat, Sor Ep.

602. KETUA: SUHARTOYO [55:42]

Akat, Sor Ep?

603. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT [55:42]

Ya, Pak.

604. KETUA: SUHARTOYO [55:43]

Jadi, sampai ... Ibu sebagai apa sih?

605. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT [55:46]

Saya sebagai Saksi Mandat Partai Nasdem, Pak.

606. KETUA: SUHARTOYO [55:50]

Partai Nasdem.

607. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT [55:51]

Ya.

608. KETUA: SUHARTOYO [55:51]

Tapi tahu perolehan suara untuk PAN, itu?

609. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT [55:54]

Ya. Karena pada saat itu saya ada di tempat (...)

610. KETUA: SUHARTOYO [55:57]

Di tingkat apa Ibu sampai ikut tahu?

611. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT [55:58]

Distrik sampai kabupaten saya, Pak.

612. KETUA: SUHARTOYO [56:01]

Kabupaten?

613. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT [56:02]

Ya.

614. KETUA: SUHARTOYO [56:04]

Jadi, suara PAN itu terakhir untuk 2 distrik itu berapa? Di tingkat kabupaten.

615. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT [56:06]

Untuk 2 distrik waktu itu 614. Tapi pada saat itu yang diketuk palu sama ibu ketua, yaitu 594.

616. KETUA: SUHARTOYO [56:19]

Ya. Kemudian di, di ... sudah dikoreksi belum menjadi 614 lagi?

617. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT

Pada saat itu dikoreksi, tapi tidak ini, Pak tidak ditetapkan apa ... 614 itu, Pak. Yang ditetapkan itu 594.

618. KETUA: SUHARTOYO [56:40]

Untuk yang mana itu?

619. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT [56:42]

Untuk tingkat kabupaten, Pak. Sor Ep, Akat.

620. KETUA: SUHARTOYO [56:47]

Bukan, maksudnya Sor Ep. Akatnya yang 20 kata Pak Sulhaji terus kemana?

621. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FELISITAS MASRIAT [56:54]

Kalau itu saya tidak tahu. Nanti tanyakan saja sama ketua PPD, Pak, saya tidak tahu.

622. KETUA: SUHARTOYO [56:54]

Tidak tidak tahu. Ya sudah. Ini dua saksi saja juga berbeda gimana. Yang Mulia, ada pertanyaan?

623. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:09]

Baik. Terima kasih. Saya ke Saksi KPU Asmat, ya. Ibu, DPT di Dapil 1 itu ada berapa, Bu? Ini saya mau konfirmasi dulu karena dari Saudara Maksi jumlahnya 715, tadi dari PAN 714, Ibu juga kayaknya 714. DPT-nya, Bu, ingat, Bu untuk Dapil 1?

624. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [57:45]

DPT untuk Dapil 1, 4 distrik itu 21.440.

625. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:54]

21.400?

626. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [57:57]

40.

627. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:59]

40. Ini Dapil 1, Bu, ya?

628. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [58:00]

Ya.

629. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:02]

Saya hanya Dapil 1 karena Dapil 3 kelihatannya sudah selesai. Nah, kemudian di Distrik Akat dan Sor Ep, ya, yang benar Sor Ep dan Akat atau Akat dan Sor Ep ini?

630. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [58:18]

Yang benar Akat dan Sor Ep.

631. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:21]

Oke. Akat dan Sor Ep. Kalau di Akat itu ada berapa kampung?

632. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [58:31]

Di Akat ada 5 kampung.

633. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

5 kampung, ya. Itu ada berapa distrik ... ada berapa TPS? Sori.

634. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [58:40]

Ada 8 TPS.

635. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:42]

8 TPS. Kemudian, kalau di Sor Ep ada berapa kampung?

636. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [58:49]

Di Sor Ep ada 6 kampung.

637. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:51]

6 kampung. Berapa TPS?

638. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [58:53]

7.

639. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:55]

7 TPS. Ini Ibu punya data ada C.Hasil semua, ya di setiap TPS itu?
Ada data-datanya di semua TPS?

640. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [59:11]

Ya, ada.

641. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:55]

Di 11 kampung ini, baik di Akat maupun di Sor Ep, ada semua,
ya?

642. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [59:22]

Ya, ada.

643. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [59:25]

Ada, ya. Itu ada di Kuasa Termohon ada dilampirkan sebagai bukti?

644. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [59:37]

Untuk C.Hasil, kami belum masukkan, Majelis.

645. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [59:40]

Belum masukkan, ya. Bisa dimasukkan nanti untuk khusus yang di Dapil 1?

646. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [59:46]

Ya, kami cuma masukkan alat bukti D.Hasil saja.

647. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [59:50]

Oh, hanya D.Hasil saja, Bu, ya? Nah tadi informasi bahwa yang di distrik ini masalahnya anggota PPD distrik ini, Ibu Johana dengan teman-temannya ini enggak satu suara jadi susah, ya. Kalau dari Termohon kelihatannya siap, batiknya sama tiga-tiga ini. Jadi, hanya Ibu Johana yang tidak batik ini. Jadi, suaranya agak berbeda ini. Nah, nanti ini tolong dilampirkan, ya karena saya lihat persoalannya hanya di Dapil 1. Kemudian, tidak diberikan Form Keberatan itu di tingkat kabupaten betul, ya, di Asmat? Itu dikasih Form Keberatan tidak, Bu? Di tingkat kabupaten?

648. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:00:42]

Di tingkat kabupaten kami akomodir untuk dikasih Form Keberatan semua.

649. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:47]

Semua dikasih?

650. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:00:49]

Ya.

651. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:57]

Ada yang ajukan keberatan tidak?

652. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:00:55]

Pada saat penetapan akhir tanggal 9, ada Partai PKB, PDIP yang mengajukan keberatan, kami akomodir.

653. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:00]

Akomodir?

654. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:01:03]

Ya.

655. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:05]

Jadi, sudah selesai, Bu? Atau dilanjutkan ke provinsi?

656. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:01:06]

Dilanjutkan ke provinsi.

657. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:08]

Lalu, di provinsi diminta dilanjutkan ke MK? Tadi keterangan dari Pak, siapa? Pak Heri ya, Pak Heribertus. Itu diselesaikan di MK. Nanti tolong itu, Bu, ya, disiapkan C. Hasilnya untuk 11 kampung, ya, baik di Distrik Akat maupun Sor Ep. Terima kasih, Yang Mulia.

658. KETUA: SUHARTOYO [01:01:44]

Baik. Yang Mulia.

659. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:46]

Baik. Saya lanjutkan, ya, pertanyaan Para Yang Mulia. Saya mau tanya dulu ke Pak Ludy Sirec. Pak Ludy Sirec, ya. Tadi menyatakan, ya karena sebelumnya Pak Maksimus menyampaikan bahwa ada kenaikan suara PAN=715 yang seharusnya=373 yang merugikan PDIP, kan gitu, ya. Nah, sementara Pak Ludy Sirec, itu menyatakan bahwa suara PAN sudah benar=373. Berarti benar ini Pak Ludy Sirec?

660. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [01:02:24]

Ya. Yang Mulia, benar.

661. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:26]

Jadi, sudah apa ... suara PAN yang tadi dikatakan itu naik sudah kembali ke 373, ya?

662. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [01:02:35]

Ya.

663. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:35]

Oke.

664. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [01:02:35]

373 itu sudah benar.

665. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:40]

Sudah benar, oke. Berarti tidak ada lagi kenaikan, ya, kalau sudah seperti itu. Kemudian baik, selanjutnya. Terima kasih, Pak Ludy Sirec.

Kemudian, Ibu Aloysia Hahare, ya Ketua KPU Kabupaten Asmat. Kalau saya tadi enggak salah dengar, Ibu kan sudah mengetahui tanggal 8 itu ada, ya, protes kaitannya tadi, Yang Mulia Pak Ketua tadi sudah menanyakan soal ini, cuma saya agak ... mau memastikan saja. Ibu kan tanggal 8 sudah mengetahui, tanggal 9 kan pleno ya, Bu, ya? Rekap di Kabupaten, ya? Nah, tadi ditanyakan, apakah ada pengaruh dari apa yang Ibu ketahui itu pada saat direkap tanggal 9 itu? Pengaruh dari apa ... protes-protes yang Ibu sudah ketahui itu? Rekap. Apakah itu berjalan seakan-akan tidak diketahui gitu? Bagaimana Ibu Aloysia ... Aloysia ... Aloysia?

666. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:04:00]

Angka ... izin, Yang Mulia, angka 373 ini itu ... jadi setelah tanggal 7 itu, tanggal 7 itu rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Distrik Akat dan Sor Ep itu selesai jam 05.00 WIB pagi.

667. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:15]

Tanggal 7?

668. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:04:16]

Ya.

669. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:16]

Di tingkat distrik?

670. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:04:18]

Distrik Akat dan Sor Ep di tingkat kabupaten.

671. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:21]

Oh, itu (...)

672. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:04:21]

Rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Distrik Akat dan (...)

673. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:24]

Angka 373 sudah seperti itu di tingkat distrik?

674. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:04:29]

Tidak. Itu kami (...)

675. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:29]

Oh, belum?

676. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:04:30]

Kami ditetapkan dengan ... ditetapkan dengan angka 5.964.

677. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:36]

Di distrik?

678. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:04:37]

Ya, di kabupaten.

679. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:40]

Oh, di kabupaten?

680. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:04:41]

Rekapitulasi tingkat kabupatennya ditetapkan dengan angka 5.964.

681. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:44]

Ya.

682. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:04:44]

Terus ada D.Hasil yang diparaf, koordinasi oleh Bawaslu, para saksi partai politik dengan KPU. Terus dibacakan oleh D.Hasil perbaikan ini, dibacakan oleh Ketua PPD, hasilnya dibacakan, setelah itu kami penetapan.

683. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:05:00]

Kapan? Saya mau tanya, kapan angka 373 itu ditetapkan?

684. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:05:06]

Ya, saya cerita dulu, Pak. Jadi, setelah penetapan ... setelah penetapan hasil, kami sampaikan kepada PPD supaya angka yang sudah dibacakan, terus sudah disahkan nanti Pak Ketua dan teman-teman PPD Akat Sor Ep, nanti salin ke D.Hasil yang, Form D.Hasil yang baru karena itu ada tanda tangan dan paraf koordinasinya kami. Jadi, disalin ke D.Hasil yang baru terus dibagikan ke ... diminta tanda tangan para saksi, terus dibagikan ke saksi karena hasilnya sudah ada.

Tapi pada saat tanggal 8 pagi mereka bawa ke Aula KPU, kami kira mungkin hasilnya sudah disalin. Ternyata tidak disalin, nanti malam jam 08.00 malam, kami kaget yang hasil ... D.Hasil yang kami suruh disalin itu angkanya diubah. Angkanya diubah termasuk angka PAN yang ditetapkan di ruang rekapitulasi 594 itu, itu diubah ke 373. Di sanalah muncul angka 373 dengan mulai ada C.Hasil dan lain-lain. (...)

Jadi itu di luar, di luar ini, di luar pleno, pleno rekapitulasi tingkat distrik.

685. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:21]

Oke. Baik.

686. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:06:22]

Demikian, Yang Mulia.

687. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:23]

Baik. Terima kasih, Bu Aloysia.

688. KETUA: SUHARTOYO [01:06:26]

Cukup. Sebelum nanti Para Pihak ... dari Bawaslu, Pak, ada yang mau disampaikan? Untuk persoalan ini, satu distrik sebenarnya distrik Sor Ep itu.

689. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:06:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan kepada kami. Izin Yang Mulia, kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan mekanisme dan kronologis rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.

690. KETUA: SUHARTOYO [01:06:58]

Yang berkaitan dengan Sor Ep saja, Pak.

691. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:06:59]

Ya, baik, Yang Mulia. Jadi, Yang Mulia untuk Distrik Sor Ep, itu dilakukan rapat pleno pada tanggal 6, tengah malam. Itu dilakukan rapat pleno sampai dengan tanggal 7 pagi, jam 07.00 WIB pagi.

692. KETUA: SUHARTOYO [01:07:13]

Ya.

693. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:14]

Ya, itu kami ada di sana. Kemudian, ketika PPD membacakan hasil rekapitulasi, itu ketika sedang dibacakan ada sanggahan dan keberatan dari para saksi partai politik. Kemudian, ketika ada sanggahan-sanggahan oleh saksi partai politik, maka oleh KPU dan Bawaslu disarankan untuk dilakukan penyandingan data dan penyandingan data

itu dilakukan ada beberapa kali, Yang Mulia. Seingat saya itu ada tiga kali. Karena memang ada beberapa kali perbaikan dilakukan, tetapi perbaikan itu tidak dilakukan dalam ruang rapat pleno. Dilakukan di Gedung KPU Kabupaten Asmat. Itu yang pertama, terkait dengan penyandingan data perbaikan.

694. KETUA: SUHARTOYO [01:07:55]

Ya, tapi akhirnya secara substansi ada perbaikan tidak?

695. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:58]

Ya. Baik, Yang Mulia. Terkait perbaikan, ketika dilakukan perbaikan pada saat itu, dilakukan perbaikan dan ditandatangani oleh para saksi. Dan itu sudah dilakukan paraf koordinasi oleh KPU dan Bawaslu dan juga para saksi pada saat itu.

696. KETUA: SUHARTOYO [01:08:12]

Sudah selesai?

697. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:13]

Selesai. Kemudian (...)

698. KETUA: SUHARTOYO [01:08:13]

Apa lagi?

699. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:15]

Pada saat perbaikan yang berikut lagi, itu ada sanggahan lagi karena hasil perbaikan yang dilakukan oleh teman-teman PPD ada kesalahan dari sisi angka tadi.

700. KETUA: SUHARTOYO [01:08:23]

Ya.

701. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:26]

Oleh sebab itu, dilakukan perbaikan lagi yang kedua. Setelah dilakukan perbaikan yang kedua, itu berlangsung sampai jam 05.00 lewat, sampai jam 06.00. Kemudian, ada sanggahan lagi di situ, Yang

Mulia, oleh peserta pemilu. Dalam hal ini saksi partai politik dari PDIP dan ada saksi-saksi partai lain (...)

702. KETUA: SUHARTOYO [01:08:37]

Ya.

703. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:40]

Ada sanggahan. Kemudian, sanggahan itu oleh KPU bahwa sanggahan ini karena sudah kami tetapkan, nanti disampaikan dalam ... ke MK karena memang untuk penetapan kabupaten/kota itu ranahnya ke MK.

704. KETUA: SUHARTOYO [01:08:55]

Apa, Pak? Yang masih di ... di apa ... diberikan kesempatan untuk di MK itu yang bagian substansi apa?

705. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:09:04]

Yang terkait dengan tadi, angka-angka yang tadi itu Pimpinan, Yang Mulia.

706. KETUA: SUHARTOYO [01:09:08]

Ini yang ... yang untuk di ... supaya disalurkan di MK itu keberatan yang dari partai apa?

707. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:09:13]

Dari partai politik setelah dilakukan rapat pleno tadi.

708. KETUA: SUHARTOYO [01:09:17]

Ya, partai politik apa?

709. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:09:19]

Dari Partai Politik PDIP dan PAN.

710. KETUA: SUHARTOYO [01:09:22]

Oke. Sudah itu saja. Ada pertanyaan untuk 1, 2 pertanyaan dari Pemohon?

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:09:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami ada pertanyaan untuk Saksi kami dan apakah boleh kami menyeberang kepada Ketua KPU?

712. KETUA: SUHARTOYO [01:09:42]

Boleh, tapi 1, 2 pertanyaan saja, silakan.

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:09:45]

Baik, Yang Mulia. Kami mulai dengan Ibu Aloysiana, Ibu Ketua KPUD. Eh ... Ibu, Ibu, untuk pleno rekapitulasi kabupaten untuk pembahasan Distrik Sor Ep itu di tanggal berapa ya, Bu?

714. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:10:12]

Untuk pleno rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Distrik Sor Ep itu dimulai tanggal 6.

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:10:19]

Dimulai tanggal 6. Ibu hadir, ya?

716. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:10:22]

Saya yang pimpin sidang.

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:10:24]

Ibu pimpin sidang. Apakah ada Saksi kami di Ketua PPD ini, Pak Ludi bersama Ibu?

718. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:10:29]

Ketua PPD yang baca, Ibu Johana yang bacakan untuk Distrik Sor Ep.

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:10:34]

Sepengalaman Ibu, apakah pada saat pembahasan Distrik Sor Ep ada keberatan?

720. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:10:41]

Ada keberatan.

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:10:42]

Ada keberatan disampaikan oleh saksi PDI Perjuangan?

722. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:10:41]

Ada disampaikan oleh saksi PDI Perjuangan.

723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:10:47]

Kemudian, apa yang Ibu putuskan pada saat ada keberatan itu?

724. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:10:51]

Pada saat keberatan itu kami sama-sama dengan para saksi kami ke mejanya Bawaslu. Di sana kami sanding datanya, setelah kami sanding datanya, terus ada temuan, terus kami sarankan untuk perbaikan, PPD memperbaiki data.

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:11:14]

Apakah Ibu me-skorsing pleno kabupaten saat itu untuk Distrik Sor Ep? Agar PPD yang bersangkutan kemudian pindah ke aula lain untuk melakukan pencocokkan dan perbaikan data?

726. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:11:30]

Tidak. Saya tidak suruh untuk pindah ke aula lain untuk mencocokkan data yang tanggal pada saat yang terakhir, yang penetapan terakhir itu saja yang saya tidak suruh pindah.

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:11:48]

Baik, cukup. Ibu, pembahasan untuk Distrik Sor Ep setelah tadi Ibu sampaikan ada keberatan, kemudian dilakukan pencocokkan, sepanjang proses Ibu ada? Atau Ibu melanjutkan dengan pembahasan untuk penetapan, untuk rekapitulasi distrik-distrik yang lain.

728. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:12:02]

Yang sepanjang malam dari jam 09.00 sampai pagi jam 05.00 itu saya ada. Sampai dengan (...)

729. KETUA: SUHARTOYO [01:12:04]

Sudah, ke saksi lain kalau Ibu masih ada.

730. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:12:13]

Izin, Yang Mulia karena ada (...)

731. KETUA: SUHARTOYO [01:12:15]

Ya, sudah dijawab kan. Itu sebenarnya kalau mau dirangkai sama dengan apa yang disampaikan Bawaslu tadi. Perbaikan itu adalah yang sampai dua tahap, tapi mesti saksi PDIP keberatan. Sampai disarankan ke MK. Kalau Ibu mau lacak juga akhirnya ke sana titiknya.

732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:12:29]

Ya.

733. KETUA: SUHARTOYO [01:12:30]

Sudah cukup. Kalau Ibu mau tanya saksi lain.

734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:12:36]

Ya. Izin, Yang Mulia karena berdasarkan keterangan dari saksi-saksi kami, ada pleno perbaikan yang lahir, Yang Mulia.

735. KETUA: SUHARTOYO [01:12:37]

Ya.

736. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:12:38]

Yang kemudian diserahkan kepada Ibu Ketua KPUD dan tidak pernah dibagikan karena ada keributan.

737. KETUA: SUHARTOYO [01:12:51]

Sebenarnya kan inti persoalannya adalah persoalan ini kan tidak selesai seperti yang disampaikan Bawaslu tadi kan.

738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:12:52]

Baik. Yang Mulia.

739. KETUA: SUHARTOYO [01:12:52]

Oleh karena itu yang tersisa, perbaikan yang sudah dilakukan dua kali pun masih ada yang keberatan. Itulah yang kemudian diberi ruang silakan nanti di MK. Kalau Ibu mau kejar, Bu Ketua KPU pun juga titiknya sebenarnya muaranya ada di sana.

740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:13:06]

Baik, Yang Mulia.

741. KETUA: SUHARTOYO [01:13:06]

Ibu, silakan kalau masih mau tanya, tapi waktunya.

742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:13:20]

Baik, Yang Mulia. Cukup. Yang Mulia, kami hanya menambahkan satu jika memang waktunya cukup.

743. KETUA: SUHARTOYO [01:13:16]

Silakan.

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:13:16]

Karena tadi Ibu mengatakan tidak ada keberatan. Kami telah menghadirkan pada Bukti P-8, Yang Mulia, keberatan kami terhadap Dapil 1 dan Dapil 3 pada rekapitulasi penetapan di tingkat kabupaten.

745. KETUA: SUHARTOYO [01:13:35]

Baik. Kemudian, yang diingatkan oleh Yang Mulia tadi Pak Daniel untuk Termohon. Coba MK diberi C itu, Pak. Itu penting itu, Pak. Masih ada pertanyaan Ibu, cukup?

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:13:53]

Cukup. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

747. KETUA: SUHARTOYO [01:13:55]

Cukup. Baik. Dari Termohon ada pertanyaan? 1, 2 pertanyaan, Pak.

748. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:14:05]

Izin, Yang Mulia, saya akan bertanya kepada Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dua-duanya adalah PPD, satu sebagai Ketua dan satu Anggota.

Pertanyaan saya yang pertama. Ketika Saudara hadir dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten, berapa perolehan suara PAN yang diajukan keberatan di sini ini yang dibacakan pada saat rekapitulasi di kabupaten?

749. KETUA: SUHARTOYO [01:14:27]

Ke saksi siapa dulu?

750. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:14:30]

Johana karena tadi katanya yang membacakan Johana.

751. KETUA: SUHARTOYO [01:14:33]

Bu Johana, berapa hasil suara PAN yang dibacakan ketika rekapitulasi tingkat kabupaten?

752. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [01:15:05]

Ya. Hasil suara PAN yang kami bacakan pada tingkat pleno kabupaten itu adalah 594.

753. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:14:44]

Baik. Terima kasih. Saya ke saksi PPD yang sama-sama. Saudara PPD, yang di ... Saksi yang diajukan Termohon.

754. KETUA: SUHARTOYO [01:14:56]

Bapak yang mengajukan kok malah tanya.

755. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:14:55]

Untuk konfirmasi saja, Pak karena kan dua-duanya sama.

756. KETUA: SUHARTOYO [01:14:57]

Ya, Silakan. Bukan, maksudnya tanya orangnya, bukan substansinya.

757. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:15:04]

Suara PAN di distrik yang disebutkan tadi pada waktu rekap kabupaten berapa yang dibacakan?

758. SAKSI TERMOHON: YONATHAN EWEMAKAT [01:15:07]

594.

759. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:15:10]

Sama, ya?

760. KETUA: SUHARTOYO [01:15:17]

Bapak lho yang bilang sama.

761. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOHANA RESUBUN [01:15:23]

Bapak, saya boleh lanjut, Pak?

762. KETUA: SUHARTOYO [01:15:23]

Sudah, Ibu sudah. Hanya ditanya itu.

763. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:15:26]

Kemudian, Ketua KPU Asmat. Formulir D.Hasil Kabupaten yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten hasil rekapitulasi, pada akhirnya suara PAN berapa?

764. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:15:40]

Pada akhirnya suara PAN 594 karena PAN mengalah.

765. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:15:44]

Sudah cukup, itu saja. Ketua Bawaslu, Formulir D.Hasil Kabupaten.

766. KETUA: SUHARTOYO [01:15:49]

Ke saya kan ... ke kami, Pak. Kan, Bawaslu bukan saksi. Bapak mau tanya ke saya, nanti kami teruskan.

767. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:15:55]

Saya mohon ditanyakan untuk konfirmasi saja. D.Hasil Kabupaten yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Asmat terakhir itu berapa?

768. KETUA: SUHARTOYO [01:16:02]

Bapak tahu, Pak? Dari Bawaslu? Kabupaten Asmat, hasil akhir untuk pantau? Kok saling tunjuk begitu?

769. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:16:16]

Ya. Izin, Yang Mulia. Terkait dengan daftar perubahan tadi, untuk data hasil akhir, itu kami tidak mendapatkan salinan yang D.Hasil Perubahan.

770. KETUA: SUHARTOYO [01:16:27]

Jadi (...)

771. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:16:27]

Tapi kalau hasil penetapan itu masih tetap di 594, tadi.

772. KETUA: SUHARTOYO [01:16:32]

594?

773. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:16:32]

Ya. Tetapi yang D.Hasil Perubahan, itu yang belum kami dapatkan waktu itu.

774. KETUA: SUHARTOYO [01:16:36]

Yang itu kemudian masih berbuntut, masih ada keberatan itu?

775. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:16:41]

Ya. Benar, Yang Mulia. Karena menurut kami, D.Hasil itu sampai sekarang kami tidak dapat, gitu.

776. KETUA: SUHARTOYO [01:16:46]

Cukup ya, Pak?

777. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:16:46]

Ya.

778. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:16:47]

Terima kasih, itu saja.

779. KETUA: SUHARTOYO [01:16:48]

Ya. Dari Pihak Terkait ada pertanyaan? Satu pertanyaan, dua pertanyaan boleh?

780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:16:53]

Baik, Yang Mulia. Kami akan bertanya kepada Saksi dari Pemohon.

781. KETUA: SUHARTOYO [01:16:59]

Ya.

782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:16:59]

Kepada Ketua PPD Akat, Sor Ep. Tadi menyampaikan bahwa penggelembungan suara untuk Partai PAN itu sebanyak 200. Benar, Pak? Benar?

783. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [01:17:14]

Ya, benar.

784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:17:15]

Oke, sebanyak 200. Terus, Bapak menyampaikan seharusnya (...)

785. KETUA: SUHARTOYO [01:17:20]

200 dari mana itu pertanyaan Saudara itu?

786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:17:23]

Yang Mulia?

787. KETUA: SUHARTOYO [01:17:24]

Kalau di-cross ke Saksi (...)

788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:17:24]

Ya.

789. KETUA: SUHARTOYO [01:17:24]

Benar, benar saja.

790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:17:28]

Oke, siap.

791. KETUA: SUHARTOYO [01:17:28]

Tapi angka 200 Anda itu dari mana?

792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:17:30]

Tadi penjelasan dari Saksi menyatakan penggelembungannya 200 suara, Yang Mulia.

793. KETUA: SUHARTOYO [01:17:37]

Bukan dari 373 ke 715?

794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:17:40]

Ya, mereka menyampaikan bahwa penggelembungannya 200 suara.

795. KETUA: SUHARTOYO [01:17:44]

200.

796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:17:44]

Seharusnya perolehan suaranya 373.

797. KETUA: SUHARTOYO [01:17:48]

Ya.

798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:17:48]

Kalau misalkan dijumlahkan, Yang Mulia, seharusnya itu 573, bukan 594. Jadi, 21 suara lagi itu ke mana?

799. KETUA: SUHARTOYO [01:17:58]

Ada ... ditanya ke siapa ini?

800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:18:00]

Ke Ketua PPD, Yang Mulia.

801. KETUA: SUHARTOYO [01:18:02]

Oke. Ketua PPD itu, Saksi Pemohon. Tahu? Mestinya 21 malahan, kata Pihak Terkait yang masih selisih.

802. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LUDY SIREC [01:18:17]

Izin, Yang Mulia. Peng ... penggelembungan suara itu 221.

803. KETUA: SUHARTOYO [01:18:28]

Cukup, ya?

804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:18:31]

Selanjutnya boleh ke Ketua KPU Asmat, Yang Mulia.

805. KETUA: SUHARTOYO [01:18:35]

Satu pertanyaan, silakan apa?

806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:18:37]

Baik. Ibu, izin.

807. KETUA: SUHARTOYO [01:18:40]

Bu Yohanis, Yohan Aloysia, ya? Ketua KPU kan? Aloysia.

808. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:18:48]

Benar, Yang Mulia.

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:18:50]

Ibu, izin saya mau menyampaikan terkait D.Hasil yang menyatakan suara PAN 373 itu diperoleh dari mana, Ibu? Apakah itu hasil dari pleno? Terima kasih.

810. KETUA: SUHARTOYO [01:19:06]

Yang 373 itu, Ibu. Padahal tadi sudah ditanya Ketua KPU.

811. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:19:12]

D.Hasil 373 yang (...)

812. KETUA: SUHARTOYO [01:19:16]

Dari mana itu kata Pihak Terkait?

813. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:19:19]

Itu D.Hasil yang (...)

814. KETUA: SUHARTOYO [01:19:21]

Dari D.Hasil, Pak?

815. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:19:22]

D.Hasil yang disuruh ... yang dibuat oleh Ketua PPD. Jadi, saya pikir jawabannya itu harus PPD yang jawab.

816. KETUA: SUHARTOYO [01:19:32]

Ibu yang ditanya.

817. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:19:32]

Ya. Karena saya tidak tahu itu PPD yang buat.

818. KETUA: SUHARTOYO [01:19:34]

Jawab saja tidak tahu, Bu.

819. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:19:36]

373 itu.

820. KETUA: SUHARTOYO [01:19:37]

Ya. Cukup ya, Pak?

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:19:38]

Satu lagi, Yang Mulia.

822. KETUA: SUHARTOYO [01:19:40]

Ke siapa?

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:19:40]

Masih kepada Ibu Ketua KPU.

824. KETUA: SUHARTOYO [01:19:44]

Ya. Silakan, terakhir.

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:19:44]

Terakhir, Ibu. Apakah benar setelah Ketua PPD menyerahkan D.Hasil tersebut, Ibu sempat mencari beliau karena katanya menghilang?

826. KETUA: SUHARTOYO [01:19:59]

Tahu, Ibu itu? Ya, saya mulai tahu D.Hasil 373 itu saat pendemo datang di kantor KPU, datang ribut saya dengan Anggota PPD Distrik Akat, Sor Ep, saya dengan teman-teman. Jadi pada saat itu setelah mereka datang ribut, saya suruh kumpul terus suruh panggil Ketua PPD dan operator. Mereka hilang dari Asmat itu mulai dari saat itu sampai dengan hari ini.

827. KETUA: SUHARTOYO [01:20:22]

Ya, sudah. Jadi, tahunya ketika ada demo itu, Pak.

828. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:20:24]

Ya.

829. KETUA: SUHARTOYO [01:20:24]

Cukup, ya?

830. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [01:20:25]

Sampai dengan hari ini ada ketemu.

831. KETUA: SUHARTOYO [01:20:27]

Baik, cukup Bu.

Untuk Perkara 271, ini Termohon menambahkan Bukti T-07, ya? Tapi tolong nanti di ... kapan mau diserahkan, Pak yang C tadi? Hari ini, bisa?

832. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:20:43]

Kami usahakan, Majelis.

833. KETUA: SUHARTOYO [01:20:44]

Ya?

834. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:20:44]

Ya.

835. KETUA: SUHARTOYO [01:20:44]

Itu penting nanti kalau ... kalau bisa hari ini diserahkan supaya kami juga bisa langsung baca bukti itu. Jadi, T-07 kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Dan untuk Perkara 271, terima kasih, sudah cukup.

836. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [01:21:00]

Izin, izin, Yang Mulia. Dari Bawaslu, nanti akan menyerahkan alat bukti tambahan.

837. KETUA: SUHARTOYO [01:21:05]

Ya untuk perkara ini, Pak, 271. Terima kasih kami ucapkan.

838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:21:10]

Yang Mulia, izin dari Pemohon, kami juga menyerahkan alat bukti tambahan.

839. KETUA: SUHARTOYO [01:21:15]

Silakan, Ibu.

840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:21:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

841. KETUA: SUHARTOYO [01:21:17]

Baik. Terima kasih kami ucapkan untuk Perkara 271. Baik Para Pihak, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, termasuk Bawaslu dan Para Saksi, ya. Sudah jauh-jauh datang dari Asmat ke Jakarta. Sudah boleh meninggalkan ruangan ini dan kepada Pihak-Pihak untuk menunggu bagaimana nanti keputusan Makamah atau putusan Makamah Konstitusi yang nanti akan ditentukan kemudian dan akan diberitahukan melalui Kepaniteraan.

Kemudian, untuk perkara selanjutnya kami panggil Saksi dari Pemohon Mustafa M. Radja.

842. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETYANTO [01:22:01]

Pemohon ... Pemohon, Yang Mulia. Izin, maaf 264.

843. KETUA: SUHARTOYO [01:22:05]

Apa, Pak?

844. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETYANTO [01:22:06]

Terkait dengan Saksi yang kami ajukan, Bapak Mustafa M. Radja ini tidak jadi hadir, tidak jadi datang. Dan untuk KTP, Kartu Identitas, itu di situ ada yang harus kita tarik juga. Pak Muhammad Topan Syah. Itu kan seharusnya jadinya ini kita Pak Emanuel D. Basagai.

845. KETUA: SUHARTOYO [01:22:29]

Ya. Gimana, Pak?

846. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETYANTO [01:22:31]

KTP-nya, KTP-nya itu salah itu, Yang Mulia.

847. KETUA: SUHARTOYO [01:22:34]

Bukan, sekarang Saksi yang hadir, siapa?

848. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETYANTO [01:22:36]

Sekarang, yang hadir (...)

849. KETUA: SUHARTOYO [01:22:38]

Yang sesuai dengan yang sudah diberikan sebelumnya, ya, Pak, ya?

850. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETYANTO [01:22:41]

He eh. Emanuel B.D. Basagai ... D. Basagai.

851. KETUA: SUHARTOYO [01:22:43]

Emanuel, maju, Pak, Emanuel. Maximus, ada? Mohamad Nur Aan La, ada? Jadi, Bapak hanya empat, ya?

852. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETYANTO [01:22:57]

Ya, empat, Yang Mulia.

853. KETUA: SUHARTOYO [01:22:58]

Lodifikus Mahatam, silakan maju.

Kemudian, dari Termohon Saksinya, Helda Richarda, maju. Yati Enoch, Hence Oku, Abraham Jemleman ... Jamlean, Frits Gandaimu, maju semua.

Dari Pihak Terkait, Albertus Muyak, Rudolof Ronde. Dari Pihak Terkait PAN tadi, ya? Kemudian dari Pihak Terkait PKB tidak mengajukan Saksi. Nasdem juga, tidak. Bawaslu, tidak. Silakan, maju tadi. Oh, ya. Jecahlin Madarch Lufkey, susah sekali namanya untuk anu ya, Pihak Terkait Nasdem, ya.

Saya absen kembali, ya, supaya enggak salah. Helda yang mana? Helda masih aktif, ya? Yati Enoch, oh, ini Termohon, ya sori, sori. Sebentar. Emanuel, oke, Katolik, ya. Maximus, Katolik juga. Mohamad Nur Aan? Muslim. Lodifikus? Oke, Katolik juga.

Kemudian, Helda tidak disumpah karena masih aktif, ya. Yati Enoch? Masih aktif juga. Hence? Bapak ... su ... masih aktif, tidak lagi, tidak? Tidak. Oke. Abraham, masih aktif. Frits Gandaimu, sudah, ini ... anu ... ya, pemilih, ya, Pak, ya, bukan anu, ya.

Kemudian dari PAN, Albertus Muyak, bukan dari penyelenggara ya, Pak? Rudolof? Jadi Pak Muyak tadi juga Katolik, Pak Ronde, Katolik.

Kemudian dari Nasdem, Jechlin Madarch Lufkey, Katolik ... Kristen, ya? Baik untuk yang Kristen atau Katolik dipandu Yang Mulia Bapak Daniel. Untuk yang Islam nanti saya pandu. Untuk yang Katolik dan Kristen dulu, silakan.

854. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:26:06]

Baik. Untuk yang Kristen, dua jari, ya. Kalau yang Katolik tiga. Gini Pak, Bapak Kristen apa Katolik? Yang Bapak yang nomor dua, nih? Kristen, oke. Dua, ya. Baik. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

Baik. Terima kasih. Saya kembalikan Yang Mulia.

855. SELURUH SAKSI BERAGAMA KRISTEN DAN KATOLIK BERSUMPAH [01:26:25]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

856. KETUA: SUHARTOYO [01:26:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Muslim, saya bantu lafazkan. Pak Mohamad Nur.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

857. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [01:27:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

858. KETUA: SUHARTOYO [01:27:09]

Baik. Baik, semua kembali ke tempat semula, silakan. Pak Emanuel, ya, Emanuel Basagai, ini Bapak sebagai apa? Ketika ada penyelenggaraan pemilihan umum?

859. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:27:40]

Sebagai saksi.

860. KETUA: SUHARTOYO [01:27:42]

Saksi apa?

861. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:27:43]

Saksi partai.

862. KETUA: SUHARTOYO [01:27:44]

Partai, partai apa?

863. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:27:46]

Yang Mulia. Saya saat itu sebagai saksi dari Partai PAN.

864. KETUA: SUHARTOYO [01:27:49]

PAN, saat itu sekarang tidak lagi? Masih? Waktu itu Saksi di tingkat apa, Pak?

865. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:27:57]

Tingkat KPU, pleno tingkat KPU.

866. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Kabupaten, ya?

867. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:28:01]

Kabupaten

868. KETUA: SUHARTOYO [01:28:01]

Kabupaten mana?

869. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:28:02]

Kabupaten Mappi.

870. KETUA: SUHARTOYO [01:28:02]

Mappi. Apa yang mau dijelaskan?

871. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:28:07]

Yang Mulia, yang saya hormati, yang saya mau jelaskan di sini mengenai proses pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Mappi.

872. KETUA: SUHARTOYO [01:28:16]

Ya.

873. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:28:17]

Di situ ada hal yang terganjal. Di saat itu, Yang Mulia, sebelum pleno ada rekomendasi Bawaslu ... rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi.

874. KETUA: SUHARTOYO [01:28:35]

Ya.

875. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:28:36]

Terkait penghitungan surat suara ulang.

876. KETUA: SUHARTOYO [01:28:41]

Untuk di mana?

877. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:28:42]

Untuk di 4 distrik.

878. KETUA: SUHARTOYO [01:28:45]

4 distrik. Apa saja?

879. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:28:47]

Distrik Obaa, Minyamur, Haju, dan Passue.

880. KETUA: SUHARTOYO [01:28:56]

4 distrik, ya?

881. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:28:57]

Ya.

882. KETUA: SUHARTOYO

Terus bagaimana dengan rekomendasi itu?

883. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:29:07]

Rekomendasi ini, ini keluar tertanggal 1 Maret 2024. Tetapi itu tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mappi. Jadi, di saat pleno tingkat KPU Kabupaten Mappi, ketua KPU membacakan surat pembatalan rekomendasi tersebut. Padahal yang sebenarnya, Yang Mulia, harusnya ketika ada rekomendasi itu, itu seharusnya keluar sebelum pleno tingkat KPU.

884. KETUA: SUHARTOYO [01:29:40]

Oke. Itu yang minta supaya itu dihapus siapa?

885. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:29:46]

Ya, Yang Mulia.

886. KETUA: SUHARTOYO [01:29:47]

Rekomendasi tadi minta supaya di apa? Dicabut atau di apa?

887. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:29:50]

Minta untuk PSU (Penghitungan Surat Suara Ulang).

888. KETUA: SUHARTOYO [01:29:53]

Bukan. Ketika di tingkat pleno dibahas agar rekomendasi itu diapakan?

889. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:29:58]

Ditindaklanjuti.

890. KETUA: SUHARTOYO [01:29:59]

Ditindaklanjuti. Sebelum ada perhitungan di tingkat pleno kabupaten?

891. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:30:06]

Benar, Yang Mulia.

892. KETUA: SUHARTOYO [01:30:07]

Terus apa kelanjutannya?

893. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:30:10]

Kelanjutannya itu, Yang Mulia, karena itu tidak ditindaklanjuti terus memang ada keganjalan-keganjalan yang saat itu terjadi pada saat pleno, itu terjadi kisruh.

894. KETUA: SUHARTOYO [01:30:21]

Di samping rekomendasi yang tidak dilaksanakan, juga kemudian ada hal-hal lain yang menimbulkan kekisruhan di proses rekapitulasi itu?

895. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:30:30]

Benar, Yang Mulia.

896. KETUA: SUHARTOYO [01:30:31]

Apa lagi?

897. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:30:33]

Saya pikir itu saja, Yang Mulia.

898. KETUA: SUHARTOYO

Itu. Kemudian bagaimana proses rekapitulasi selanjutnya? Apakah bisa selesai atau tidak?

899. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:30:43]

Proses rekapitulasi itu tidak selesai. Saat itu ditunda.

900. KETUA: SUHARTOYO [01:30:47]

Ditunda.

901. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:30:48]

Tetapi terkait rekomendasi tersebut untuk 2 distrik, itu ditindaklanjuti di pleno provinsi terkait rekomendasi tadi. Artinya bahwa

penghitungan ulang surat suara itu, itu terjadi di tingkat provinsi, itu untuk Distrik Haju dan Distrik Passue.

902. KETUA: SUHARTOYO [01:31:11]

Kenapa dibawa ke tingkat provinsi?

903. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:31:13]

Saya kurang tahu, Yang Mulia.

904. KETUA: SUHARTOYO [01:31:15]

Yang dua sudah selesai?

905. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:31:17]

Ya, yang Haju sama yang Passue.

906. KETUA: SUHARTOYO [01:31:21]

Yang dua lagi selesai atau tidak?

907. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:31:22]

Yang dua belum selesai.

908. KETUA: SUHARTOYO [01:31:22]

Mana itu? Mana? Kecamatan apa?

909. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:31:28]

Obaa sama Minyamur.

910. KETUA: SUHARTOYO [01:31:31]

Obaa?

911. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:31:32]

Ya, sama Minyamur.

912. KETUA: SUHARTOYO [01:31:38]

Kenapa yang dua ini bisa selesai?

913. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:31:42]

Itu ditindaklanjuti di provinsi, Yang Mulia.

914. KETUA: SUHARTOYO

PSSU-nya? Penghitungan?

915. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:31:46]

Ya, penghitungan surat suara, ya, penghitungan ulang.

916. KETUA: SUHARTOYO [01:31:49]

Oke. Kenapa yang dua tidak dilanjutkan?

917. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EMANUEL B.D BASAGAI [01:31:51]

Saya kurang tahu, Yang Mulia.

918. KETUA: SUHARTOYO [01:31:56]

Pak Maximus, apa yang mau dijelaskan?

919. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:32:05]

Ya. Izin, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan terkait tidak ada proses pemungutan suara DPR RI dan DPD RI di tingkat TPS.

920. KETUA: SUHARTOYO [01:32:20]

Tidak ada?

921. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:32:24]

Proses pemungutan suara DPD RI dan DPR RI di tingkat TPS.

922. KETUA: SUHARTOYO [01:32:31]

TPS mana?

923. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:32:33]

Di TPS 1, Kampung Taim, Distrik Passue.

924. KETUA: SUHARTOYO [01:32:37]

TPS 1?

925. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:32:39]

Kampung Taim, Distrik Passue.

926. KETUA: SUHARTOYO [01:32:44]

Kampung apa, Pak?

927. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:32:44]

Kampung Taim.

928. KETUA: SUHARTOYO [01:32:45]

Taim, ya?

929. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:32:46]

Ya.

930. KETUA: SUHARTOYO [01:32:46]

Distrik?

931. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:32:48]

Passue.

932. KETUA: SUHARTOYO [01:32:53]

Ketika itu Saudara sebagai apa?

933. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:32:57]

Saya di sana sebagai pemilih.

934. KETUA: SUHARTOYO [01:32:58]

Pemilih?

935. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:32:59]

Ya.

936. KETUA: SUHARTOYO [01:33:04]

Di TPS itu?

937. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:33:05]

Ya, di TPS.

938. KETUA: SUHARTOYO [01:33:07]

TPS 1 itu?

939. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:33:08]

Ya.

940. KETUA: SUHARTOYO [01:33:10]

Kok tahu kalau tidak ada pemilihan untuk DPR?

941. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:33:15]

Karena tidak dibagi kertas suaranya, Pak.

942. KETUA: SUHARTOYO [01:33:16]

Jadi, Saudara hanya milih berapa surat suara?

943. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:33:22]

Hanya DPRD Kabupaten dengan DPRD Provinsi.

944. KETUA: SUHARTOYO [01:33:25]

Kabupaten dan Provinsi?

945. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:33:26]

Ya.

946. KETUA: SUHARTOYO [01:33:27]

Hanya ada dua?

947. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:33:28]

Ada dua saja.

948. KETUA: SUHARTOYO [01:33:29]

Terus, tidak mengajukan keberatan ke panitia?

949. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:33:35]

Saat itu kami tidak mengajukan keberatan karena penyelenggara di situ sampaikan bahwa nanti dilakukan di distrik.

950. KETUA: SUHARTOYO [01:33:43]

Apa yang dilakukan? Kan mau nyoblos?

951. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:33:46]

Ya, kami tidak dikasih surat suara, Pak.

952. KETUA: SUHARTOYO [01:33:47]

Tidak, ya?

953. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:33:49]

Ya.

954. KETUA: SUHARTOYO [01:33:53]

Di samping Saudara dengan siapa lagi? Ada teman lain, orang lain yang juga diperlakukan sama?

955. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:33:57]

Sama. Semua masyarakat di situ, Pak.

956. KETUA: SUHARTOYO [01:33:58]

Yang di TPS 1 itu tidak diberi surat suara untuk DPR RI, DPD, semua?

957. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:34:09]

Ya.

958. KETUA: SUHARTOYO [01:34:10]

Jadi, Bapak hanya mencoblos berapa kertas suara ... surat suara?

959. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:34:14]

Dua kertas suara saja.

960. KETUA: SUHARTOYO [01:34:15]

DPRD dan?

961. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:34:16]

DPR Provinsi.

962. KETUA: SUHARTOYO [01:34:18]

Yang tidak ada?

963. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:34:22]

Yang tidak ada DPD ... DPR RI, DPD RI, dan Presiden.

964. KETUA: SUHARTOYO [01:34:26]

Presiden, oke. Apa kata panitianya itu tadi yang akan dilakukan di ... di apa ... dilakukan di distrik? Apa katanya tadi?

965. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:34:43]

Untuk kejelasan lebih lanjut tidak ada, cuma kami dibagikan (...)

966. KETUA: SUHARTOYO [01:34:46]

Berapa anunya, Pak di situ, Pak, DPT-nya?

967. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:34:52]

DPT-nya saya kurang tahu, Pak.

968. KETUA: SUHARTOYO [01:34:50]

Kurang tahu.

969. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:34:50]

Ya.

970. KETUA: SUHARTOYO [01:34:51]

Waktu itu yang hadir banyak yang bareng dengan Saudara?

971. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:34:56]

Banyak, Pak.

972. KETUA: SUHARTOYO [01:34:59]

Semua mendapatkan yang sama, ya?

973. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:35:03]

Ya, semua mendapatkan yang sama.

974. KETUA: SUHARTOYO [01:35:02]

Tidak ada 3 surat suara untuk Pilpres, DPR RI, dan DPD?

975. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:35:10]

Ya.

976. KETUA: SUHARTOYO [01:35:10]

Betul, ya?

977. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:35:10]

Betul, Pak.

978. KETUA: SUHARTOYO [01:35:16]

Terus, ada yang keberatan ke tingkat pengawas? Saudara tahu?

979. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAXIMUS ANUMANGGI [01:35:23]

Pada saat itu, saya sebagai pemilih. Jadi, saya tidak mengikuti ada yang keberatan (...)

980. KETUA: SUHARTOYO [01:35:29]

Pak Mohamad Nur, apa yang dijelaskan?

981. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOHAMAD NUR AAN LA DJAHARIA [01:35:33]

Baik. Yang Mulia, terima kasih. Saya sebagai Saksi dari proses perhitungan rekapitulasi suara di tingkat provinsi.

982. KETUA: SUHARTOYO [01:35:41]

Oh, Saksi, ya.

983. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOHAMAD NUR AAN LA DJAHARIA [01:35:43]

Siap, Yang Mulia.

984. KETUA: SUHARTOYO [01:35:45]

Apa yang mau dijelaskan, Pak? Dari mandat, ya?

985. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOHAMAD NUR AAN LA DJAHARIA [01:35:47]

Ya.

986. KETUA: SUHARTOYO [01:35:48]

Mandat Partai?

987. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOHAMAD NUR AAN LA DJAHARIA [01:35:49]

Partai Golkar.

988. KETUA: SUHARTOYO [01:35:51]

Mandat Partai Golkar. Apa yang mau dijelaskan, Pak?

989. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOHAMAD NUR AAN LA DJAHARIA [01:35:54]

Yang Mulia, proses tahapan yang terjadi di tingkat kabupaten, khusus untuk Kabupaten Mappi, kami menindaklanjuti persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Mappi untuk kita tindak lanjuti di provinsi. Salah satunya, yaitu mengenai perhitungan surat suara ulang itu berdasarkan Surat Bawaslu, itu Nomor 93, itu tidak ditindaklanjuti di tingkat kabupaten, khusus Mappi.

990. KETUA: SUHARTOYO [01:36:25]

Yang disampaikan Saksi Emanuel tadi?

991. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:36:27]

Siap, Yang Mulia.

992. KETUA: SUHARTOYO [01:36:29]

Katanya, dua sudah ditindaklanjuti di situ, di kabupaten (...)

993. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:36:33]

Ya.

994. KETUA: SUHARTOYO [01:36:32]

Bapak, ketika di provinsi, yang dua tadi ditindaklanjuti, tidak?

995. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:36:37]

Tapi tidak ditindaklanjuti, Yang Mulia.

996. KETUA: SUHARTOYO [01:36:39]

Yang dua?

997. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:36:40]

Ya.

998. KETUA: SUHARTOYO [01:36:40]

Saudara mengajukan keberatan?

999. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:36:43]

Saat itu kami ajukan keberatan, Yang Mulia.

1000. KETUA: SUHARTOYO [01:36:46]

Bentuknya apa?

1001. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:36:47]

Berupa kami, apa ... menyampaikan langsung ke (...)

1002. KETUA: SUHARTOYO [01:36:53]

Tidak isi ada form keberatan atukah kemudian lapor juga ke Bawaslu?

1003. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:36:58]

Kami, waktu itu izin mengisi, Yang Mulia.

1004. KETUA: SUHARTOYO [01:37:01]

Mengisi?

1005. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:37:02]

Ya, siap.

1006. KETUA: SUHARTOYO [01:37:03]

Lapor ke Bawaslu juga?

1007.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:37:07]

Kami hanya mengisi Form Keberatan saja, Yang Mulia.

1008.KETUA: SUHARTOYO [01:37:11]

Jadi, intinya dua distrik yang disampaikan oleh Emanuel tadi belum ditindaklanjuti di tingkat provinsi, ya?

1009.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:37:20]

Siap, Yang Mulia.

1010.KETUA: SUHARTOYO [01:37:22]

Ada yang lain?

1011.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:37:22]

Ada.

1012.KETUA: SUHARTOYO [01:37:23]

Apa?

1013.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:37:24]

Jadi, beberapa saksi kami juga yang ada di lapangan itu tidak diberikan C.Hasil, Yang Mulia, C-1 Hasil, Yang Mulia.

1014.KETUA: SUHARTOYO [01:37:31]

Dari ... anu ... dari di tingkat-tingkat TPS?

1015.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:37:36]

Dari pihak penyelenggara. Ya, siap, Yang Mulia.

1016. KETUA: SUHARTOYO [01:37:38]

Bisa dijelaskan TPS mana saja?

1017. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:37:41]

Itu salah satunya di Passue, itu tidak diberikan. Kemudian di beberapa tingkat distrik juga tidak diberikan.

1018. KETUA: SUHARTOYO [01:37:48]

Bapak tahu dari mana itu?

1019. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:37:50]

Kebetulan kami juga pada saat itu kan, punya saksi yang ada di beberapa TPS.

1020. KETUA: SUHARTOYO [01:37:55]

Tidak diberi (...)

1021. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:37:56]

Itu (...)

1022. KETUA: SUHARTOYO [01:37:56]

Tidak diberi salinan?

1023. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:37:59]

Ya. Kami minta dari mereka, mereka tidak dapat, Yang Mulia.

1024. KETUA: SUHARTOYO [01:38:04]

Kemudian, di tingkat provinsi sudah, ya. Tingkat nasional sudah mengikuti untuk yang dua distrik tadi, apakah ada persoalan?

1025.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUR AAN LA DJAHARIA [01:38:15]

Kami kurang tahu, Yang Mulia.

1026.KETUA: SUHARTOYO [01:38:18]

Pak Lodifikus, apa yang mau dijelaskan? Mahatam.

1027.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LODIFIKUS MAHATAM [01:38:23]

Baik. Pimpinan Sidang yang kami hormati, Bapak Ibu, tamu undangan yang juga kami hormati. Saya hadir sebagai Saksi dari Partai Golkar, khusus di Kabupaten Mappi. Saksi Pleno di KPU kabupaten.

1028.KETUA: SUHARTOYO [01:38:46]

Ya, apa yang terjadi, Pak?

1029.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LODIFIKUS MAHATAM [01:38:50]

Yang saya mau sampaikan bahwa kami punya pleno Kabupaten Mappi berjalan baik, lancar sampai dengan selesai. Lalu, yang saya sampaikan di sidang ini adalah di rapat pleno KPU Kabupaten Mappi, itu suara Golkar untuk DPR Provinsi Papua Selatan itu 5.464. Lalu, PAN=5.430. Setelah di KPU Provinsi Papua Selatan, suara akumulasi dari Partai Golkar, dia=5.664. Sedangkan Partai Amanat Nasional atau PAN=5.690.

1030.KETUA: SUHARTOYO [01:39:53]

Apa yang Bapak ingin sampaikan ketika (...)

1031.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LODIFIKUS MAHATAM [01:39:55]

Yang saya perlu sampaikan bahwa kalau ada suara di tingkat KPU provinsi itu harus berdasarkan kejadian khusus yang dilakukan pada saat pleno di KPU kabupaten.

1032. KETUA: SUHARTOYO [01:40:12]

Yang ada itu gimana, Pak? Yang ada rekomendasi, katanya dua distrik belum selesai itu gimana?

1033. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LODIFIKUS MAHATAM [01:40:22]

Saya tidak bisa menyampaikan itu karena saya tidak tahu, Hakim, Yang Mulia.

1034. KETUA: SUHARTOYO [01:40:26]

Tidak tahu, ya. Tidak tahu, ya?

1035. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LODIFIKUS MAHATAM [01:40:26]

Karena yang saya tahu itu adalah ini saya bicara pada saat pleno KPU Kabupaten Mappi.

1036. KETUA: SUHARTOYO [01:40:33]

Ya. Ketika pleno di situ, kan kata Saksi sebelumnya ada persoalan rekomendasi yang belum tuntas, itu Bapak tahu tidak?

1037. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LODIFIKUS MAHATAM [01:40:47]

Saya tidak tahu karena kejadian pada saat itu tidak ada keberatannya. Karena saya bicara antara suara Partai Golkar dengan PAN, dengan selisih antara pleno di KPU kabupaten dengan KPU provinsi.

1038. KETUA: SUHARTOYO [01:41:03]

Dari Helda, Bu Helda apa yang mau dijelaskan?

1039. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:41:10]

Majelis Hakim, Yang Mulia, saya Helda Ambay dari KPU Provinsi Papua Selatan. Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Papua Selatan ada keberatan dari Partai PAN. Yang mana, Partai PAN membawa dokumen, yaitu berupa C.Hasil dari TPS berupa foto dan juga C.Hasil Salinan. Yang mana, yang kedua, yaitu Partai PAN telah mendaftarkan indikasi kehilangan suara dari TPS di distrik dan juga

kabupaten. Sehingga pada saat rekapitulasi bersama dengan Bawaslu, kesepakatan bersama Bawaslu untuk kita menyandingkan data ulang kembali berdasarkan data primer, yaitu data C.Hasil dan kita persandingkan dengan D.Perolehan D.Distrik, dan juga D.Kabupaten.

1040. KETUA: SUHARTOYO [01:42:20]

Ini di waktu rekapitulasi di tingkat?

1041. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:42:21]

Tingkat provinsi, Yang Mulia.

1042. KETUA: SUHARTOYO [01:42:25]

Provinsi. Itu distrik mana saja, Bu?

1043. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:42:25]

Itu di Distrik Haju, Distrik Haju 2 ... 1 kampung, 2 TPS.

1044. KETUA: SUHARTOYO [01:42:33]

Sudah dilakukan itu?

1045. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:42:34]

Sudah dilakukan, itu Distrik Haju, Kampung Wiyage, TPS 1 dan 2.

1046. KETUA: SUHARTOYO [01:42:41]

Kemudian, masih keberatan dari PAN?

1047. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:42:43]

Tidak.

1048. KETUA: SUHARTOYO [01:42:44]

Sudah selesai?

1049. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:42:45]

Setelah disandingkan, di sini ditemukan bahwa ada suara PAN yang tidak diakomodir atau indikasi dihilangkan, gitu, indikasi dihilangkan. Sehingga (...)

1050. KETUA: SUHARTOYO [01:43:01]

Setelah dilakukan penyandingan itu.

1051. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:43:10]

Sehingga dilakukan penyandingan, maka kita kembalikan suara itu yang tadi di TPS 1 dan TPS 2. Sehingga perolehan PAN yang dari 5.430 itu menjadi 5.690. Jadi, setelah penyandingan data dari data primer C. Hasil bersama dengan Bawaslu, maka suara awal itu 5.430 menjadi 5.690, demikian, Yang Mulia.

1052. KETUA: SUHARTOYO [01:43:39]

Sudah ya?

1053. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:43:40]

Ya.

1054. KETUA: SUHARTOYO [01:43:41]

Ini untuk perolehan akumulasinya, ya?

1055. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:43:43]

Benar, Yang Mulia.

1056. KETUA: SUHARTOYO [01:43:44]

Untuk DPR RI, ya?

1057. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:43:45]

DPR Provinsi.

1058. KETUA: SUHARTOYO [01:43:47]

Yang maksudnya di tingkat, pengitungan tingkat provinsi itu (...)

1059. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:43:46]

Benar, Yang Mulia.

1060. KETUA: SUHARTOYO [01:43:56]

Suara PAN akumulasinya 5.430, menjadi 5.690.

1061. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:43:57]

Benar, Yang Mulia.

1062. KETUA: SUHARTOYO [01:43:58]

Setelah dilakukan penandingan.

1063. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [01:43:59]

Benar.

1064. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]

Yati Enoch, apa yang mau dijelaskan ini?

1065. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:44:00]

Izin, Hakim Yang Mulia, yang ingin saya jelaskan menyangkut pleno di Kabupaten Mappi. Nama saya izin, nama saya Yati Enoch, saya Ketua KPU Kabupaten Mappi. Yang pertama yang saya jelaskan bahwa pleno berjalan dari tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 7 dan setelah itu kami melanjutkan kepada pleno tingkat provinsi. Di Kabupaten kami mensahkan Partai Golkar dengan jumlah 5.464 dan PAN 5.430. Setelah pleno berakhir di kabupaten, kami melanjutkan untuk mengikuti pleno rekapitulasi di tingkat provinsi dan di saat pleno rekapitulasi di provinsi, ada penandingan data kembali yang tadinya di kabupaten tidak dilakukan oleh Partai PAN. Mereka pun tidak mengisi kejadian khusus menyangkut suara PAN, sehingga kami KPU Kabupaten Mappi mengetahui bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan oleh Partai PAN.

1066. KETUA: SUHARTOYO [01:45:25]

Terus yang perbaikan jadi 5.690 itu?

1067. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:45:27]

Itu dilakukan di provinsi, Yang Mulia.

1068. KETUA: SUHARTOYO [01:45:28]

Provinsi. Itu PAN kemudian sudah bisa terima?

1069. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:45:31]

Ya, PAN menerima.

1070. KETUA: SUHARTOYO [01:45:33]

Tanda tangan dilihat Ibu di tingkat rekapitulasi provinsi?

1071. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:45:40]

Ya, Yang Mulia di tingkat provinsi.

1072. KETUA: SUHARTOYO [01:45:42]

Terus satu partai tadi yang Ibu sebut tadi partai apa?

1073. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:45:46]

Partai Golkar.

1074. KETUA: SUHARTOYO [01:45:46]

Partai Golkar?

1075. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:45:48]

Partai Golkar menyampaikan (...)

1076. KETUA: SUHARTOYO [01:45:53]

Menyampaikan apa?

1077. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:45:53]

Menyampaikan keberatan.

1078. KETUA: SUHARTOYO [01:45:53]

Ya, berkaitan dengan?

1079. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:45:53]

Berkaitan dengan penetapan yang dari kabupaten berubah di provinsi. Dan dijelaskan bahwa penyandingan data itu juga kami lakukan di tingkat provinsi.

1080. KETUA: SUHARTOYO [01:46:09]

Untuk Golkar juga?

1081. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:46:10]

Ya, untuk Golkar. Namun pada tingkat provinsi suara Golkar tidak mengalami perubahan.

1082. KETUA: SUHARTOYO [01:46:17]

Sama?

1083. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:46:16]

Sama, tetap 5.464.

1084. KETUA: SUHARTOYO [01:46:20]

Kemudian, masih keberatan terus sudah bisa terima? Bisa menerima Golkar?

1085. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:46:25]

Mereka, mereka mengisi Form D.Keberatan.

1086. KETUA: SUHARTOYO [01:46:24]

Keberatan. Padahal sudah sama antara perolehan suara yang di tingkat kabupaten dengan penyandingan yang dilakukan di tingkat provinsi.

1087. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:46:38]

Ya.

1088. KETUA: SUHARTOYO [01:46:40]

Keberatannya alasannya apa lagi? Ibu tahu kok masih keberatan?

1089. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:46:48]

Saat itu Partai Golkar yang hadir itu 4 orang. Sehingga pimpinan sidang menyampaikan bahwa mereka tidak bisa masuk. Karena mereka menyampaikan ada masalah.

1090. KETUA: SUHARTOYO [01:47:00]

Bukan itu yang ditanya. Partai Golkar kan sudah dilakukan penyandingan di tingkat provinsi. Suaranya sama. Kenapa masih keberatan? Bukan persoalan enggak boleh masuk itu. Ibu tahu?

1091. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:47:17]

Karena indikasi kehilangan kursi terakhir.

1092. KETUA: SUHARTOYO [01:47:19]

Oh, begitu. Mestinya dia ingin ... menurut, menurut PAN ... menurut Golkar lebih dari itu?

1093. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH [01:47:27]

Menurut Golkar mereka memiliki kursi terakhir, kursi ke-7.

1094. KETUA: SUHARTOYO [01:47:39]

Ini kursi apa sih, Bu?

1095. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH

Untuk jenis pemilihan DPR Provinsi Papua Selatan.

1096. KETUA: SUHARTOYO [01:47:45]

Provinsi ya? Bukan anu ya, bukan DPR RI, ya?

1097. SAKSI TERMOHON: YATI ENOCH

Bukan, Yang Mulia.

1098. KETUA: SUHARTOYO [01:47:56]

Yang Hence, apa yang mau dijelaskan?

1099. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:48:00]

Terima kasih atas waktunya.

1100. KETUA: SUHARTOYO [01:48:00]

Pak Hence, ya. Silakan, Pak.

1101. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:48:00]

Terima kasih atas waktu yang diberikan, Yang Mulia. Yang mau saya sampaikan adalah pernyataan dari yang memohon kepada kami PPD, waktu itu saya jadi Ketua PPD. Jadi, untuk pemilihan di ... pemilihan di Kampung Taim, itu sudah dilakukan oleh masyarakat di sana dan dilaksanakan oleh (...)

1102. KETUA: SUHARTOYO [01:48:29]

Di TPS 1 tadi?

1103. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:48:27]

Ya.

1104. KETUA: SUHARTOYO [01:48:27]

Kalau surat suaranya kurang tadi?

1105. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:48:34]

Semua lengkap, itu dilakukan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh PPS dan sudah disampaikan dalam bentuk (...)

1106. KETUA: SUHARTOYO [01:48:40]

Bapak waktu itu jadi Ketua?

1107. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:48:39]

Ya, jadi (...)

1108. KETUA: SUHARTOYO [01:48:39]

Anggota atau ketua?

1109. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:48:43]

Ketua.

1110. KETUA: SUHARTOYO [01:48:47]

Ketua.

1111. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:48:47]

Sudah disampaikan oleh PPS.

1112. KETUA: SUHARTOYO [01:48:50]

Tidak ada yang protes-protes ke tingkat pengawas juga bahwa surat suara itu?

1113. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:48:56]

Tidak, tidak ada.

1114. KETUA: SUHARTOYO [01:48:57]

Sebagaimana bisa diceritakan Saksi Pemohon tadi? Tidak. Tidak, ya?

1115. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:49:01]

Tidak.

1116. KETUA: SUHARTOYO [01:49:02]

Jadi Pilpres, nanti Bapak tahu perolehan suara untuk pilpres di sana? Siapa yang menang untuk di TPS 1 itu?

1117. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:49:16]

Belum begitu tahu, Pak.

1118. KETUA: SUHARTOYO [01:49:18]

Ha?

1119. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:49:19]

Karena secara keseluruhan direkap.

1120. KETUA: SUHARTOYO [01:49:20]

Ya. Kalau tidak tahu, di tingkat DPR RI siapa yang unggul di situ untuk suara dari TPS 1 itu?

1121. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:49:32]

Izin secara keseluruhan direkap juga oleh staf teknis, jadi saya (ucapan tidak terdengar jelas) juga.

1122. KETUA: SUHARTOYO [01:49:37]

Eenggak tahu juga. Ini kan untuk ngecek apakah betul ada pemilihan untuk Pilpres, DPR RI, DPD. Bapak enggak ngecek itu?

1123. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:49:49]

Ya.

1124. KETUA: SUHARTOYO [01:49:49]

Tapi betul di Taim itu memang (...)

1125. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:49:49]

Betul. Betul dilaksanakan (...)

1126. KETUA: SUHARTOYO [01:49:49]

Surat suara 5, masing-masing pemilih diberi 5?

1127. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:49:56]

Ya, diberi 5. Sempat PPS bawa naik kami pleno di tingkat distrik, mereka bacakan semua itu.

1128. KETUA: SUHARTOYO [01:50:02]

Apa yang dibacakan?

1129. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:50:04]

Ya, untuk 5 kartu surat suara.

1130. KETUA: SUHARTOYO [01:50:06]

Lima surat suara, masing-masing?

1131. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:50:07]

Masing-masing dibacakan.

1132. KETUA: SUHARTOYO [01:50:07]

Tadi Saksi hanya ... Abraham Jamlean, Anggota KPU Asmat, apa yang dijelaskan, Pak?

1133. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:50:20]

Izin, Yang Mulia. Untuk Asmat, proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Asmat tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi mandat dari Partai Golkar.

1134. KETUA: SUHARTOYO [01:50:38]

Terus apa lagi?

1135. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:50:39]

Demikian, Yang Mulia.

1136. KETUA: SUHARTOYO [01:50:40]

Enggak ada lagi?

1137. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:50:41]

Siap.

1138. KETUA: SUHARTOYO [01:50:48]

Persoalan lain di situ, di Asmat? Ada?

1139. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:50:52]

Izin, Yang Mulia. Mohon diulang.

1140. KETUA: SUHARTOYO [01:50:55]

Untuk dari ... rekapitulasi di tingkat Kabupaten Asmat, ada yang keberatan, tidak?

1141. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:51:01]

Kalau untuk jenis pemilihan DPR RI ada.

1142. KETUA: SUHARTOYO [01:51:06]

Siapa yang keberatan?

1143. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:51:08]

Dari Partai Kebangkitan Bangsa dan telah diselesaikan di pleno tingkat provinsi.

1144. KETUA: SUHARTOYO [01:51:12]

Apa keberatannya?

1145. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:51:14]

Persoalan suara.

1146. KETUA: SUHARTOYO [01:51:16]

Sudah diselesaikan?

1147. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:51:16]

Selesaikan di tingkat ... di pleno tingkat provinsi.

1148. KETUA: SUHARTOYO [01:51:20]

Provinsi. Waktu di kabupaten tidak selesai?

1149. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:51:23]

Untuk DPR RI tidak selesai di kabupaten.

1150. KETUA: SUHARTOYO [01:51:26]

PKB itu, lho?

1151. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:51:27]

Ya.

1152. KETUA: SUHARTOYO [01:51:27]

Kenapa enggak selesai?

1153. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:51:29]

Karena pada saat pleno kita dikejar oleh waktu. Tenggat waktu yang (...)

1154. KETUA: SUHARTOYO [01:51:34]

Jadi diselesaikan di tingkat provinsi?

1155. SAKSI TERMOHON: HENCE OKU [01:51:35]

Ya, diselesaikan di tingkat provinsi.

1156. KETUA: SUHARTOYO [01:51:36]

Saudara ikut datang ketika rekapitulasi provinsi?

1157. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:51:40]

Siap, Yang Mulia.

1158. KETUA: SUHARTOYO [01:51:40]

Sudah selesai itu?

1159. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:51:42]

Selesai, Yang Mulia.

1160. KETUA: SUHARTOYO [01:51:43]

Sudah bisa menerima hasil, PKB?

1161. SAKSI TERMOHON: ABRAHAM JAMLEAN [01:51:45]

Siap, Yang Mulia.

1162. KETUA: SUHARTOYO [01:51:48]

Pak Frits. Apa yang mau disampaikan? Pemilih ini.

1163. SAKSI TERMOHON: FRITS GANDAIMU [01:51:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Waktu yang diizinkan kepada saya. Saya dari pemilih, Kampung Kotub, Distrik Passue. Saya pada tanggal 14 Februari, kami di Kampung Kotub menyelenggarakan kegiatan pemilihan, saya sebagai pemilih, saya memilih di sana dengan baik, kemudian sampai dengan selesai.

1164. KETUA: SUHARTOYO [01:52:18]

Di TPS berapa, Pak?

1165. SAKSI TERMOHON: FRITS GANDAIMU [01:52:19]

Di TPS 2.

1166. KETUA: SUHARTOYO [01:52:21]

TPS 2 di Kampung?

1167. SAKSI TERMOHON: FRITS GANDAIMU [01:52:23]

Kampung Kotub.

1168. KETUA: SUHARTOYO [01:52:28]

Kotub?

1169. SAKSI TERMOHON: FRITS GANDAIMU [01:52:30]

Ya.

1170. KETUA: SUHARTOYO [01:52:33]

Kecamatan apa ini? Atau distrik, apa?

1171. SAKSI TERMOHON: FRITS GANDAIMU [01:52:34]

Distrik Passue.

1172. KETUA: SUHARTOYO [01:52:36]

Pas?

1173. SAKSI TERMOHON: FRITS GANDAIMU [01:52:37]

Passue.

1174. KETUA: SUHARTOYO [01:52:38]

Passue. Apa yang ingin disampaikan, Bapak? Ada persoalan di situ, di TPS, Bapak?

1175. SAKSI TERMOHON: FRITS GANDAIMU [01:52:47]

Tidak ada.

1176. KETUA: SUHARTOYO [01:52:48]

Tidak ada. Semua normal?

1177. SAKSI TERMOHON: FRITS GANDAIMU [01:52:52]

Ya.

1178. KETUA: SUHARTOYO [01:52:53]

Kemudian, kejadian-kejadian lain?

1179. SAKSI TERMOHON: FRITS GANDAIMU [01:53:02]

Tidak ada.

1180. KETUA: SUHARTOYO [01:53:06]

Dari Albertus Muyak, Pihak Terkait PAN. Apa yang ingin dijelaskan, Pak?

1181.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTUS MUYAK [01:53:13]

Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kepada kami, Yang Mulia. Shalom. Assalamualaikum wr. wb.

1182.KETUA: SUHARTOYO [01:53:23]

Walaikumssalam.

1183.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTUS MUYAK [01:53:23]

Yang ingin saya sampaikan, yaitu pada saat pleno provinsi KPU Provinsi Papua Selatan, saya sendiri Saksi dari PAN, sebagai Sekretaris DPP PAN Provinsi Papua Selatan.

1184.KETUA: SUHARTOYO [01:53:41]

Bapak Saksi di tingkat?

1185.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTUS MUYAK [01:53:43]

Di tingkat Provinsi Papua Selatan.

1186.KETUA: SUHARTOYO [01:53:44]

Provinsi. Ya, apa, Pak yang di (...)

1187.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTUS MUYAK [01:53:43]

Lantas yang terjadi di sana, angka dari D.Hasil Kabupaten yang seperti disampaikan. Bahwa Golkar=5.454, lantas PAN=5.430. Pada saat itu kami dari PAN membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Papua Selatan bahwa ada angka yang hilang, pada saat d ... di dalam D.Hasil Kabupaten.

1188.KETUA: SUHARTOYO [01:54:12]

Jadi 5.690 itu betul, tidak?

1189.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTUS MUYAK [01:54:15]

Untuk 5.690 itu sudah betul karena sesuai dengan hasil pleno (...)

1190.KETUA: SUHARTOYO [01:54:22]

Ya.

1191.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTUS MUYAK [01:54:22]

Dan juga penetapan (...)

1192.KETUA: SUHARTOYO [01:54:23]

Artinya sudah selesai urusan (...)

1193.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTUS MUYAK [01:54:23]

Ya.

1194.KETUA: SUHARTOYO [01:54:25]

Yang berkaitan dengan PAN?

1195.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTUS MUYAK [01:54:25]

Penetapan KPU. Kami semua tanda tangan Berita Acara dan tidak ada sanggahan atau keberatan dari Partai Golkar. Demikian, Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

1196.KETUA: SUHARTOYO [01:54:35]

Baik. Kalau Pak Rudolof, apa? Saksi merupakan (...)

1197.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:54:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

1198.KETUA: SUHARTOYO [01:54:44]

Bapak Saksi, Saksi dari partai apa ini?

1199.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:54:47]

Saksi dari Partai PAN.

1200.KETUA: SUHARTOYO [01:54:49]

PAN, di TPS Wiyage.

1201.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:54:52]

Ya.

1202.KETUA: SUHARTOYO [01:54:52]

TPS berapa itu, Pak?

1203.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:54:54]

TPS 2.

1204.KETUA: SUHARTOYO [01:54:56]

Apa yang mau Bapak ceritakan? Apa yang Bapak ceritakan tentang TPS Wiyage?

1205.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:55:15]

Pemilu tanggal 14, tanggal 14 Februari kegiatan berjalan hingga sampai dengan penutupan apa ... pleno. Hasil dari TPS 02=98. Kemudian yang TPS (...)

1206.KETUA: SUHARTOYO [01:55:37]

Apa yang 98 itu, apa itu?

1207.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:55:41]

98 suara. Kemudian untuk TPS 01=132 suara. Jadi (...)

1208.KETUA: SUHARTOYO [01:55:53]

Loh, Bapak di TPS berapa, Saksinya?

1209.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:55:57]

Saksinya, TPS 02.

1210.KETUA: SUHARTOYO [01:56:00]

02?

1211.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:56:02]

Ya.

1212.KETUA: SUHARTOYO [01:56:03]

Di 01, apa?

1213.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:56:03]

01, sementara yang ... Bapak Linus sementara juga, Pak izin, keluar, jadi setelah pleno, lalu kemudian mungkin setelah kita sudah pleno kampung, pleno C.Kecil, kemudian hasil ... hasil yang sudah kita total. Nah, kemudian urus apa (...)

1214.KETUA: SUHARTOYO [01:56:30]

Yang di 02 saja yang Bapak ceritakan.

1215.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:56:33]

Oh. Ya, ya. Terima kasih, izinkan saya (...)

1216. KETUA: SUHARTOYO [01:56:37]

Yang di 02 tadi ada 98 suara.

1217. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:56:41]

Ya, 98.

1218. KETUA: SUHARTOYO [01:56:42]

Pemilihnya berapa, Pak?

1219. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:56:43]

98 suara.

1220. KETUA: SUHARTOYO [01:56:45]

Pemilihnya berapa DPT-nya?

1221. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:56:48]

Pemilihnya 233 suara ... apa ... DPT.

1222. KETUA: SUHARTOYO [01:56:54]

Tapi yang hadir 98?

1223. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:56:56]

Ya.

1224. KETUA: SUHARTOYO [01:56:56]

Ya, Pak?

1225. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:56:58]

Yang TPS 02, untuk Partai PAN=98 suara.

1226. KETUA: SUHARTOYO [01:57:05]

Oh. Itu untuk Partai PAN, yang hadir berapa, Pak?

1227. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:57:09]

Semua.

1228. KETUA: SUHARTOYO [01:57:12]

233 DPT-nya kan? Hadir semua?

1229. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:57:16]

Ya.

1230. KETUA: SUHARTOYO [01:57:18]

PAN dapat berapa? 98?

1231. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:57:24]

132 suara.

1232. KETUA: SUHARTOYO [01:57:28]

Yang 98 tadi?

1233. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:57:29]

98 suara. Ya, ya, maaf.

1234. KETUA: SUHARTOYO [01:57:33]

Yang 132 apa lagi itu?

1235. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:57:34]

Ya, ya.

1236. KETUA: SUHARTOYO [01:57:37]

Yang 132 untuk apa?

1237. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:57:39]

Ya, jadi total suara (...)

1238. KETUA: SUHARTOYO [01:57:47]

Sudah. Enggak usah ditotal, Pak. Nanti malah tambah pusing, tapi Bapak (...)

1239. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:57:50]

Terima kasih.

1240. KETUA: SUHARTOYO [01:57:52]

Bapak waktu itu saksi dari partai?

1241. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:57:54]

Partai PAN.

1242. KETUA: SUHARTOYO [01:57:55]

PAN, ya, dapat 98 suara.

1243. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:57:57]

Ya.

1244. KETUA: SUHARTOYO [01:57:58]

Tanda tangan, Bapak?

1245. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:58:01]

Saya sendiri.

1246. KETUA: SUHARTOYO [01:58:02]

Bapak tanda tangan tidak waktu penghitungan selesai?

1247. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDOLOF RONDE [01:58:05]

Ya, sendiri.

1248. KETUA: SUHARTOYO [01:58:07]

Ya. Oh, tanda tangan sendiri. Baik, ini memang bahasa kita ini kan kadang-kadang, kalau di Sulawesi bagian sana kalau ya, itu, ya saya, gitu kan, ya kan, Pak? Kita sendiri itu maksudnya, ya bisa juga kan. Jadi, kita harus apa namanya ... bisa mengelaborasi.

Kemudian, Pak Jechlin Madarch, apa yang mau dijelaskan dari Pihak Terkait Nasdem? Pak Jechlin Madarch. Mana Pak Jechlinnya? Atau di sana Bapak bisa sebelah kanan yang ada miknya. Pindah, Pak. Pindah, Pak. Biar pakai mik, Pak. Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Mappi. Apa, Pak yang mau dijelaskan, Pak?

1249. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [01:59:27]

Izin, Yang Mulia. Saya Jechlin Madarch Lufkey, sebagai Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Mappi, di sini saya memberikan keterangan tentang kejadian pleno yang terjadi di Kabupaten Mappi. Di saat itu, dari tanggal (...)

1250. KETUA: SUHARTOYO [01:59:47]

Bapak jadi saksi mandat juga?

1251. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [01:59:49]

Saksi mandat di kabupaten, Yang Mulia.

1252. KETUA: SUHARTOYO [01:59:52]

Kabupaten Mappi.

1253.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [01:59:53]

Siap.

1254.KETUA: SUHARTOYO [01:59:54]

Apa yang mau disampaikan?

1255.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [01:59:55]

Siap. Di saat tanggal 28 sampai tanggal 30 di Kabupaten Mappi, itu terjadi kisruh atau kondisi situasional yang tidak baik, Yang Mulia.

1256.KETUA: SUHARTOYO [02:00:07]

Ketika rekapitulasi?

1257.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:00:09]

Ya, Yang Mulia. Di saat itu ada kelompok-kelompok yang, yang datang ke KPU untuk melakukan aksi demo untuk membatalkan rapat pleno dan ada juga kelompok yang ingin melanjutkan rapat pleno, Yang Mulia.

1258.KETUA: SUHARTOYO [02:00:32]

Ya. Itu persoalannya apa sih, Pak?

1259.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:00:36]

Terus sehubungan dengan itu, maka KPU Kabupaten Mappi mengundang kami para perwakilan pimpinan partai pada tanggal 1 Maret 2024, yang bertempat di kantor KPU. Di situ kita dengan para pimpinan partai, saya hadir sebagai perwakilan Partai Nasdem dan ada partai-partai lain seperti (...)

1260. KETUA: SUHARTOYO [02:00:58]

Tapi Saudara juga Saksi Mandat?

1261. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:01:01]

Saya Saksi Mandat waktu di kabupaten, Yang Mulia.

1262. KETUA: SUHARTOYO [02:01:05]

Kabupaten. Rekapitulasi yang chaos itu?

1263. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:01:05]

Siap. Siap, Yang Mulia.

1264. KETUA: SUHARTOYO [02:01:08]

Kemudian ketika undangan pimpinan partai, Saudara juga datang?

1265. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:01:11]

Saya datang, Yang Mulia.

1266. KETUA: SUHARTOYO [02:01:12]

Persoalannya chaos itu apa?

1267. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:01:14]

Yang persoalan chaos itu, Yang Mulia, izin. Ada sekelompok yang mau mengulang ... mau mengulang pleno di tingkat distrik, ada yang mau melanjutkan, Yang Mulia.

1268.KETUA: SUHARTOYO [02:01:27]

Oh, jadi ada pro-kontra soal (...)

1269.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:01:29]

Ya, siap, Yang Mulia.

1270.KETUA: SUHARTOYO [02:01:30]

Akhirnya putusan ketika rapat koordinasi apa?

1271.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:01:33]

Akhirnya kita dengan KPU melakukan rapat koordinasi memutuskan bahwa pleno tetap berlanjut, Yang Mulia.

1272.KETUA: SUHARTOYO [02:01:42]

Ya. Terus setelah itu bagaimana para utusan-utusan partai, mandat, bisa menerima hasilnya?

1273.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:01:47]

Setelah itu para semua partai menerima, Yang Mulia.

1274.KETUA: SUHARTOYO [02:01:52]

Di tingkat riil penghitungan menerima juga hasil?

1275.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:01:57]

Menerima, Yang Mulia. Terus tanggal 7, Yang Mulia, izin. Tanggal 7 itu KPU mengundang untuk melakukan rapat terbuka perolehan suara tingkat kabupaten, Yang Mulia, rapat pleno, Yang Mulia.

1276. KETUA: SUHARTOYO [02:02:10]

Ya. Rapat pleno berjalan normal atau?

1277. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:02:13]

Normal, Yang Mulia.

1278. KETUA: SUHARTOYO [02:02:15]

Normal. Semua bisa menerima hasilnya?

1279. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:02:17]

Semua waktu rapat pleno di tingkat kabupaten semua menerima, Yang Mulia. Tidak ada catatan khusus.

1280. KETUA: SUHARTOYO [02:02:24]

Tidak ada yang keberatan?

1281. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:02:24]

Tidak ada yang keberatan, Yang Mulia. Termasuk ada partai-partai di dalam semua setuju, Yang Mulia.

1282. KETUA: SUHARTOYO [02:02:30]

Golkar?

1283. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:02:31]

Golkar ada tanda tangan dan cap, Yang Mulia.

1284. KETUA: SUHARTOYO [02:02:34]

Siapa yang tanda tangan dan?

1285. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JECHLIN MADARCH LUFKEY [02:02:35]

Saya tidak tahu, Yang Mulia. Yang pastinya ada tanda tangan dan cap, Yang Mulia.

1286. KETUA: SUHARTOYO [02:02:41]

Dari KPU ... Bawaslu, Pak, ada catatan untuk persoalan ini di?

1287. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:02:47]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Felix dari Bawaslu, Provinsi Papua Selatan. Menerangkan sedikit terkait dengan hasil penyandingan data yang sudah disampaikan oleh Pihak Termohon, KPU Provinsi Papua Selatan. Bahwa memang itu dilakukan penyandingan data dan memang ada data yang terkoreksi di sana. Sehingga dari Bawaslu dan KPU untuk merekomendasikan untuk memperbaiki data. Dan saat itu KPU Kabupaten Mappi sudah melakukan perbaikan pada koreksi perbaikan data tersebut.

Dan untuk penjelasan terkait surat rekomendasi Bawaslu, maka kami sudah hadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi yang akan menjelaskan terkait dengan rekomendasi tersebut.

1288. KETUA: SUHARTOYO [02:03:28]

Silakan, silakan. Ya.

1289. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:03:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

1290. KETUA: SUHARTOYO [02:03:31]

Silakan. Mana Bawaslu dari Mappi? Singkat-singkat, Pak.

1291. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:03:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Micah el Maipen, Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi. Saya akan menjelaskan terkait rekomendasi yang tadi ditanyakan oleh Pemohon.

1292. KETUA: SUHARTOYO [02:03:44]

Ya. Gimana itu?

1293. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:03:45]

Untuk rekomendasi yang tadi dijelaskan bahwa sudah dilaksanakan, duanya belum. Di sini saya jelaskan bahwa untuk empat-empatnya tidak dilaksanakan.

1294. KETUA: SUHARTOYO [02:03:56]

Sudah dilaksanakan?

1295. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:03:57]

Tidak dilaksanakan.

1296. KETUA: SUHARTOYO [02:03:57]

Tidak dilaksanakan?

1297. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:03:59]

Tidak dilaksanakan. Terus untuk yang (...)

1298. KETUA: SUHARTOYO [02:04:02]

Sampai, sampai penghitungan nasional tidak dilaksanakan?

1299. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:04:02]

Tidak dilaksanakan karena ada surat Bawaslu lagi yang terkait dengan yang tadi dijelaskan bahwa pembatalan di situ, bukan pembatalan. Tapi menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu untuk meminta kepada KPU, untuk melanjutkan rekap perhitungan. Dikarenakan bahwa ada massa yang meminta untuk pleno itu dilanjutkan dan pleno tidak dilanjutkan.

1300. KETUA: SUHARTOYO [02:04:25]

Ya. Akhirnya diputuskan (...)

1301. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:04:27]

Diputuskan untuk dilanjutkan.

1302. KETUA: SUHARTOYO [02:04:33]

Dilanjutkan.

1303. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:04:33]

Ya, dilanjutkan.

1304. KETUA: SUHARTOYO [02:04:33]

Jadi ini, sebentar, Pak. Jadi, ini menggugurkan rekomendasi yang pertama, kalau begitu?

1305. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:04:39]

Tidak menggugurkan, ini hanya menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

1306. KETUA: SUHARTOYO [02:04:44]

Ya. Tapi kan ada dua rekomendasi, yang satu supaya dihitung ulang, yang satu melanjutkan. Bapak jangan tengok-tengok sana, itu teman-teman Bapak semua itu Pihak Terkait itu.

1307. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:04:55]

Siap, Yang Mulia.

1308. KETUA: SUHARTOYO [02:04:55]

Lihat sini saja. Nanti banyak godaan kalau Bapak tengok-tengok.

1309. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:05:00]

Izin, Pimpinan bisa bantu menjelaskan terkait dengan surat rekomendasi tersebut?

1310. KETUA: SUHARTOYO [02:05:04]

Ya. Itu tanggal 1 dan tanggal 4 itu gimana? Ini ambigu ini.

1311. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:05:09]

Ya. Izin, Pimpinan. Izin, Yang Mulia. Karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Mappi yang untuk 95, itu untuk merekomendasikan terkait dengan penghitungan suara ulang untuk 4 distrik akibat dari tidak diterimanya Salinan C yang termasuk dari pengawas kami di lapangan.

1312. KETUA: SUHARTOYO [02:05:18]

Ya.

1313. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:05:21]

Kemudian yang untuk perekomendasi 96, itu terkait dengan keterbatasan waktu dan ada distrik yang sementara itu sedang melakukan ... sementara melakukan rapat pleno, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penghitungan suara ulang terkait dengan distrik yang direkomendasi daripada 96.

1314. KETUA: SUHARTOYO [02:05:37]

Ya. Artinya yang 4 ini meralat yang 95, kan?

1315. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:05:41]

Ya. Akhirnya itu untuk menindaklanjuti tersebut, maka dia mengeluarkan rekomendasi 96 untuk tetap melanjutkan rapat plenonya. Demikian, Yang Mulia.

1316. KETUA: SUHARTOYO [02:05:47]

Ya, paham. Jadi, rekomendasi 96 ini meralat rekomendasi 95. Karena tidak mungkin dilaksanakan karena keterbatasan waktu, sehingga merekomendasikan supaya penghitungan dilanjutkan. Ini, Pak, ini harus tegas ini di ruang sidang ini. Supaya Hakim juga paham mana supaya dua rekomendasi ini yang harus dirujuk. Betul, Pak?

1317. BAWASLU: MICHAEL MAIPEN [02:06:11]

Ya. Betul, Yang Mulia. Terus terkait dengan (...)

1318. KETUA: SUHARTOYO [02:06:13]

Apa?

1319. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:06:14]

Untuk distrik apa ... untuk Distrik Passue, Kampung Taim, di situ disampaikan bahwa untuk perhitungan surat suara bahwa dari hasil pengawasan kami untuk distrik (...)

1320. KETUA: SUHARTOYO [02:06:21]

Tidak ada laporan, itu? Betul?

1321. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:06:21]

Passue. Terkait untuk Kampung Taim, ada laporan kepada kami dan untuk suara dari caleg DPR RI, disampaikan oleh Saudara Maxi itu sudah ditindaklanjuti. Sehingga, suara dari caleg DPR RI sudah dikembalikan. Untuk yang (...)

1322. KETUA: SUHARTOYO [02:06:44]

Berapa ... Berapa orang kejadian yang hanya terima 2 surat suara itu?

1323. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:06:48]

Yang untuk ... yang bukan untuk yang 2 suara, Yang Mulia. Untuk yang, yang dilaporkan bahwa ada penghilangan suara dari caleg DPR RI.

1324. KETUA: SUHARTOYO [02:06:57]

Oh, itu sudah dikembalikan?

1325. KETUA: SUHARTOYO BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:07:02]

Dikembalikan. Sudah dikembalikan oleh PPD.

1326. KETUA: SUHARTOYO [02:07:03]

Kalau yang dari Taim tadi, enggak ada laporan?

1327. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:07:06]

Yang dari Taim tadi itu ada laporan, tapi bukan mengenai yang pencoblosan 2 surat suara, tetapi (...)

1328. KETUA: SUHARTOYO [02:07:09]

Bukan (...)

1329. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:07:10]

Tetapi hanya penghilangan suara dari DPR RI.

1330. KETUA: SUHARTOYO [02:07:13]

Ya, hal lain, ya?

1331. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:07:14]

Ya.

1332. KETUA: SUHARTOYO [02:07:16]

Bukan persoalan (...)

1333. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:07:19]

Ya, bukan persoalan itu. Terus, terkait untuk yang DPR Provinsi bahwa itu ditindaklanjuti untuk di tingkat pleno provinsi.

1334. KETUA: SUHARTOYO [02:07:30]

Jadi, DPR RI sudah selesai, ya?

1335. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:07:30]

Ya, sudah selesai.

1336. KETUA: SUHARTOYO [02:07:32]

Yang DPR Provinsi?

1337. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:07:32]

Oh, itu ditindaklanjuti oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi.

1338. KETUA: SUHARTOYO [02:07:38]

Bisa menjelaskan nih, untuk Provinsi terkait dengan persoalan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan DPRD Provinsi.

1339. BAWASLU: YEUW M FELIX TETHOOL [02:07:48]

Baik, Yang Mulia. Sesuai dengan hasil pengawasan kami saat dilakukan rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Selatan. Bahwa saat itu, ada keberatan dari Partai Amanat Nasional dan mereka membawa dokumen-dokumen dari seperti yang sudah disampaikan oleh Termohon (...)

1340. KETUA: SUHARTOYO [02:08:04]

Ya, terus.

1341. BAWASLU: YEUW M FELIX TETHOOL [02:08:02]

Bahwa, itu disandingkan, akhirnya memang diketemukan fakta bahwa ada kesalahan data di sana. Bahwa tidak kesesuaian antara (...)

1342. KETUA: SUHARTOYO [02:08:10]

Sudah selesai belum akhirnya di (...)

1343. BAWASLU: YEUW M FELIX TETHOOL [02:08:11]

Dan itu sudah selesai dilaksanakan di tingkat provinsi. Demikian, Yang Mulia yang dapat kami jelaskan.

1344. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:22]

Saya ke Ketua Bawaslu dulu, ya. Tadi Saudara menyatakan, bahwa di empat distrik ini Distrik Haju, Passue, Obaa dan Minyamur, ini ternyata tidak selesai, betul, ya?

1345. BAWASLU: MICAHEL MAIPEN [02:08:44]

Kalau untuk empat distrik itu yang ... untuk yang rekomendasi, ya, Yang Mulia?

1346. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:49]

Ya.

1347. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:08:50]

Untuk yang rekomendasi, itu belum selesai karena yang tadi sudah dijelaskan bahwa masih satu distrik masih melaksanakan pleno tingkat DPR RI.

1348. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:02]

Ya, soalnya tadi keterangan Saksi yang lain itu menyatakan bahwa Distrik Haju dan Passue itu sudah selesai. Ini pada waktu rekap di tingkat provinsi. Karena sudah dilakukan penghitungan suara ulang.

1349. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:09:20]

Yang dilakukan di provinsi adalah penyangkangan data.

1350. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:22]

Oh, itu hanya penyangkangan data.

1351. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:09:25]

Penyangkangan data untuk pengembalian.

1352. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:27]

Untuk pengembalian kepada suara yang benar. Jadi. Rekomendasi ini justru belum ditindaklanjuti sama sekali?

1353. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:09:32]

Ya.

1354. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:35]

Belum, ya. Kemudian, apakah ada di yang Ketua Bawaslu tahu bahwa ada TPS yang untuk suara DPR RI, DPD RI, dan Presiden itu tidak dibagi pada masyarakat?

1355. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:09:49]

Itu tidak dibagi. Itu maksudnya dibagi, kalau, kalau yang untuk itu untuk suara itu tidak dibagi kepada masyarakat, mekanisme pleno itu dilakukan pencoblosan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1356. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:02]

Bukan, tadi Saksi sebelumnya menyatakan bahwa ada di TPS-nya, itu yang tidak diberikan mereka, hanya dikasih untuk DPRD provinsi dan kabupaten.

1357. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:10:13]

Kalau untuk itu dari hasil pengawasan kami dari Panwas Distrik, menyampaikan bahwa untuk proses pencoblosan di TPS, itu dibagikan semua surat suara.

1358. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:23]

Jadi tidak benar, ya?

1359. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:10:26]

Ya.

1360. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:25]

Itu semua dibagi, ya?

1361. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:10:26]

Ya.

1362. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:27]

Oke. Baik, sementara cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

1363. KETUA: SUHARTOYO [02:10:33]

Dari Pemohon, ada pertanyaan satu, dua, ya Pak, ya.

1364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [02:10:35]

Oke. Baik, sedikit, Yang Mulia

1365. KETUA: SUHARTOYO [02:10:37]

Untuk siapa?

1366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [02:10:38]

Kepada Termohon KPU Provinsi dengan (...)

1367. KETUA: SUHARTOYO [02:10:43]

Silakan, disebut namanya Pak.

1368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [02:10:47]

Ibu Hence, ya? Ibu Hence, Bu, ya? Ibu Helda ... Hilda. Oke. Terima kasih. Begini, Bu, ya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa ada satu kesepakatan antara KPU Provinsi dengan Bawaslu. Nah, yang ... yang akan jadi pertanyaan kami adalah kesepakatan itu seperti apa? Dituangkan dalam bentuk apa? Dan apakah dalam hal ini kami, Partai Golkar dengan PAN itu dilibatkan atau tidak? Terus dari bukti yang kami ajukan di sini bahwa di Dapil 3 ini C.Hasil Salinan dan D.Hasil itu tidak diberikan. Ini sesuai dengan Rekomendasi Nomor 95 ini. Nah, tiba-tiba di situ ada PAN yang punya dan disandingkan.

Nah, terus selanjutnya yang dijadikan dasar acuan untuk melakukan ini, untuk melakukan koreksi ini PKPU atau yang lain lagi? Karena sepengetahuan kami kalau untuk adanya perbedaan di tingkat provinsi itu harusnya di ... di apa ... disandingkan dengan data yang ada di bawahnya.

1369. KETUA: SUHARTOYO [02:12:02]

Mungkin dalam bentuk pertanyaan, Pak. Apa, Pak?

1370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [02:12:03]

Nah, itu ya. Kesepakatannya tadi dalam bentuk apa? Untuk hal yang tadi itu Yang Mulia mohon diteruskan.

1371. KETUA: SUHARTOYO [02:12:11]

Ya. Ada, tahu, Ibu? Bisa jawab? Kesepakatan dalam bentuk apa, Bu?

1372. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:12:15]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan pertanyaan pertama, kesepakatan dalam bentuk apa? Izin, Yang Mulia, di sini pada saat pleno, kesepakatan bahwa ada keberatan dari saksi, saksi Partai PAN. Sehingga KPU bersama dengan Bawaslu sama-sama menyandingkan data. Jadi, kita sepakat untuk kita kembali melalui mekanisme rapat pleno untuk sandingkan data. Demikian, Yang Mulia. Lalu, izin, Yang Mulia, satu lagi.

1373. KETUA: SUHARTOYO [02:12:49]

Ya, silakan.

1374. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:12:51]

C.Hasil menurut laporan dari KPU Kabupaten Mappi bahwa C.Hasil dibagikan dan itu ditandatangani oleh saksi partai. Ya, D.Hasil dibagikan.

1375. KETUA: SUHARTOYO [02:13:01]

Masih ada?

1376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [02:13:02]

Yang Mulia, jadi kalau misalkan C.Hasil itu dibagikan, kami mohon melalui, Yang Mulia bahwa untuk meminta klarifikasi kepada Bawaslu, apakah Rekomendasi Nomor 95 ini benar karena di sini tertulis sehubungan dengan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua Selatan Dapil 3, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tingkat KPPS, saat melaksanakan penghitungan di TPS (...)

1377. KETUA: SUHARTOYO [02:13:30]

Ya. Nanti kami akan menilai dua rekomendasi itu, Pak. Tapi bukan, bukan berarti nanti akan harus disampaikan di ruang sidang ini. Tapi kalau Anda mau ... coba dijelaskan dulu soal rekomendasi tadi, dua rekomendasi itu. Apakah kemudian secara substansi, Pak, persoalan yang seharusnya di PSSU itu kemudian menjadi selesai karena tidak ada cukupnya waktu sebagai menjadi ... sebagaimana menjadi alasan rekomendasi kedua itu.

Ini kan, persoalannya secara substansi, kan, apakah sudah selesai? Bisa dijawab, Pak? Dari Provinsi atau dari Mappi, silakan yang mengeluarkan rekomendasi. Karena yang kedua ini kan alasannya karena tidak cukup waktu, keluarlah Rekomendasi 96. Nah, persoalan yang ada di 95, apakah kemudian tuntas, gitu, lho pertanyaan Pemohon, kan begitu.

1378. BAWASLU: MICHAEL MAIPEN [02:14:29]

Untuk yang 95, itu tuntas karena sudah dibagikan.

1379. KETUA: SUHARTOYO [02:14:34]

Apa yang dibagikan?

1380. BAWASLU: MICHAEL MAIPEN [02:14:37]

C.Salinan.

1381. BAWASLU: MICHAEL MAIPEN [02:14:39]

Yang menjadi dasar dikeluarkannya Rekomendasi 95 itu?

1382. BAWASLU: MICHAEL MAIPEN [02:14:43]

Ya.

1383. KETUA: SUHARTOYO [02:14:45]

Sudah ditindaklanjuti, maksudnya?

1384. BAWASLU: MICHAEL MAIPEN [02:14:45]

Ya, itu kan diminta untuk dibagikan. Agar (...)

1385. KETUA: SUHARTOYO [02:14:48]

Oke. Kenapa Bapak masih menggunakan alasan tetap dilanjutkan karena tidak ... keterbatasan waktu di 96? Kalau sudah selesai dipenuhi?

1386. BAWASLU: MICHAEL MAIPEN [02:14:59]

Diminta oleh KPU untuk dilanjutkan karena pada saat itu untuk waktu pelaksanaan, untuk per-distriknya itu membutuhkan waktu paling lama 2 minggu.

1387. KETUA: SUHARTOYO [02:15:12]

Ya, itu. Itu yang kemudian menjadi alasan 96, tapi secara substansi persoalan yang ada di Rekomendasi 95 sudah selesai belum?

1388. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:15:22]

Itu sudah selesai.

1389. KETUA: SUHARTOYO [02:15:24]

Sudah selesai. Apa yang ditanya dari Pemohon? Cukup ya, Pak?

1390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [02:15:27]

Begini, Yang Mulia. Jadi, kan tadi kan ada C, tiba-tiba ada C. Kita enggak punya C. Nah, di sini Bawaslu menyampaikan bahwa untuk Salinan C-1 Hasil dan D.Hasil itu tidak diberikan kepada saksi, gitu lho. Tapi dalam ini kan surat ini tanggal 1, ya (...)

1391. KETUA: SUHARTOYO [02:15:48]

Ada tidak, itu ada C yang tidak dibagikan ke ... Salinan yang di ... kepada saksi? Ada laporan tidak ke ... artinya, meskipun itu sudah berdasarkan Rekomendasi 95 sudah dipenuhi, faktualnya kan ada saksi yang belum mendapatkan itu, gimana Pak? Ada laporan berikutnya tidak bahwa itu ... laporan bahwa itu sudah ditindaklanjuti itu ternyata tidak sepenuhnya menurut Pemohon benar, menurut Pemohon. Ada laporan berikutnya enggak atau?

1392. BAWASLU: YEUW M FELIX TETHOOL [02:16:25]

Baik. Izin, Yang Mulia Majelis. Itu waktu rekomendasi tuh dikeluarkan karena posisi waktu selesai rapat pleno di tingkat TPS itu belum dibagikan sama pengawas TPS

1393. KETUA: SUHARTOYO [02:16:39]

Ya.

1394. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:16:39]

Sehingga waktu itu dipertimbangkan dan akhirnya dikeluarkan rekomendasi itu, tetapi itu dibagikan setelah setelah, setelah pleno penetapan di TPS itu.

1395. KETUA: SUHARTOYO [02:16:51]

Pak, ada pertanyaan lagi yang lain Pak, pertanyaannya, nanti enggak selesai-selesai nanti.

1396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [02:16:54]

Ini maaf, saya juga bingung dengan penjelasan tadi Pak Ketua Bawaslu, dibagikan setelah pleno di TPS. Maksudnya kan ini kan setelah, setelah pelaksanaan pemungutan suara ini, setelah rekapitulasi di apa namanya ... di TPS ini kan, yang ini, nih. Terus bagaimana mungkin setelah itu langsung dibagikan langsung, sehingga dijadikan dasar untuk ada kesepakatan. Begitu, Yang Mulia.

1397. KETUA: SUHARTOYO [02:17:13]

Ini kan, sebentar Pak. Rekomendasi 95 ini kan minta PSSU kan, penghitungan suara ulangan, kan? Ya, kan Pak? Bukan pemberian C kan, salinan C atau, kok kemudian setelah dipenuhi penyerahan C itu kan kemudian menjadi selesai. Untuk DPR RI, DPD, DPR Provinsi Dapil 3, Distrik Passue, Haju, Minyamur, dan Obaa.

1398. BAWASLU: MICAH EL MAIPEN [02:17:52]

Baik, Yang Mulia, untuk itu dikeluarkan untuk agar pada saat rekap perhitungan itu sehingga PPD bisa memberikan C.Salinan kepada saksi dan pengawas tingkat distrik.

1399. KETUA: SUHARTOYO [02:18:23]

Oke, Pak, nanti kami yang akan menilai. Bapak kan ini enggak akan ketemu, mau sampai sore pun juga akan ketemu argumen-argumen ini kan. Bapak masih ada pertanyaan atau tidak untuk?

1400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [02:18:33]

Itu tadi sebenarnya yang, yang tadi kan belum terjawab.

1401. KETUA: SUHARTOYO [02:18:39]

Ya, PSSU dijawab dengan C Pak, itu sudah selesai urusannya. Kami yang akan menilai nanti.

1402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [02:18:43]

Sama acuan yang digunakan itu aturannya di PKPU 5 itu yang mana kan begitu, Pak.

1403. KETUA: SUHARTOYO [02:18:49]

Kalau itu kan soal itu kan bisa dikaji bersama nanti mana yang benar kemudian mana yang menjadi pendapat Hakim. Sekarang Bapak masih ada pertanyaan yang lain?

1404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [02:18:59]

Baik. Ini, Yang Mulia, terkait ini saja tadi yang saksi kan, KTP tadi kan belum kami berikan, ini yang atas nama Emanuel Basagai.

1405. KETUA: SUHARTOYO [02:19:11]

Nanti diambil tuh petugas KTP, Pak. Baik, untuk Termohon ada pertanyaan? Cukup? Dari Pihak Terkait? Cukup, ya.

1406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:19:28]

Sedikit dari kami PKB, Yang Mulia.

1407. KETUA: SUHARTOYO [02:19:28]

Silakan Pak, untuk Saksi siapa?

1408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:19:33]

Terima kasih. Yang pertama untuk Saksi Maksimus, dari Pemohon, Yang Mulia. Pak Maksimus, Pak Saksi.

1409. KETUA: SUHARTOYO [02:19:46]

Petugas kita mana ya, sebentar Pak. Ini di ruang sidang ini mesti harus ada petugas nih. Petugas yang bantu di ruang sidang. Dibantu Mas itu Mas. Terus supaya ada petugas yang stand by di sini. Jadi, tidak harus mencari-cari. Silakan, dari Pihak Terkait.

1410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:20:09]

Izin, Yang Mulia. Kami ulang.

1411. KETUA: SUHARTOYO [02:20:09]

Untuk? Untuk?

1412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:20:09]

Izin, Yang Mulia, kami ulang. Pertanyaan pertama untuk Saksi M. Nur Aan. Saksi (...)

1413. KETUA: SUHARTOYO [02:20:17]

Silakan.

1414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:20:20]

Kepada Saksi, tadi Saksi menjelaskan bahwa Saksi merupakan saksi mandat di tingkat Provinsi untuk Partai Golkar. Kami perlu tegaskan di sini bahwa (...)

1415. KETUA: SUHARTOYO [02:20:32]

Pertanyaan saja, tidak usah menegaskan.

1416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:20:33]

Pertanyaannya tadi, Saudara Saksi menyatakan bahwa Saksi telah menulis atau mengisi Form Keberatan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi. Nah, tapi di keterangan Saksi ini, kami belum mendapatkan ketegasan. Apakah karena kami ... apabila kami sandingkan dengan bukti yang ada, apakah keberatan yang Saudara Saksi lakukan itu ... Saudara Saksi submit atau serahkan ke petugas penyelenggara dalam hal ini? Terima kasih.

1417. KETUA: SUHARTOYO [02:21:10]

Pak Nur?

1418. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOHAMAD NUR AAN LA DJAHARIA [02:21:11]

Pada saat itu kami serahkan, Pak.

1419. KETUA: SUHARTOYO [02:21:13]

Serahkan, oke. Cukup?

1420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:21:18]

Karena mohon, mohon izin, Yang Mulia.

1421. KETUA: SUHARTOYO [02:21:19]

Ya, sudah diserahkan. Kalau Bapak punya bukti lain, itu nanti kan kami yang akan apa ... mempertimbangkan. Kalau (...)

1422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:21:27]

Baik, Yang Mulia.

1423. KETUA: SUHARTOYO [02:21:27]

Bapak kan juga enggak tahu bahwa dia menyerahkan atau tidak. Tapi pengakuan di persidangan, di bawah sumpah, diserahkan. Pertanyaan yang lain, ada?

1424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:21:33]

Baik. Karena berdasarkan ... karena berdasarkan bukti yang ada, kami lihat bahwa tidak ada penyerahan terkait dengan bukti itu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1425. KETUA: SUHARTOYO [02:21:40]

Ya. Ya. Oke.

1426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:21:42]

Terus, yang kedua. Karena Bapak merupakan Saksi di tingkat Provinsi itu, tentunya bukan hanya untuk Kabupaten Mappi, ya. Untuk Kabupaten Asmat, apakah Bapak juga menyampaikan keberatan atau ada keberatan terkait dengan rekapitulasi terhadap Kabupaten Asmat? Terima kasih, Yang Mulia.

1427. KETUA: SUHARTOYO [02:22:06]

Silakan.

1428.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOHAMAD NUR AAN LA DJAHARIA [02:22:06]

Ya, baik. Pada saat itu kami hanya sebagai saksi (...)

1429.KETUA: SUHARTOYO [02:22:10]

Di?

1430.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOHAMAD NUR AAN LA DJAHARIA [02:22:10]

Untuk tingkat provinsi di sidang pleno untuk Kabupaten Mappi, Pak.

1431.KETUA: SUHARTOYO [02:22:15]

Baik. Cukup, Pak? Cukup, ya?

1432.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:22:19]

Oh, ya. Baik, Pak Yang Mulia.

1433.KETUA: SUHARTOYO [02:22:20]

Baik. Terima kasih.

1434.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:22:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

1435.KETUA: SUHARTOYO [02:22:22]

Jadi, untuk Perkara 264 ini, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan 6 dan P-1 sampai 8. Ini bukti tambahan, ya?

1436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [02:23:42]

Benar, Yang Mulia, bukti tambahan.

1437. KETUA: SUHARTOYO [02:22:43]

Kemudian Termohon, T-12 sampai dengan T-15. Pihak Terkait PKB, PT-3 sampai dengan PT-32. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk Perkara 264, dianggap cukup. Dan terima kasih kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu yang berkaitan dan kepada Para Saksi terima kasih sudah memberi keterangan. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan Putusan Perkara 264 ini. Silakan, boleh meninggalkan ruangan.

Kemudian saya ... kami panggil berikutnya untuk Perkara 267. 267 dari Partai Kebangkitan Bangsa tidak mengajukan saksi. Tapi Termohon mengajukan saksi 3, harap ke depan Hironimus Markus, Helda Richarda. Apakah masih sama ini?

1438. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:23:52]

Masih sama, Yang Mulia.

1439. KETUA: SUHARTOYO [02:23:54]

Masih sama, baik. Kemudian Aloysia juga masih sama. Kemudian dari Pihak Terkait tidak mengajukan dan Bawaslu juga tidak.

Baik. Kalau begitu tidak ada yang perlu dilakukan penyempahan untuk 267 ini. Kami langsung ke Saksi Termohon Hironimus masih aktif, ya anggota KPU-nya?

1440. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:24:32]

Baik. Yang Mulia, masih aktif.

1441. KETUA: SUHARTOYO [02:24:35]

Masih aktif. Bapak mau menjelaskan apa?

1442. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:24:37]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya di sini menjelaskan terkait rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, itu dilaksanakan pada tanggal 9 Maret, kemudian dalam rapat penetapan ... rapat pleno penetapan, setelah ditetapkan ada keberatan dari Partai PDIP, keberatan terkait Dapil 1 dan Dapil 3.

Kemudian terkait keberatan itu, diisilah Form D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi yang dilanjutkan di pleno tingkat provinsi. Pleno tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Maret di Merauke.

Pada saat pleno tingkat Provinsi KPU Kabupaten Asmat, membacakan hasil rekapitulasi, kemudian membacakan Form Keberatan atau Kejadian Khusus, dimana keberatan atau kejadian khusus itu dari Dapil 1 dan Dapil 3 untuk ... dari Partai PDIP. Nah, kemudian (...)

1443. KETUA: SUHARTOYO [02:25:59]

Dari siapa yang keberatan?

1444. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:26:01]

Partai PDIP.

1445. KETUA: SUHARTOYO [02:26:05]

Waktu pleno di tingkat provinsi, ya?

1446. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:26:07]

Waktu pleno di tingkat kabupaten (...)

1447. KETUA: SUHARTOYO [02:26:08]

Kabupaten

1448. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:26:09]

Sudah ada keberatan.

1449. KETUA: SUHARTOYO [02:26:11]

Ada keberatan dari?

1450. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:26:12]

Partai PDIP.

1451. KETUA: SUHARTOYO [02:26:14]

PDIP. PDIP kan, ya, Pak? PDIP, kan?

1452. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:26:19]

PDIP.

1453. KETUA: SUHARTOYO [02:26:20]

Apa keberatannya?

1454. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:26:22]

Keberatannya mereka merasa kehilangan satu kursi di Dapil 3 dan Dapil 1 ... Dapil 3.

1455. KETUA: SUHARTOYO [02:26:32]

Untuk anggota DPR?

1456. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:26:34]

Anggota DPRD Kabupaten.

1457. KETUA: SUHARTOYO [02:26:44]

Oke. Terus apa lagi keberatan PDIP?

1458. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:26:48]

Kalau untuk keberatan PDIP di Dapil 3 (...)

1459. KETUA: SUHARTOYO [02:26:52]

Nah, yang tadi keberatan yang mana tadi?

1460. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:26:55]

Yang Dapil 3, DPRD Kabupaten.

1461. KETUA: SUHARTOYO [02:26:57]

PDIP, kan?

1462. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:26:58]

Ya, PDIP.

1463. KETUA: SUHARTOYO [02:26:59]

Nah, terus yang kedua, PDIP juga?

1464. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:27:01]

Yang kedua, Dapil 1.

1465. KETUA: SUHARTOYO [02:27:03]

Oh, Dapil. Tapi Dapil 2 ... tadi Dapil 2?

1466. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:27:09]

Dapil 1 dan Dapil 3 ... Dapil 3

1467. KETUA: SUHARTOYO [02:27:12]

Oke. Yang tadi Dapil 3?

1468. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:27:13]

Ya.

1469. KETUA: SUHARTOYO [02:27:13]

Sekarang Dapil 1?

1470. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:27:16]

Yang ini, Dapil 3.

1471. KETUA: SUHARTOYO [02:27:18]

Sekarang Dapil 3?

1472. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:27:19]

Dapil 3, ya.

1473. KETUA: SUHARTOYO [02:27:20]

Mengenai apa ini?

1474. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:27:21]

Mereka merasa kehilangan kursi di Dapil 3.

1475. KETUA: SUHARTOYO [02:27:24]

Di Dapil 1?

1476. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:27:25]

Dapil 3, di Dapil 3.

1477. KETUA: SUHARTOYO [02:27:27]

Di Dapil 1, mengenai apa?

1478. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:27:30]

Sama.

1479. KETUA: SUHARTOYO [02:27:30]

Sama?

1480. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:27:31]

Ya, sama.

1481. KETUA: SUHARTOYO [02:27:34]

Disebabkan karena apa, Pak? Dia (...)

1482. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:27:40]

Kalau di keberatan, mereka sampaikan bahwa mereka kehilangan kursi ... apa (...)

1483. KETUA: SUHARTOYO [02:27:46]

Hanya begitu saja?

1484. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:27:47]

Ya, merasa kehilangan kursi.

1485. KETUA: SUHARTOYO [02:27:48]

Kehilangan kursi itu dalam bentuk seperti apa? Rinciannya ada, tidak? Apa hanya lapor saya kehilangan kursi begitu saja atukah? Karena ada ... bagaimana?

1486. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:28:00]

Mereka merasa apa ... ada perselisihan hasil di ... yang khusus Dapil 3, ada perselisihan hasil.

1487. KETUA: SUHARTOYO [02:28:10]

Ya. Rinciannya apa, detailnya seperti apa, Pak? Perselisihan hasil itu seperti apa atau?

1488. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:28:16]

Nah. Rinciannya, rinciannya terkait (...)

1489. KETUA: SUHARTOYO [02:28:19]

Coba Saksi yang lainlah. Bapak tanya kanan, kiri sepertinya malah tidak (...)

1490. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:28:23]

Kalau untuk Dapil 3, rinciannya itu partai ... izin, Yang Mulia.

1491. KETUA: SUHARTOYO [02:28:30]

Ya. Silakan, Pak.

1492. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:28:30]

Partai PDIP merasa bahwa hasil yang didapat oleh Partai PKB itu didapat dari suaranya Partai Nasdem.

1493. KETUA: SUHARTOYO [02:28:40]

Hasil suara PKB didapat dari suaranya Nasdem?

1494. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:28:44]

Partai Nasdem dan suara Partai PSI.

1495. KETUA: SUHARTOYO [02:28:49]

Kok yang keberatan bukan PKB? Karena PKB sudah merasa aman, begitu?

1496. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:28:50]

Ya, Pak.

1497. KETUA: SUHARTOYO [02:28:59]

Tapi PKB malah menggugat hari ini.

1498. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:29:06]

Jadi, waktu pada pleno rekapitulasi penetapan tingkat kabupaten itu (...)

1499. KETUA: SUHARTOYO [02:29:10]

Ya.

1500. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:29:11]

Itu yang melakukan keberatan Partai PDIP.

1501. KETUA: SUHARTOYO [02:29:16]

PDIP karena kehilangan kursi.

1502. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:29:18]

Kehilangan kursi.

1503. KETUA: SUHARTOYO [02:29:19]

Yang dia seharusnya mendapatkan kursi.

1504. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:29:22]

Ya.

1505. KETUA: SUHARTOYO [02:29:22]

Ya. Yang secara faktual, yang dapat kursi malah PKB, gitu?

1506. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:29:29]

Penetapan yang ditetapkan, PKB yang mendapat kursi.

1507. KETUA: SUHARTOYO [02:29:34]

Ya. Yang itu kata PDIP itu, PKB mendapatkan suara kursi dari suara?

1508. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:29:44]

Dari suara Nasdem.

1509. KETUA: SUHARTOYO [02:29:47]

Nasdem. Apa lagi yang mau dijelaskan? Itu saja?

1510. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:29:50]

Baik. Kemudian di tanggal 13, setelah pembacaan keberatan saksi, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menyampaikan bahwa mereka akan berkoordinasi untuk (...)

1511. KETUA: SUHARTOYO [02:30:07]

Ini di provinsi?

1512. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:30:09]

Ya, di tingkat pleno tingkat provinsi.

1513. KETUA: SUHARTOYO [02:30:11]

Ya.

1514. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:30:13]

Bawaslu Provinsi Papua Selatan menyampaikan bahwa atas pembacaan keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menyampaikan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu RI untuk tindak lanjut dari keberatan tersebut.

1515. KETUA: SUHARTOYO [02:30:30]

Kenapa kok baru di tingkat provinsi kemudian akan ditindaklanjuti, bukan ketika di kabupaten? Di kabupaten keberatannya itu kemudian dituangkan dalam bentuk apa, Pak?

1516. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:30:43]

Dituangkan ke dalam D.Kejadian Khusus.

1517. KETUA: SUHARTOYO [02:30:48]

Kejadian Khusus. Kemudian ketika di provinsi?

1518. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:30:52]

Di provinsi, KPU kabupaten menyampaikan membacakan D.Kejadian Khusus tersebut dalam pleno rekapitulasi tingkat provinsi.

1519. KETUA: SUHARTOYO [02:31:00]

Akan ditindaklanjuti di mana keberatan yang di tingkat kabupaten tadi?

1520. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:31:05]

Jadi, pada saat itu Bawaslu provinsi menyampaikan bahwa mereka akan berkoordinasi (...)

1521. KETUA: SUHARTOYO [02:31:12]

Bawaslu RI?

1522. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:31:13]

Ya dengan Bawaslu RI.

1523. KETUA: SUHARTOYO [02:31:14]

Terus?

1524. SAKSI TERMOHON: HIRONIMUS MARKUS FOFID [02:31:15]

Di tanggal 15, di tanggal 15, KPU Kabupaten Asmat mendapat rekomendasi mendapatkan surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi, itu tanggal ... surat Bawaslu Provinsi itu per tanggal 13, Nomor Surat Rekomendasi 016.

Kemudian, di tanggal 15 itu kami KPU Kabupaten Asmat, berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.

1525. KETUA: SUHARTOYO [02:32:06]

Sudah Bapak toleh kanan toleh kiri, malah meragukan Hakim jadinya. Bu, ini apa yang mau diceritakan? Bu Helda.

1526. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:32:24]

Ya. Izin, Yang Mulia. Terkait dengan Asmat Dapil 3 pada pleno tingkat provinsi, itu ada keberatan dari Partai PDIP.

1527. KETUA: SUHARTOYO [02:32:39]

Di tingkat provinsi, ya?

1528. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:32:40]

Benar, Yang Mulia.

1529. KETUA: SUHARTOYO [02:32:42]

Keberatannya tentang apa Ibu?

1530. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:32:43]

Keberatannya indikasi suara PKB bertambah, sehingga potensi kursi PDIP hilang. Itu keberatan yang disampaikan oleh PDIP terkait dengan Asmat Dapil 3. Sehingga, selain juga berkeberatan kepada ... pada saat

rapat pleno, juga PDIP membuat laporan ke Bawaslu terkait dengan hal ini.

Maka setelah itu, kami Bawaslu dan KPU ada lakukan rapat koordinasi terkait hal ini, sehingga pada tanggal ... Bawaslu mengeluarkan rekomendasi terkait dengan penetapan di Kabupaten Asmat, itu terindikasi bahwa PKB yang memperoleh kursi untuk Dapil 3.

Tetapi yang sebenarnya menurut PDIP, harusnya itu kursi PDIP. Ada indikasi suara PKB itu ditambah oleh teman-teman di tingkat bawah, sehingga mereka melakukan keberatan. Maka dengan adanya koordinasi antara KPU Bawaslu dan mungkin Bawaslu mendapat arahan dari pimpinan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Asmat untuk mengoreksi hasil rekapitulasi ... hasil rekapitulasi yang menetapkan suara PKB dikembalikan ke suara asal.

1531. KETUA: SUHARTOYO [02:34:24]

Ini yang dari Dapil 3 itu, ya?

1532. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:34:26]

Benar, Yang Mulia.

1533. KETUA: SUHARTOYO [02:34:28]

Sudah dilakukan belum?

1534. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:34:30]

Teman-teman Asmat sudah tindak lanjuti di tanggal 17.

1535. KETUA: SUHARTOYO [02:34:34]

17 Maret?

1536. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:34:36]

Benar, Yang Mulia.

1537. KETUA: SUHARTOYO [02:34:45]

Saksi Aloysia, apa yang mau disampaikan di ... berkaitan dengan Kabupaten Asmat ini?

1538. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:34:54]

Berkaitan dengan Kabupaten Asmat, yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan oleh Pimpinan Ibu Helda.

1539. KETUA: SUHARTOYO [02:35:03]

Ada tambahan tidak?

1540. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:35:05]

Tidak ada tambahan, Pimpinan.

1541. KETUA: SUHARTOYO [02:35:08]

Itu yang rekomendasi dari Bawaslu provinsi sudah ditindaklanjuti?

1542. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:35:13]

Siap, sudah.

1543. KETUA: SUHARTOYO [02:35:15]

Apa bentuknya? Untuk segera melakukan perbaikan data dan menyesuaikan hasil.

1544. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:35:25]

Ya. Kita melaksanakan perbaikan data.

1545. KETUA: SUHARTOYO [02:35:28]

Perbaikan data itu bagaimana cara actionnya? Tindakannya seperti apa Ibu?

1546. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:35:39]

Menyesuaikan dengan D.Hasil dan C.Hasil.

1547. KETUA: SUHARTOYO [02:35:43]

C.Hasil dan?

1548. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:35:44]

D.Hasil kecamatan.

1549. KETUA: SUHARTOYO [02:35:47]

Untuk Dapil 3 itu mana saja?

1550. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:35:51]

Dapil 3 itu untuk Distrik Ayip dan Koroway.

1551. KETUA: SUHARTOYO [02:35:55]

Dua-duanya sudah dilakukan ini?

1552. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:35:58]

Siap, sudah.

1553. KETUA: SUHARTOYO [02:35:59]

Sudah?

1554. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:36:00]

Sudah.

1555. KETUA: SUHARTOYO [02:36:00]

Apa dituangkan dalam bentuk Berita Acara atau apa?

1556. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:36:05]

Dituangkan dalam bentuk D.Hasil kabupaten.

1557. KETUA: SUHARTOYO [02:36:11]

Bukan. Tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu ini, kata Ibu kan sudah ditindaklanjuti. Dituangkan dalam Berita Acara tidak?

1558. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:36:22]

Ya, dituangkan dalam Berita Acara.

1559. KETUA: SUHARTOYO [02:36:25]

Dituangkan?

1560. SAKSI TERMOHON: ALOYSIA HAHARE [02:36:22]

Siap.

1561. KETUA: SUHARTOYO [02:36:23]

Dijadikan bukti tidak? Dijadikan bukti enggak oleh Pemohon ...
Kuasa Hukum?

**1562. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF PURNAMA AGUNG
[02:36:36]**

Dijadikan bukti, Yang Mulia.

1563. KETUA: SUHARTOYO [02:36:35]

T berapa?

**1564. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF PURNAMA AGUNG
[02:36:39]**

Untuk D.Hasil kabupaten tertanggal 17 Maret (...)

1565. KETUA: SUHARTOYO [02:36:40]

Yang adanya perbaikan itu?

**1566. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF PURNAMA AGUNG
[02:36:46]**

Ya. Pada T-2, Yang Mulia.

1567. KETUA: SUHARTOYO [02:36:46]

T-2, ya? Dari Bawaslu ada komentar ini soal ini? Coba.

1568. BAWASLU: YEOW M FELIX TETHOOL [02:36:58]

Terima kasih, Yang Mulia, Majelis. Pada tanggal berapa, ya ...
waktu pleno tingkat provinsi, itu sebenarnya persoalan yang terjadi di
kabupaten. Kemudian, tidak terselesaikan.

1569. KETUA: SUHARTOYO [02:37:14]

Ya.

1570. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:37:14]

Lalu, dibawa pada pleno tingkat di atasnya. Saat pleno tingkat provinsi itu, memang ada keberatan dari PDI Perjuangan, kemudian juga ada penyandingan data di sana. Penyandingan data di sana ternyata memang hasil dari penyandingan data itu, menunjukkan fakta bahwa D.Hasil dari distrik itu, dia tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kabupaten. Sehingga, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi saat itu untuk KPU Kabupaten Asmat memperbaiki data yang salah.

1571. KETUA: SUHARTOYO [02:37:37]

Ini sudah ada laporan, sudah dilakukan belum?

1572. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:37:46]

Sudah dilakukan, Yang Mulia.

1573. KETUA: SUHARTOYO [02:37:48]

Sudah?

1574. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:37:50]

Siap, sudah.

1575. KETUA: SUHARTOYO [02:37:48]

Bentuknya apa laporan ke Bapak, ke Bawaslu?

1576. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:37:50]

Yang untuk tindak lanjut?

1577. KETUA: SUHARTOYO [02:37:51]

Bukan. Laporrannya, bentuknya apa?

1578. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:37:55]

Di saat pleno saat itu, Yang Mulia. Saat pleno provinsi.

1579. KETUA: SUHARTOYO [02:37:56]

Sudah di ... memang pleno tanggal berapa, Pak?

1580. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:38:03]

Pleno waktu untuk Kabupaten Asmat itu, kalau tidak salah tanggal 13 atau 14, ya? 13 Maret, kalau tidak salah.

1581. KETUA: SUHARTOYO [02:38:10]

Di tingkat provinsi?

1582. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:38:09]

Untuk di tingkat provinsi, untuk Kabupaten Asmat.

1583. KETUA: SUHARTOYO [02:38:15]

Di 13 Maret? Tanggal berapa, Pak?

1584. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:38:21]

Tanggal 13 atau 14 Maret, saya lupa, Yang Mulia. Tapi waktu itu, keberatan itu disampaikan. Kemudian ada penyandingan data di sana, lalu ditemukan adanya ketidaksesuaian data, lalu Bawaslu provinsi mengeluarkan rekomendasi untuk memperbaiki. Itu sepertinya di hari terakhir ... di hari terakhir pleno tingkat provinsi.

1585. KETUA: SUHARTOYO [02:38:37]

Ini rekomendasi (...)

1586. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:38:49]

Yang tanggal 17 itu baru ditindaklanjuti rekomendasinya, Yang Mulia.

1587. KETUA: SUHARTOYO [02:38:52]

Yang Rekomendasi 016 ini, Pak, ini dikeluarkan tanggal berapa? Yang ... Bapak keluarkan rekomendasi berapa kali?

1588. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:39:07]

Satu kali saja, Yang Mulia.

1589. KETUA: SUHARTOYO [02:39:07]

Yang 016 ini, bukan?

1590. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:39:09]

Ya, yang Rekomendasi 16 itu yang dikeluarkan untuk memperbaiki data.

1591. KETUA: SUHARTOYO [02:39:13]

16. Itu dibuat tanggal berapa?

1592. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:39:18]

Izin, Yang Mulia. Saya lupa waktu itu dikeluarkan tanggal berapa.

1593. KETUA: SUHARTOYO [02:39:23]

Bapak enggak punya dokumennya ini. Ini kan, Bapak yang keluarkan. Ini kan krusial, penting. Jadi, kalau sidang kan disiapkan yang seperti ini. Ini kan yang akan ditanyakan oleh Hakim, oleh Para Pihak itu adalah persoalan-persoalannya.

1594. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:39:39]

Izin, Yang Mulia. Baru di (...)

1595. KETUA: SUHARTOYO [02:39:41]

Tanggal berapa itu? Di PK-8 ... 389 itu dilihat, ini Bapak yang menyampaikan sendiri jadi bukti kok. Ini karena (...)

1596. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:40:16]

Tanggal 10 Maret ... 13, 13, Izin, Yang Mulia

1597. KETUA: SUHARTOYO [02:40:29]

13 kan. Karena ini enggak jelas kami tanyakan itu karena tertimpa cap itu kan sama tanda tangan.

1598. BAWASLU: YEUW M FELIX TETHOOL [02:40:37]

Ya. 13 Maret, Yang Mulia.

1599. KETUA: SUHARTOYO [02:40:35]

Yeuw M Felix Tethool mana? Bapak?

1600. BAWASLU: YEUW M FELIX TETHOOL [02:40:35]

Izin, Saya sendiri, Yang Mulia.

1601. KETUA: SUHARTOYO [02:40:44]

Ya, ini tanda tangannya kena tanggal itu, jadi (...)

1602. BAWASLU: YEUW M FELIX TETHOOL [02:40:44]

13 Maret 2000 (...)

1603. KETUA: SUHARTOYO [02:40:45]

Apa 1 maret? atau?

1604. BAWASLU: YEUW M FELIX TETHOOL [02:40:46]

13.

1605. KETUA: SUHARTOYO [02:40:47]

13, ya?

1606. BAWASLU: YEUW M FELIX TETHOOL [02:40:47]

Ya.

1607. KETUA: SUHARTOYO [02:40:52]

Sedangkan pleno di tingkat provinsi kapan?

1608. BAWASLU: YEUW M FELIX TETHOOL [02:40:54]

Yang pada tanggal 13 itu, Yang Mulia.

1609. KETUA: SUHARTOYO [02:40:53]

13. Nah ini kapan ditindaklanjuti kalau begitu? Dikeluarkan (...)

1610. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:40:57]

Tanggal 17 baru ditindaklanjuti.

1611. KETUA: SUHARTOYO [02:41:01]

Hah?

1612. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:41:02]

Tanggal 17 baru ditindaklanjuti.

1613. KETUA: SUHARTOYO [02:41:04]

Oh tanggal 17, berarti setelah pleno provinsi selesai?

1614. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:41:06]

Setelah pleno provinsi selesai, tapi rekomendasi itu dikeluarkan hari itu juga saat selesai ... saat pleno, ya tanggal 13 itu.

1615. KETUA: SUHARTOYO [02:41:06]

Ya tanggal 13 itu. Lapornya dijadikan bukti enggak PK berapa? Laporan sudah ditindaklanjuti.

1616. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:41:15]

Itu (...)

1617. KETUA: SUHARTOYO [02:41:21]

Laporan dari KPU-nya?

1618. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:41:26]

Ini di PK-3810.

1619. KETUA: SUHARTOYO [02:41:31]

PK?

1620. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:41:33]

3810.

1621. KETUA: SUHARTOYO [02:41:36]

3810. Rekomendasi PK-389, ya?

1622. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:42:36]

Ya.

1623. KETUA: SUHARTOYO [02:42:22]

Ini kan baru rencana mau dilaksanakan, hasilnya sudah dilaksanakan Pak?

1624. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:42:31]

Sudah dilaksanakan dan waktu itu rekomendasi itu dilakukan kami sementara mengikuti pleno di tingkat nasional.

1625. KETUA: SUHARTOYO [02:42:36]

Bukti T berapa? Bukti Berita Acara pelaksanaan rekomendasi ini?

1626. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF PURNAMA AGUNG [02:42:46]

T-2 Yang Mulia.

1627. KETUA: SUHARTOYO [02:42:43]

T-2?

1628. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF PURNAMA AGUNG [02:42:47]

Ya, di T-2.

1629. KETUA: SUHARTOYO [02:42:54]

Oh, langsung di-input gitu, bukan dalam bentuk?

1630. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:42:57]

Izin menambahkan keterangan.

1631. KETUA: SUHARTOYO [02:42:59]

Ya.

1632. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:43:05]

Terima kasih. Jadi, pada rekapitulasi tingkat kabupaten, untuk DPRD Kabupaten Asmat, khususnya Dapil 3, pada awalnya pada D.Hasil Kabupaten yang ditetapkan tanggal 9 Maret, suara PKB itu 1.922. Kemudian suara Nasdem itu 424.

Pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, saksi dari PDIP mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara dua partai tersebut. Kalau untuk suaranya PDIP tidak ada keberatan karena konsisten suaranya tetap. Itu pada formulir, eh sori, pada alat Bukti T apa namanya ... T-4 kami dari Termohon, keberatannya PDIP tersebut.

1633. KETUA: SUHARTOYO [02:43:52]

Ya karena PKB mendapatkan suara dari Nasdem tadi.

1634. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:43:52]

Nasdem, betul. Dan kemudian pada saat rekapitulasi tingkat provinsi, teman-teman Bawaslu mengirim Surat Rekomendasi Nomor 16 tersebut tanggal 13 Maret.

1635. KETUA: SUHARTOYO [02:44:02]

Ya.

1636. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:44:11]

Dan berdasarkan penyandingan data, kemudian ditemukan bahwa yang benar dari suara PKB yang semula terdokumentasi dalam Formulir D.Hasil Kabupaten 9 Maret itu, 1.922, yang benar adalah 1.449. Jadi (...)

1637. KETUA: SUHARTOYO [02:44:26]

1.449 untuk?

1638. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:44:24]

PKB.

1639. KETUA: SUHARTOYO [02:44:24]

PKB.

1640. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:44:27]

Kemudian, untuk Nasdem yang semula 424 itu terkoreksi menjadi 797. Maka dengan demikian, PKB yang semula punya potensi memperoleh kursi, mengajukan gugatan ini karena kan Pemohonnya adalah PKB yang kemudian terkoreksi atas keberatan (...)

1641. KETUA: SUHARTOYO [02:44:50]

Karena berpotensi kemudian kehilangan.

1642. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:44:53]

Betul, maka mengajukan ini. Demikian, Majelis. Jadi, pada dasarnya hasil koreksi penyandingan (...)

1643. KETUA: SUHARTOYO [02:44:55]

Tapi ya Rekomendasi 16 itu artinya sudah dilaksanakan.

1644. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:45:01]

Sudah dilaksanakan, dituangkan dalam Formulir D. Hasil Kabupaten yang diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2024 oleh KPU Kabupaten Asmat. Demikian.

1645. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:14]

Baik. Terima kasih. Ini saya konfirmasi dulu, ya. Ini, Perkara 267 ini terkait dengan 271 tadi ya, Bu Helda?

1646. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:45:31]

Izin.

1647. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:29]

Yang di 271 kan ada Dapil 1 dan Dapil 3 yang bermasalah.

1648. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:45:34]

Ya, benar. Itu D.Keberatannya 1, Dapil 1, dan Dapil 3.

1649. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:37]

Oke. Nah, di dalam Posita ini Pemohon menyatakan bahwa ada 2 kali rapat pleno. Rapat pleno tanggal 9 Maret itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Hasyim itu, itu kan suara PKB itu tinggi, tapi pada waktu yang tanggal 17 itu berkurang. Kalau di dalam permohonan ini itu justru suara PKB itu berkurang ke Nasdem dan juga PSI, ya. Ada PSI 100. Tadi tidak sempat dijelaskan, untuk Nasdem itu ada penambahan 373 suara.

Nah, Ibu bisa jelaskan pleno tanggal 9 itu, yang kemudian terakhir tanggal 17 itu karena rekomendasi Bawaslu atau bukan?

1650. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:46:45]

Izin, Yang Mulia. Pleno tanggal 9 itu di tingkat KPU Kabupaten Asmat, khusus (...)

1651. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:51]

Itu tanggal 9 di Asmat?

1652. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:46:53]

Ya.

1653. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:54]

Oke.

1654. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:46:55]

Lalu untuk (...)

1655. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:56]

17 itu di provinsi?

1656. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:46:57]

Diadakan di ibu kota provinsi, ibu kota provinsi, tetapi dilakukan oleh KPU Asmat.

1657. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:04]

Oh, jadi KPU Asmat 2 kali? Tempatnya berbeda ya, kalau boleh dikatakan seperti itu?

1658. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:47:10]

Tempatnya berbeda.

1659. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:12]

Yang pertama di Kabupaten Asmat?

1660. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:47:15]

Benar.

1661. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:16]

Yang kedua di ibu kota provinsi?

1662. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:47:18]

Benar.

1663. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:16]

Tanggal 17?

1664. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:47:18]

Tanggal 17.

1665. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:19]

Nah, itu 17 itu karena ada rekomendasi Bawaslu tadi, ya?

1666. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:47:22]

Ada rekomendasi Bawaslu tadi.

1667. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:23]

Rekomendasi.

1668. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:47:24]

Benar.

1669. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:24]

Oke, baik. Jadi kalau mengacu pada rekap tanggal 9, maka Nasdem dapat 1 ... PKB ya, PKB yang dapat 1?

1670. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:47:28]

PKB, ya.

1671. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:32]

Tapi kalau untuk tanggal 17 justru kehilangan?

1672. SAKSI TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [02:47:42]

Benar, Yang Mulia.

1673. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:43]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1674. KETUA: SUHARTOYO [02:47:48]

Yang Mulia, ada pertanyaan? Cukup? Dari PKB, Pemohon ada pertanyaan, Pak. Satu, dua pertanyaan untuk Saksi Termohon?

1675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:47:57]

Baik. Izin, Yang Mulia.

1676. KETUA: SUHARTOYO [02:47:58]

Silakan.

1677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:47:59]

Kami dari Pemohon Perkara 267 akan bertanya kepada Bawaslu.

1678. KETUA: SUHARTOYO [02:48:04]

Kalau Bawaslu ke kami, Pak karena Bawaslu bukan saksi, pihak dia.

1679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:48:07]

Baik.

1680. KETUA: SUHARTOYO [02:48:07]

Lewat kami, Pak nanti kami teruskan.

1681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:48:11]

Baik.

1682. KETUA: SUHARTOYO [02:48:11]

Boleh, Pak, silakan.

1683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:48:12]

Izin Yang Mulia, tadi Bawaslu menyampaikan rekomendasi di tingkat kabupaten.

1684. KETUA: SUHARTOYO [02:48:17]

Ya.

1685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:48:21]

Di tingkat provinsi, suara PKB dengan adanya rekomendasi pleno revisi itu menjadi kehilangan kursi. Kemudian, Bawaslu menjelaskan di tingkat kabupaten itu hasilnya apa? Karena pleno awal, PKB mendapatkan kursi, 3 kursi untuk PDIP dan 1 kursi untuk PKB di Asmat 3.

1686. KETUA: SUHARTOYO [02:48:52]

Ya.

1687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:48:55]

Tapi kemudian Bawaslu merekomendasikan untuk pleno revisi yang mengakibatkan kerugian dari pihak (...)

1688. KETUA: SUHARTOYO [02:49:06]

Ya, pertanyaan Bapak, apa?

1689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:49:07]

Pertanyaan saya, hasilnya apa pada waktu itu? Hasilnya apa pada waktu itu?

1690. KETUA: SUHARTOYO [02:49:11]

Ya, bisa dijawab, Pak, hasil daripada setelah ada rekomendasi Bapak itu.

1691. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:49:18]

Izin Yang Mulia. Itu sudah ada pada Bukti Pemberi Keterangan, Bukti PK-3812, yang Berita Acara Perbaikan.

1692. KETUA: SUHARTOYO [02:49:25]

Ya, Bapak bisa jelaskan? Bisa dijelaskan Pak? Artinya, apa betul kemudian suaranya PKB menjadi turun, sehingga (...)

1693. BAWASLU: YE UW M FELIX TETHOOL [02:49:35]

Benar, benar, Yang Mulia. Bahwa akibat dari rekomendasi itu, akhirnya dalam data perbaikan, perbaikan dari data yang disampaikan ... dihasilkan oleh Bawaslu ... KPU Kabupaten Asmat, maka suara PKB berkurang. Demikian, Yang Mulia yang dapat saya jelaskan.

1694. KETUA: SUHARTOYO [02:49:50]

Ada pertanyaan berikut?

1695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:49:51]

Baik, Yang Mulia karena pada waktu pleno pertama.

1696. KETUA: SUHARTOYO [02:49:54]

Ya.

1697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:49:55]

Itu tidak ada kejadian khusus dan PDIP mengyakan, PDIP mengesahkan keputusan tersebut.

1698. KETUA: SUHARTOYO [02:50:03]

Ya, ke kami, Pak.

1699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:50:07]

Ya. Izin, Yang Mulia.

1700. KETUA: SUHARTOYO [02:50:08]

Pertanyaannya apa?

1701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:50:09]

Pada waktu pleno pertama, pertanyaannya adalah pada saat itu hasilnya apa di pleno pertama? Saya ingin me (...)

1702. KETUA: SUHARTOYO [02:50:18]

Hasil pertama sebelum Bapak mengeluarkan rekomendasi, Bapak tahu Bapak?

1703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:50:21]

Hasil pertama, Yang Mulia, izin.

1704. BAWASLU: YEUW M FELIX TETHOOL [02:50:23]

Izin, Yang Mulia, biar anggota Bawaslu Asmat yang akan menjelaskan sesuai (...)

1705. KETUA: SUHARTOYO [02:50:27]

Ya, Asmat, silakan Kabupaten.

1706. BAWASLU: HASAN HARUNA [02:50:30]

Makasih. Izin, Yang Mulia.

1707. KETUA: SUHARTOYO [02:50:31]

Ya.

1708. BAWASLU: HASAN HARUNA [02:50:31]

Kami bisa sampaikan. Bahwa pada saat pleno tanggal 9 Maret di Asmat karena pada saat itu memang tidak diberi ruang untuk keberatan, jadi hanya diberi ruang untuk mengisi Form Keberatan dan Kejadian Khusus. Nah, setelah pembacaan hasil pleno itu penetapan oleh Bawaslu

Kabupaten Asmat ... oleh KPU Kabupaten Asmat, maka PDI Perjuangan mengajukan keberatan. Mengajukan keberatan karena adanya penambahan suara di PKB, tidak sesuai dengan D.Kecamatan yang dibacakan pada saat pleno. Makanya PDI perjuangan mengajukan keberatan untuk Dapil 1 dan Dapil 3. Demikian, Yang Mulia.

1709. KETUA: SUHARTOYO [02:51:27]

Ya karena ada keberatan dari PDIP, Pak.

1710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:51:29]

Pada saat ... izin, Yang Mulia. Pada saat pertama karena ada keberatan dari PDIP dan pada waktu itu tidak ada kejadian khusus. Kemudian, dari pihak PKB Pak Zamruddin[sic!] ini protes dan keberatan ke pihak Bawaslu. Dan kemudian pada awal, pada awal tersebut, PDIP mengajukan protes sebanyak 3 kali dan ditolak oleh Bawaslu, alasannya nanti diajukan saja di MK. Tapi kemudian, Bawaslu mengeluarkan pleno ... revisi pleno, pleno revisi, itu dengan kemudian tanggal 17 itu diadakan pleno revisi dan mengakibatkan suara PKB dari Pak Zamruddin[sic!] ini menjadi hilang satu kursi.

KETUA: SUHARTOYO [02:52:21]

Ya, itu kan persoalannya yang Bapak ajukan, kan?

1711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:52:23]

Betul.

1712. KETUA: SUHARTOYO [02:52:24]

Nah, itu kejadiannya bahwa kronologisnya seperti itu tadi, kan? Dari kabupaten ada keberatan dari PDIP, di tingkat provinsi itulah masih muncul dan kemudian keluar rekomendasi tanggal 13 yang masih meninjau rekapitulasi pleno kabupaten di tanggal 3. Supaya dilakukan penyandingan data ya, penyandingan data hasilnya itu tadi. Jadi Bapak kan ... hari ini yang Bapak keberatan adalah kenapa kok hasil itu kemudian menjadi berubah, kan begitu.

1713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:52:56]

Berubah, Yang Mulia.

1714. KETUA: SUHARTOYO [02:52:57]

Ya. Nanti kami yang akan mempertimbangkan semua itu kan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan ini, Pak.

1715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:53:04]

Baik, Yang Mulia.

1716. KETUA: SUHARTOYO [02:53:06]

Ya. Cukup, ya?

1717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:53:06]

Cukup, Yang Mulia.

1718. KETUA: SUHARTOYO [02:53:09]

Dari Termohon cukup?

1719. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:53:10]

Menambahkan keterangan. Sehubungan dengan pertanyaan dari Pemohon tadi. Yang pertama bahwa dalam formulir di kabupaten untuk apa namanya ... perolehan suara yang hasil rekapitulasi tanggal 9 Maret, Saksi PDIP tidak tanda tangan. Yang kedua (...)

1720. KETUA: SUHARTOYO [02:53:30]

Ya. Artinya ada keberatan tadi, kan?

1721. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:53:32]

Betul. Dan kemudian (...)

1722. KETUA: SUHARTOYO [02:53:33]

Terus apa lagi, Pak?

1723. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:53:35]

Yang kedua, ada formulir keberatan yang (ucapan tidak terdengar jelas) Saudara Saksi atas nama Yoel Manggaprou, tanda tangan 9 Maret.

1724. KETUA: SUHARTOYO [02:53:43]

Ini keberatan saksi dari saksi apa?

1725. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:53:45]

PDIP, Pak.

1726. KETUA: SUHARTOYO [02:53:45]

PDIP.

1727. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:53:45]

Pada waktu rekap kabupaten. Nah Saudara Yoel Manggaprou ini tadi dihadirkan untuk perkara yang 271 tadi, itu.

Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa ini Perkara 267 dengan Perkara 271 sesungguhnya peristiwanya kan untuk DPRD Kabupaten Asmat, sesungguhnya. Yang mestinya selesai pada waktu rekapitulasi ... pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Asmat. Namun demikian keberatan-keberatan tadi yang bersifat, katakanlah apa namanya ... kebenaran materiil atau fakta materiil yang diajukan belum mendapatkan konfirmasi, maka kemudian ketika rekap provinsi ... pleno rekap provinsi diajukan lagi, walaupun peristiwanya bukan untuk pemilu DPRD provinsi, tapi untuk pemilu DPRD kabupaten.

Untuk Perkara 271 tadi, PDIP keberatan terhadap PAN yang sekarang ini, eh, sori ... betul, ya. Kemudian yang ini, PDIP keberatan terhadap PKB, Nasdem, dan PSI. Demikian, Majelis.

1728. KETUA: SUHARTOYO [02:54:46]

Ya, Pak. Cukup, Pak. Ya. Dari Pihak Terkait ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Malah tengok-tengok berarti enggak siap dengan bertanya.

Oke, kalau begitu untuk Perkara 267, kita cukupkan nanti semua akan kami kaji oleh Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Terima kasih kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu, dan kepada Para Saksi yang sudah memberi keterangan sudah bisa meninggalkan ruangan.

Kami akan lanjutkan untuk pemeriksaan Perkara 191. Kebetulan di 267 tidak ada bukti yang diajukan yang baru yang perlu kami sahkan di persidangan. Intinya nanti untuk perkembangan perkara ini menunggu, bagaimana sikap Mahkamah terhadap permohonan ini, yang waktunya nanti akan ditentukan untuk dilakukan panggilan oleh bagian Kepaniteraan. Silakan, bisa meninggalkan ruangan dan dilanjut ke Perkara Nomor 191 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk Saksinya dari Pemohon, Dian Permata, ada? Ada, Pak?

1729. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PUTU BRAVO TIMOTHY [02:56:39]

Izin, izin, Yang Mulia.

1730. KETUA: SUHARTOYO [02:56:39]

Dan ... Dan ... Daniel Zuchron, Fitzgerald Lintin, 3 orang.

Dari Termohon, Riza Anshari, Anggota KPU provinsi ... oh Ahli, ya? Maaf. Jadi, Pak Dian tadi Ahli. Kemudian, dari Termohon Rian ... Riza Anshari, maju, maju, agamanya Islam. Nazaruddin Ikhwan, agama Islam. Suko Yuwono, agama Islam. Muhammad Sakra Effendi, Islam juga dan Subhani, agamanya Islam.

Kemudian dari Pihak Terkait PAN, Wahyudi, agama Islam. Azhar, agama Islam. Muhamad Kurniawan, Awan Subarkah, Agus Sudarto. Kemudian Ahli, Agus Riwanto, kalau begitu Ahli dan Saksi maju semua, biar dibantu lafaz sumpahnya.

1731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:57:57]

Yang Mulia, izin.

1732. KETUA: SUHARTOYO [02:58:00]

Apa, Pak?

1733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:58:01]

Terkait Saksi kami yang bernama Daniel Zuchron, kebetulan jadwalnya bentrok, Yang Mulia, dia lagi sebagai Ahli di Panel 2, Yang Mulia. Jadi itu mungkin (...)

1734. KETUA: SUHARTOYO [02:58:15]

Saksi, ya?

1735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:58:16]

Ya.

1736. KETUA: SUHARTOYO [02:58:16]

Dia saksi jadi saksi?

1737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:58:17]

Di sini saksi, di sana Ahli, Yang Mulia.

1738. KETUA: SUHARTOYO [02:58:20]

Wah, berarti bisa dobelan itu.

1739. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:58:24]

Izin, Majelis, Termohon. Nama-nama yang diajukan Termohon tadi semuanya masih penyelenggara aktif.

1740. KETUA: SUHARTOYO [02:58:31]

Aktif, ya?

1741. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:58:31]

Terima kasih.

1742. KETUA: SUHARTOYO [02:58:32]

Jadi, tidak kami lakukan penyumpahan.
Sekarang Pak ... Pak Daniel, mana?

1743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:58:40]

Posisi Pak Daniel

1744. KETUA: SUHARTOYO [02:58:41]

Oh, Daniel masih (...)

1745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:58:42]

Di Panel 2, Yang Mulia.

1746. KETUA: SUHARTOYO [02:58:44]

Ya. Fitzgerald Lintin, oke. Kristen ya, Pak? Ahlinya Pak Dian, oke. Pak ... dari Termohon tidak perlu dianu karena masih penyelenggara aktif. Pak Wahyudi, Pak Azhar, Pak Muhamad Kurniawan Putra, Awan Subarkah, Agus Sudarto, ya? Ahlinya Pak Agus Riwanto.

Untuk yang agama Islam, Yang Mulia Prof. Guntur akan membantu lafaz sumpahnya untuk Saksi dulu. Yang agama Kristen atau ... nanti akan dibantu oleh Yang Mulia Bapak Daniel. Baru nanti yang Para Ahli agama juga Muslim sekaligus Prof, nanti di ... silakan.

1747. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:44]

Ya, baik. Saksi yang agama Muslim. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. Bapak yang bersumpah ya, saya cuma membantu.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya."

1748. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [03:00:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya.

1749. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:09]

Terima kasih. Langsung yang Ahli, ya. Ahli, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian saya."

Terima kasih.

1750. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [03:00:24]

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian saya.

1751. KETUA: SUHARTOYO [03:00:43]

Silakan, Yang Mulia. Yang Kristen.

1752. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:00:44]

Baik, untuk Pak Fitzgerald Lintin, ya, agama Kristen apa Katolik? Kristen, ya. Baik, dua jari, ya, ikuti lafal janji akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

Baik, terima kasih.

1753. SELURUH SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH [03:00:58]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

1754. KETUA: SUHARTOYO [03:01:15]

Baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Bisa diperiksa Ahlinya dulu ya, Pak, ya. Ahli dulu biar ... silakan, Pak Dian Permata keterangannya bisa 5 sampai 7 menit. Nanti kalau ada yang perlu dilanjutkan dengan tanya jawab bisa di ... apa, Pak?

1755. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:01:45]

Pakai itu, Yang Mulia.

1756. KETUA: SUHARTOYO [03:01:48]

Pakai paparan?

1757. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMU MULYANTO [03:01:50]

Paparan.

1758. KETUA: SUHARTOYO [03:01:51]

Sudah koordinasi belum tadi?

1759. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:01:52]

Sudah, Yang Mulia.

1760. KETUA: SUHARTOYO [03:01:53]

Silakan dibantu untuk paparan, ditayangkan sudah. Silakan, Pak. Sudah, Pak.

1761. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIAN PERMATA [03:02:05]

Izin, Yang Mulia Pimpinan. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

1762. KETUA: SUHARTOYO [03:02:09]

Walaikumsalam.

1763. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIAN PERMATA [03:02:10]

Terima kasih. Perkenalkan, saya Dian Permata, saya ditunjuk sebagai Ahli kasus di 191. Bapak, Ibu yang terhormat, termasuk Pimpinan. Saya mulai sedikit 7-10 menit paling gitu, kan.

Yang pertama, yang ingin saya sampaikan bahwa memang permasalahan penghitungan suara dalam pemilu merupakan aktivitas tertua di antara permasalahan-permasalahan paling tua lain dalam hukum tata negara. Jadi, ini saya kutip dari Stephen A. Siegel (2024), dalam bukunya ada The Conscientious Congressman's Guide to The

Electoral Count Act of 1887. Nah, di Undang-Undang 7, Bapak/Ibu dan Pimpinan, dijelaskan gitu, kan. Di Pasal 2 dan di Pasal 3 bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di Pasal 3 ini proses penyelenggaraannya, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip dari mandiri sampai efisien.

Nah, dalam konteks ini gitu, kan atau ... di Pasal 3 itu juga dipakai dalam PKPU 5 pada PKPU rekap. Jadi, semangatnya dipinjamkan gitu kan, dari Undang-Undang 7 ke PKPU 5/2024 tentang Rekap. Bunyinya adalah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu berpedoman pada prinsip yang tadi dari Undang-Undang 7 itu kan, di Pasal 3, mandiri sampai jujur, adil, berkepastian, hukum, tertib, terbuka, professional ... profesionalitas, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel. Nah, dari sisi sini dapat dilihat gitu kan bahwa penegasan dari Undang-Undang 7 yang diturunkan di PKPU 5 semangatnya harus sesuai dengan dari A sampai huruf L.

Nah, saya mengutip pendapat dari Mbak Ida Budhiati, Anggota DKPP, saya highlight bahwa kepastian hukum menjadi salah satu syarat mutlak membangun pemilu yang berintegritas. Nah, Bapak Ibu yang kita ketahui, Pemilu 2024 ini adalah pemilu yang ke-6 setelah masa reformasi. Artinya ini uji, uji, uji dari cita-cita reformasi kita. Nah, quotationnya itu kan, ini saya tulis, pada tahapan pemungutan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum (pemilu), potensi hilang atau tercurinya suara pemilih, baik secara sengaja atau tidak sengaja, sangat mungkin terjadi. Salah satu contohnya, yakni karena tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan itu bisa terjadi gitu kan, antara sengaja dan tidak sengaja.

Saya mengutip dari IDEA gitu kan, di International 2010, mengintrodusir konsep keadilan pemilu (electoral justice) sebagai ciri dan karakter yang wajib ada dalam sebuah sistem pemilu yang demokratis. Di antaranya, yakni menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dalam proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Jadi, ada aturan mainnya, tidak dengan apa ... semena-mena dan seterusnya.

Nah, dalam konteks Indonesia, Bapak Ibu gitu kan, Undang-Undang 7 tentang Pemilihan Umum memberikan ruang dan mekanisme bagi siapa saja untuk mencari keadilan di saat ditemukan dugaan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran aspek pidana, etik, maupun administrasi pemilu. Undang-Undang 7 ini juga memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu. Salah satunya pada tahapan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara. Jadi, ini makin menguatkan posisi dari soal undang-undang.

Nah, ada 2 pasal gitu kan, next one. Ada 2 pasal di Undang-Undang 7, yaitu di 403 dan 407. Di situ dijelaskan di 403, di ayat pertam

... di ayat (1), "Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, peserta pemilu sebagaimana Pasal 402 ayat (2)."

Ayat (2) nya dinyatakan, "Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu kepada KPU Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2)."

Yang ketiga, "KPU Provinsi wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan seterusnya pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu." Di Pasal 07 ini penegasannya, Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara peserta pemilu.

Ayat (2) nya, "Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2)."

Yang ketiga ada amanahnya, "KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu." Dari kalimat wajib ini artinya memang ada amanah yang harus dilaksanakan oleh kamar ... oleh kamar KPU dan Bawaslu. Saya coba melacak gitu, kan. Saya mencoba melacak, Pimpinan, gitu kan, melacknya, menurut saya pendapatnya dari sini. Ini saya kutip dari PKPU 25 Tahun 2023, pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Karena memang dari Kasus 191 ini ada, ada semacam apa ... dispute, gitu kan, ada semacam banyak kesalahan itu kan, itu mulai dilacak dari adanya Form Kejadian Khusus. Jadi, Form Kejadian Khusus ini di pasal, di Pasal 64 dikatakan, KPS ... "KPPS wajib mencatat keberatan saksi dan seterusnya." Ayat (9) nya, "Keberatan saksi yang belum tidak terima, dicatat di Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau keberatan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana keberatan saksi ditandatangani oleh Ketua KPPS."

Ayat (10) nya, "Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kalimat atau kata nihil." Maknanya, Pimpinan, ada atau tidak kejadian di TPS saat rekap itu kan harus ditulis. Nah, di sinilah awal titik kita melacak, gitu kan. Kalau memang pada saat di TPS tidak ada, misalnya sebagai contoh kejadian khusus, misalnya salah tulis gitu kan ataupun tulisan yang tidak jelas, itu harus dimulai dari Form C.Khusus, itu kan. Ini yang kita bisa lacak dari sini. Next, Mas.

Di PKPU 5 pun ini, frasa ini pun muncul kembali soal kejadian khusus di PKPU 5/2004 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Pasal 14. Lagi-lagi bunyinya hampir sama, tidak jauh berbeda terutama gitu kan, di ayat (10), "Kejadian mengenai Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU sebagaimana (ucapan tidak terdengar jelas) dilakukan sesuai dengan peraturan KPU yang mengenai pemungutan dan suara dalam ... artinya, memang pelacakan perubahan ataupun kesalahan administrasi itu bisa dilihat dari Form C.khusus. Nah, ini contohnya, Pimpinan, Yang Mulia.

Nah, sekarang saya coba beranjak contoh dari kasus negara luar, ini ada di Jerman dan di Paraguay, dan Guatemala. Dari kasus ini kita belajar gitu kan, di Jerman, Yang Mulia, ada kasus itu kan, di Partai CDU, gitu kan, Partai CDU itu dia pernah, pernah kandidat apa ... calegnya itu pernah mengadu ke MK. Gara-garanya kenapa musababnya? Gara-gara caleg ini tidak direstui dan diperkenankan turun ke dapil oleh DPP partainya. Putusannya di MK Hamburg ini, akhirnya partai ini dihukum. Dihukum kenapa? Dia dibatalkan hasil pemilu karena partai sebagai alat atribusi demokrasi justru tidak mempertontonkan soal demokrasi itu sendiri. Jadi, dia dibatalkan, gitu kan melalui ... dan pemilu itu harus diulang. Alasan lain partai melanggar prinsip demokrasi, maka pemilunya pun tidak ... ini, yang kita perkuat dari soal Form Kejadian Khususnya.

Yang terakhir, Yang Mulia. Lain lagi ini di kasus di Paraguay dan Guatemala. Di dua negara ini gitu kan, penyelenggara pemilu diberikan kesempatan melakukan pemantauan proses seleksi dan nominasi di partai politik. Jika partai politik melanggar proses demokrasi dalam proses pencalonan, maka dapat ditolak ikut pemilu. Nah, dari tiga kasus ini kita dapat lihat gitu kan bahwa setiap ada pelanggaran apapun ketika tidak mempertontonkan aksi demokrasinya, maka ada putusan soal dari kasus Jerman, yaitu soal dibatalkan dan ikut pemilu ulang lanjutannya.

Itu yang bisa saya sampaikan, Pimpinan. Terima kasih. Wabillahitaufik wal hidayah. Assalamualaikum Wr. Wb.

1764. KETUA: SUHARTOYO [03:12:19]

Walaikumsalam. Dilanjutkan dari Ahlinya Termohon, silakan. Ahli Termohon silakan, oh Pihak Terkait ya, silakan Pak, Pak Agus.

1765. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS RIWANTO [03:12:38]

Assalamualaikum Wr. Wb.

1766. KETUA: SUHARTOYO [03:12:40]

Walaikumsalam.

1767.AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS RIWANTO [03:12:42]

Saya Agus Riwanto, Dosen Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret Surakarta dan pernah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu sebagai Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2003-2013.

Perkenankan pada kesempatan yang mulia ini, Yang Mulia, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkara a quo. Ada lima hal. Pertama, perihal penyelenggara penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu pascarekapitulasi hasil perolehan suara nasional.

Yang kedua, perihal penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu melalui pemeriksaan cepat. Yang ketiga, perihal laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tahap rekapitulasi hasil pemilu. Yang keempat, perihal penyampaian keberatan koreksi rekapitulasi perolehan pemilu di PPK hingga KPU RI. Dan yang terakhir adalah perihal putusan Bawaslu pascarekapitulasi hasil perolehan suara nasional.

Yang Mulia, saya ingin mulai yang pertama, perihal penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu pascarekapitulasi hasil perolehan pemilu nasional. Bahwa pada prinsipnya, Undang-Undang Pemilu mengatur empat jenis pelanggaran dan dua jenis sengketa pemilu. Keempat jenis pelanggaran itu adalah pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran etika pemilu, dan pelanggaran atas undang-undang lainnya. Sedangkan dua jenis lain sengketa adalah sengketa proses pemilu di Bawaslu, yang kedua adalah sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Masing-masing model tersebut memiliki karakter, prosedur, dan aktor yang berbeda. Bahwa penyelesaian terhadap sengketa pemilu memiliki dua tujuan, yaitu korektif terhadap kecurangan melalui mekanisme verifikasi dan skema electoral challenge, dan hukuman atau punitive, bagi mereka yang melakukan kecurangan, baik secara administratif maupun pidana.

Bahwa Undang-Undang Pemilu dimaksud dengan pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sesuai diatur dengan Pasal 460 ayat (2).

Yang mulia. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) PerBawaslu Nomor 8 Tahun 2002, tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, dalam hal setelah penetapan hasil pemilu perolehan suara pemilu secara nasional, terdapat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu, dan terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu menghentikan laporan melalui

kajian awal dan menyampaikan laporan kepada Mahkamah dalam sidang perselisihan hasil pemilu.

Oleh karena itu, terhadap laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi rekapitulasi suara pascapenetapan hasil pemilu nasional oleh KPU RI, maka berdasarkan hukum pemilu dianggap tidak pernah ada. Karena setiap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu seharusnya dihentikan oleh Bawaslu melalui kajian awal, untuk kemudian disampaikan kepada MK dalam persidangan dalam keterangan tertulis.

Bahwa tindakan Bawaslu untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu pascapenetapan pemilu nasional oleh KPU ditujukan agar ada kepastian hukum dalam hal limitasi atau pembatasan waktu laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Bawaslu, sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa prinsip-prinsip yang diatur dalam IDEA.

Yang Mulia, perihal penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu melalui pemilu cepat. Bahwa ketika terjadi pelanggaran administrasi pemilu pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilu, baik berupa temuan Bawaslu maupun laporan, maka prosedur penyelesaian adalah melalui pemeriksaan secara cepat di tempat kejadian dan pada hari yang sama saat terjadinya pelanggaran pemilu. Bukan dengan cara melakukan pelaporan ke Bawaslu, kemudian Bawaslu melakukan proses persidangan dalam bentuk Majelis Pemeriksa Pelanggar Administrasi, sebagai mediator dalam Ketentuan Pasal 40, 41 dan 42 PerBawaslu Nomor 8 Tahun 2022.

Bahwa penyelesaian ... bahwa filosofi pemeriksaan cepat dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan rekapitulasi hasil pemilu perolehan suara adalah karena ketatnya waktu pelaksanaan tahapan penghitungan rekapitulasi dan pleno penetapan hasil penghitungan suara, menyebabkan munculnya norma pengaturan tentang sidang pemeriksaan dengan beracara cepat sebagai mediator dalam PerBawaslu tersebut. Hal ini berbeda dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu biasa pada tahapan lainnya yang limitasinya cukup.

Yang mulia, berikutnya perihal laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tahap rekapitulasi nasional. Bahwa jika terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahap rekapitulasi suara, maka laporan hanya dapat disampaikan kepada Bawaslu sesuai tingkatannya saat melakukan pengawasan untuk kemudian Bawaslu melakukan mekanisme dan prosedur penyelesaian melalui mekanisme secara cepat di tempat kejadian pada hari yang sama saat terjadinya pelanggaran pemilu.

Bahwa dalam hal demikian bertujuan agar dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahap rekapitulasi hasil pemilu di PPK, dan seterusnya limitasi waktunya pendek dapat diselesaikan pada saat kejadian, dan hari yang sama. Bukan menunda laporan kepada Bawaslu

untuk kemudian baru dilaporkan setelah penetapan rekapitulasi hasil pemilu kepada Bawaslu sesuai dengan Ketentuan Pasal 41, 42 PerBawaslu Nomor 8 Tahun 2022.

Berikutnya, Yang Mulia. Perihal penyampaian keberatan atau koreksi rekapitulasi perolehan suara di PPK hingga KPU. Bahwa saksi parpol peserta pemilu dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dan mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPU, PPK, dan selanjutnya.

Kemudian, di masing-masing tingkatan telah memperbaikinya, dan masih ada kejadian khusus, dan keberatan yang tidak bisa diselesaikan. Maka penyelenggara pemilu mencatat dalam Formulir D, untuk ditindaklanjuti dalam pelaksana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat berikutnya, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 25, 59, 75, 91 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Nasional.

Bahwa pengajuan keberatan terhadap rekapitulasi suara hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dari kejadian keberatan rekapitulasi di kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi bukan melompat dari tingkat PPK ke tingkat rekapitulasi nasional di KPU RI karena setiap keberatan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara harus dilakukan sesuai dengan locus delicti-nya. Misalnya, keberatan rekapitulasi di kecamatan disampaikan di tingkat kecamatan begitu juga di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Berikutnya, Yang Mulia, perihal putusan Bawaslu RI yang diputus setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional. Bahwa subjek yang dapat menjadi pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu di PPK adalah saksi ataupun temuan yang dilakukan oleh panwas kecamatan, dan untuk tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat menjadi pelapor atas dugaan pelanggaran kesalahan rekapitulasi adalah saksi atau atas temuan Bawaslu.

Bahwa putusan Bawaslu muncul pascarekapitulasi nasional dalam kasus a quo dapat dilihat dari putusan yang muncul pada tanggal 22 Maret. Kemudian penetapan hasil pemilu sudah dilakukan oleh KPU pada tanggal Maret 2024. Memang putusan Bawaslu ini lahir sebelum telapor mengajukan PHPU ke MK, berdasarkan Putusan Pasal 474 ayat (2). Bahwa putusan Bawaslu a quo seharusnya tidak perlu muncul dan dilakukan proses persidangan, bahkan seharusnya Bawaslu menghentikan laporan melalui kajian awal dan menyampaikan laporan kepada MK dalam sidang PHPU melalui keterangan tertulis. Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 12 ayat (3) PerBawaslu Nomor 8 Tahun 2022 berada pada masa tenggat waktu bagi pelapor untuk mengajukan

PHPU ke MK pada tanggal 20-23 Maret 2024. Kenyataannya pelaporan mengajukan PHPU pada tanggal 23 Maret pukul 21.15 WIB.

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 146 PHPU-DPR Tahun 2019 yang dibacakan pada hari Kamis 1 Agustus Tahun 2019 dalam pertimbangan hukumnya Nomor 4 dan Nomor 5, halaman 128-129 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terhadap fakta hukum adanya putusan Bawaslu, perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilu yang dikehendaki oleh Undang-Undang 7/2017. Yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelenggaraannya. Dalam setiap tahapan termasuk mempertimbangkan pelaksanaan atau tidak lanjut dari penyelesaian tersebut. Sehingga tidak mengganggu penyelesaian hasil pemilihan umum.

Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memenuhi hasil pemilu ... mempengaruhi hasil pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilu. Segala macam permasalahan hukum harus selesai sebelum ditetapkannya hasil pemilu secara nasional, termasuk juga terkait dengan putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu yang berdampak pada hasil pemilu yang dilakukan setelah hasil pemilu nasional.

Selanjutnya, Mahkamah mengatakan perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah ditetapkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan. Karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara pemilu nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan Putusan Mahkamah. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 146 Tahun 2019 tersebut sesungguhnya, MK hendak memastikan secara hukum bahwa pascapenetapan rekapitulasi hasil perolehan suara nasional, maka segala hal terkait dengan laporan dan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang berakhir ... telah berakhir. Termasuk adanya putusan, rekomendasi, dan bentuk lainnya dari Bawaslu sepanjang mempengaruhi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU tidak

dimungkinkan lagi dan kesampingkan untuk memberi kepastian hukum bahwa hanya MK yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu.

Demikian Keterangan Ahli ini disampaikan semoga akan dapat membantu Yang Mulia, Ketua dan Hakim Anggota Majelis pada hari ini dalam menemukan kebenaran dan memutus PHPU Pileg ini dengan seadil-adilnya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

1768. KETUA: SUHARTOYO [03:23:31]

Baik. Terima kasih Waalaikumsallam. Dari Pemohon ada pertanyaan untuk Ahli?

1769. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PUTU BRAVO TIMOTHY [03:23:46]

Izin, Yang Mulia, ada Yang Mulia.

1770. KETUA: SUHARTOYO [03:23:50]

Silakan.

1771. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PUTU BRAVO TIMOTHY [03:23:51]

Baik. Kami akan bertanya kepada 2 Ahli yang sudah dihadirkan yang pertama kami bertanya terlebih dahulu kepada (...)

1772. KETUA: SUHARTOYO [03:23:58]

Singkat Singkat Saja, Pak.

1773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PUTU BRAVO TIMOTHY [03:23:56]

Baik, Yang Mulia. Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Bapak Dian Permata.

Yang pertama begini, tadi Saudara Ahli menyampaikan di dalam sistem pemilu kita adalah penekanan prinsip adil dan kepastian hukum, seperti itu.

Pertanyaannya adalah apakah ketika tidak ada keberatan di tingkatan bawah, apakah kemudian itu juga dengan serta-merta

kemudian menghilangkan hak peserta pemilu untuk melakukan keberatan pada tingkatan yang lebih tinggi berkaitan dengan prinsip adil dan kepastian hukum tersebut. Itu dari ... untuk pertanyaan yang ke Ahli Dian Permata, Yang Mulia.

Lalu pertanyaannya kepada Ahli yang kedua, ke (...)

1774. KETUA: SUHARTOYO [03:24:54]

Pak Agus.

1775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PUTU BRAVO TIMOTHY [03:24:54]

Pak Agus.

1776. KETUA: SUHARTOYO [03:24:56]

Ya.

1777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PUTU BRAVO TIMOTHY [03:24:56]

Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah kapan pleno nasional secara terminologi hukum dinyatakan telah selesai? Apakah pada saat pleno pembacaan hasil perolehan suara di tingkatan provinsi tersebut selesai dibacakan atau kemudian pada saat KPU kemudian membacakan hasil perolehan suara secara keseluruhan? Itu yang pertama.

Lalu yang berikutnya adalah apakah dengan adanya acara pemeriksaan cepat pada saat pelaksanaan pleno itu kemudian secara serta-merta kemudian menghilangkan hak peserta pemilu untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran yang ditemukan baru pada saat ... ya, ditemukannya atau diterimanya peristiwa pelanggaran itu diketahui pada saat pleno nasional tersebut sedang terjadi?

1778. KETUA: SUHARTOYO [03:26:03]

Cukup, ya?

1779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PUTU BRAVO TIMOTHY [03:26:04]

Ya. Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

1780. KETUA: SUHARTOYO [03:26:06]

Termohon ada pertanyaan? Cukup. Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

1781. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [03:26:10]

Yang Mulia.

1782. KETUA: SUHARTOYO [03:26:11]

Silakan.

1783. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [03:26:13]

Pertanyaan kepada Ahli Dian Permata terkait dengan adanya keberatan. Kalau misalkan terhadap hasil rekapitulasi di semua jenjang yang sudah disaksikan secara terbuka dan transparan dan tidak ada keberatan dari tingkat bawah, bagaimana menurut Ahli ketika keberatan ini disampaikan di tingkat atas padahal prosesnya sudah berjenjang dari bawah? Itu mungkin bisa dijelaskan. Yang kedua untuk Ahli Pak Agus, Yang Mulia.

1784. KETUA: SUHARTOYO [03:26:54]

Silakan.

1785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [03:26:55]

Terkait dengan adanya laporan yang diajukan oleh pelapor PDIP di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah dicabut oleh pelapor sendiri, implikasinya itu seperti apa? Menurut Perbawaslu dan menurut PKPU. Mungkin demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

1786. KETUA: SUHARTOYO [03:27:25]

Baik Pak Dian, bisa dijawab singkat-singkat, Pak.

1787. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIAN PERMATA [03:27:28]

Baik. Terima kasih, Pimpinan. Izin menjawab.

Pertama, soal yang kedua dulu yang keberatan. Pada prinsipnya keberatan apapun kalau dari konstruksi kita berkeadilan pemilu dan ... dalam Undang-Undang 7 itu kan, itu tetap harus didengar, itu yang pertama komentar saya, tetap gitu kan. Apalagi contoh kasusnya sudah saya sampaikan di slide tadi, gitu kan. Keberatan, gitu kan

1788. KETUA: SUHARTOYO [03:27:52]

Ya.

1789. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIAN PERMATA [03:27:28]

Meskipun pemilu sudah dijalankan. Itu yang dari pertanyaan kedua. Yang pertanyaan pertama, itu kan. Segala sesuatu kejadian itu tidak serta mer ... serta-merta itu ... tidak serta-merta bahwa tidak ada kejadian, Pak, betul. Jadi form khusus itu kalau menurut saya adalah itu kan, tidak serta-merta tidak ada kejadian. Artinya meskipun, gitu kan, meskipun salah tulis itu harusnya ada. Nah, Kalau misalnya dalam kasus ini ada perubahan ini jadi pertanyaan besar, gitu kan. Di form khususnya tidak ada kejadian, kenapa kasus ini muncul? Kan, gitu kan atau, gitu kan, yang kita tidak tahu teman-teman itu bisa mendapatkan form kejadian khusus atau tidak. Itu yang bisa saya komentari, Pimpinan.

1790. KETUA: SUHARTOYO [03:28:42]

Baik.
Dari Pak Agus?

1791. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS RIWANTO [03:28:48]

Izin, Yang Mulia.

Menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, soal kapan Pleno Nasional dinyatakan sebagai hasil pemilihan nasional? Tentu adalah pada saat dibacakan Pleno Nasional oleh KPU RI, tapi kalau membaca Putusan

MK di 2019 tidak pernah membatasi mengenai apa yang dimaksud pemilu nasional. Artinya bisa saja pada saat dibacakan di KPU, bisa juga di KPU nasional.

Yang kedua, terkait dengan pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat itu adalah bagian dari *lex specialis* yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, di Ketentuan Pasal 42. Dalam pelanggaran administrasi pemilu itu dibedakan dua, pelanggaran administrasi biasa dan pelanggaran administrasi rekapitulasi perhitungan suara. Nah, terkait dengan pemeriksaan cepat itu *lex specialis* hanya untuk menyelesaikan ter ... masalah berkaitan dengan rekapitulasi. Berbeda dengan proses perad ... ajudikasi untuk pelanggaran administrasi pemilu biasa. Oleh karena itu, terhadap para pihak yang tidak menggunakan pelaporan, kemudian Bawaslu pada saat kejadian akan melakukan proses perap ... proses pemeriksaan cepat dan tiba-tiba melakukannya di forum yang berbeda dalam bentuk ajudikasi tingkat nasional, maka dianggap secara konstitusional itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara pemilu. Karena hukum acara pemilu itu sangat ketat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Berikutnya, perihal laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan rekapitulasi dilakukan di provinsi dicabut kemudian dibawa ke nasional. Menurut pandangan Ahli, laporan tersebut tidaklah ... tidaklah sah, sehingga laporan di provinsi itu harus dianggap sebagai temuan, kemudian di tingkat nasional itu putusannya tidak benar karena putusan ini menganggap seolah-olah pelanggaran pemilu administrasi ini adalah pemilu biasa. Kalau kita baca di Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Pemilu menyatakan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu itu melalui pemeriksaan acara cepat mengesampingkan Ketentuan Pasal 31, Pasal 31 bicara mengenai pelanggaran administrasi biasa dengan menggunakan ajudikasi dan juga mengesampingkan Ketentuan Pasal 35 berkaitan dengan soal daring.

Jadi, terkait dengan putusan peradilkan ajudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu RI itu adalah dianggap tidak ada sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu karena proses rekapitulasi ketika bermasalah, maka diselesaikan pada saat kejadian, di tempat kejadian.

Demikian Yang Mulia, saya sampaikan (...)

1792. KETUA: SUHARTOYO [03:31:41]

Baik, terima kasih.

Jadi untuk Ahli Pak Dian dan Pak Agus, sudah cukup. Jika mau meninggalkan ruangan juga sudah bisa. Jika mau menonton sidang juga masih diperbolehkan, Pak.

Kemudian kami langsung ke Saksi Pak Fitzgerald Lintin, ya, dari Pemohon. Apa Pak yang mau dijelaskan, Pak? Ahli mau meninggalkan

ruangan boleh, Pak. Kalau masih, kalau ada kegiatan lain. Pak Fitz, ya, panggilannya apa Pak, Fitz itu ya?

1793. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:32:20]

Fitz, Pak.

1794. KETUA: SUHARTOYO [03:32:21]

Fitz. Pak Fitz, apa yang mau dijelaskan?

1795. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:32:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk kesempatan ini.

1796. KETUA: SUHARTOYO [03:32:26]

Ya.

1797. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:32:28]

Izinkan saya akan menjelaskan 2 hal (...)

1798. KETUA: SUHARTOYO [03:32:31]

Singkat saja, Pak. Bapak waktu itu mandat PDIP pada rekap nasional, ya?

1799. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:32:35]

Ya, sebagai salah satu saksi (...)

1800. KETUA: SUHARTOYO [03:32:35]

Tingkat nasional?

1801. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:32:39]

Tingkat nasional, rekapitulasi tingkat nasional.

1802. KETUA: SUHARTOYO [03:32:40]

Oke, ada yang mau diapa ... berkaitan dengan ketika terjadi proses rekapitulasi?

1803. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:32:47]

Baik, Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 12 Mei ... 12 Maret maksud saya pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional untuk pemilihan DPR RI Dapil Kalsel 2, sebelum Ketua KPU di Provinsi Kalimantan Selatan 2 menyampaikan atau membacakan hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Dari kami sebagai Saksi PDI Perjuangan pada saat itu menyampaikan keberatan karena kami menemukan ada penggelembungan suara atau ada peningkatan suara khususnya untuk suara Partai Amanat Nasional, sehingga ini dapat berdampak kehilangan kursi bagi PDI Perjuangan.

1804. KETUA: SUHARTOYO [03:33:42]

Keberatan Bapak diajukan di (...)

1805. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:33:45]

Pleno KPU.

1806. KETUA: SUHARTOYO [03:33:47]

Pleno KPU RI, ya?

1807. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:33:48]

Ya.

1808. KETUA: SUHARTOYO [03:33:51]

Caranya bagaimana Bapak mengajukan keberatan?

1809. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:33:54]

Ya. Pada saat itu kami langsung menyampaikan keberatan kepada Ketua KPU dengan menyampaikan data-data temuan peningkatan atau penggelembungan suara untuk Partai Amanat Nasional (...)

1810. KETUA: SUHARTOYO [03:34:08]

PAN itu?

1811. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:34:09]

Ya, di 3 kabupaten.

1812. KETUA: SUHARTOYO [03:34:11]

Itu di saat mau pleno rekapitulasi itu setelah?

1813. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:34:17]

Sebelum pembacaan.

1814. KETUA: SUHARTOYO [03:34:20]

Apa ... di respon apa oleh KPU ketika itu?

1815. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:34:24]

Ya. Saat itu Ketua KPU merespon karena bukti-bukti yang kami ajukan itu kurang lebih 740 TPS, sehingga tidak cukup waktu untuk dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap apa yang kami sampaikan dengan data-data sejumlah 740 TPS keberatan yang kami sampaikan pada saat itu, sehingga diarahkan oleh Ketua KPU untuk dilakukan penyesuaian melalui proses ajudikasi koreksi di Bawaslu, ya. Hakim, Yang Mulia.

1816. KETUA: SUHARTOYO [03:35:07]

Gitu, ada Bapak ke Bawaslu?

1817. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:35:10]

Ya, pada tanggal 16 Maret hasil dari sidang Pleno KPU kami mengajukan ajudikasi koreksi ke Bawaslu mendaftarkan secara registrasi pada tanggal 16 Maret dan sidang pembacaan laporan itu tanggal 18 Maret dan putusan Bawaslu keluar pada tanggal 22 Maret.

1818. KETUA: SUHARTOYO [03:35:32]

Setelah itu, ya?

1819. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:35:35]

Ya, Yang Mulia.

1820. KETUA: SUHARTOYO [03:35:35]

Putusan Bawaslu, Bapak tahu apa putusannya?

1821. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [03:35:38]

Ya, putusan Bawaslu dari hasil penyelarasan atau penyandingan sebagaimana 740 TPS yang kami dalilkan itu membuktikan bahwa terjadi peningkatan suara dan dari hasil putusan Bawaslu tidak ada sanggahan dari KPU maupun dari Pihak Terkait yang dalam hal ini Partai Amanat Nasional.

1822. KETUA: SUHARTOYO [03:36:07]

Berapa akumulasi yang diperoleh ketika ada penyelarasan oleh Bawaslu? Secara global Bapak tahu?

1823. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZGERALD LINTIN [03:36:17]

Tahu, Hakim Yang Mulia.

1824. KETUA: SUHARTOYO [03:36:18]

Ada peningkatan suara untuk Pemohon?

1825. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZGERALD LINTIN [03:36:23]

Dari hasil penyelarasan atau sandingan di Bawaslu, Bawaslu menyampaikan bahwa ada sejumlah 15.654 suara yang (...)

1826. KETUA: SUHARTOYO [03:36:37]

15.000?

1827. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZGERALD LINTIN [03:36:37]

Ya, 15.654 suara.

1828. KETUA: SUHARTOYO [03:36:40]

Suara apa ini?

1829. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZGERALD LINTIN [03:36:42]

Suara yang terjadi peningkatan di 3 kabupaten yang kami sampaikan.

1830. KETUA: SUHARTOYO [03:36:48]

Ini jadi peningkatan untuk partai?

1831. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZGERALD LINTIN [03:36:50]

Amanat Nasional.

1832. KETUA: SUHARTOYO [03:36:52]

Ya. Penyelarasan itu kemudian diputuskan sebagai suara yang benar atau tidak yang tera ... akhirnya putusan Bawaslu?

1833. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZGERALD LINTIN [03:37:02]

Ya, yang benar dan terbukti.

1834. KETUA: SUHARTOYO

Yang benar menurut Bawaslu berapa untuk PDIP akhirnya? Untuk di 3 wilayah yang dipersoalkan itu. Tahu, Bapak?

1835.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZGERALD LINTIN [03:37:16]

Mohon maaf saya tidak tahu.

1836.KETUA: SUHARTOYO [03:37:17]

Tidak tahu?

Itu saja Pak, ya? 15.654 atau 15.690, Pak?

1837.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZGERALD LINTIN [03:37:44]

Yang kami sampaikan itu 600 15.000.

1838.KETUA: SUHARTOYO [03:37:53]

654? Atau 690?

1839.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZGERALD LINTIN [03:37:57]

15.690. Namun dalam proses penyelarasan oleh Bawaslu itu sejumlah 15.654, Yang Mulia.

1840.KETUA: SUHARTOYO [03:38:07]

Oke.

Dari Riza Anshari, apa yang dijelaskan?

1841.SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:38:24]

Izin, Yang Mulia. Riza Anshari, KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi dari tanggal 6 sampai tanggal 8 semua berjalan sesuai dengan prosedur dan tata cara, baik itu PKPU 5 dan KPT 219. Untuk Kalsel 2 dari Pemohon itu tanda tangan di berita acara hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan (...)

1842.KETUA: SUHARTOYO [03:38:54]

Kalsel 2 itu mana saja, Pak?

1843. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:38:55]

Kalsel 2 itu Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar Baru dan Kota Banjarmasin.

1844. KETUA: SUHARTOYO [03:39:03]

Tanah Bumbu dan Kota, ya?

1845. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI

Kota Banjar Baru dan Kota Banjarmasin. 3 kabupaten dan 2 kota, Yang Mulia.

1846. KETUA: SUHARTOYO [03:39:12]

Artinya yang didalilkan Pemohon ini bagian dari Dapil 2, ya?

1847. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:39:19]

Dapil 2, Yang Mulia.

1848. KETUA: SUHARTOYO [03:39:20]

Tanda tangan?

1849. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:39:21]

Tanda tangan, Yang Mulia.

1850. KETUA: SUHARTOYO [03:39:23]

Siapa waktu itu saksi dari Pemohon?

1851. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:39:26]

Muhammad Zainuddin, Yang Mulia.

1852. KETUA: SUHARTOYO [03:39:30]

Tidak mengajukan keberatan?

1853. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:39:31]

Tidak mengajukan keberatan, Yang Mulia.

1854. KETUA: SUHARTOYO [03:39:37]

Apa lagi yang mau dijelaskan, Pak? Cukup?

1855. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:39:41]

Kami melakukan pencermatan ulang, Yang Mulia, untuk 3 kabupaten, Kotabaru, Tanah Bumbu dan kota (...)

1856. KETUA: SUHARTOYO [03:39:50]

Apa dasar Bapak melakukan pencermatan?

1857. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:39:52]

Dari ... untuk menjawab dari apa yang dimohonkan dari Pemohon.

1858. KETUA: SUHARTOYO [03:39:51]

Oh, ya, di ... dari 5 ini kan, yang didalilkan 3.

1859. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:40:03]

3, ya.

1860. KETUA: SUHARTOYO [03:40:04]

Itu apa, Pak?

1861. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:40:05]

Jadi, tidak menemukan adanya selisih hasil baik tingkatan TPS, kemudian kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dan izin, Yang Mulia, kalau boleh hasil pencermatan kami, kami serahkan.

1862. KETUA: SUHARTOYO [03:40:15]

Dijadikan bukti, Pak. Tapi kan, itu mestinya harus ada, kalau misalnya ada perintah dari Bawaslu, misalnya. Ya, kan? Ini kan, bentuk pembelaan Bapak itu, kan?

1863. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:40:26]

Jawabannya sudah ada, Yang Mulia, Dari halaman 9 (...)

1864. KETUA: SUHARTOYO [03:40:28]

Ya.

1865. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:40:26]

Sampai 47.

1866. KETUA: SUHARTOYO [03:40:33]

Kalau itu mau dijadikan bukti tambahan, silakan.

1867. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:40:34]

Ya.

1868. KETUA: SUHARTOYO [03:40:35]

Karena kalau ... justru itu kan (...)

1869. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:40:36]

Ya, Yang Mulia.

1870. KETUA: SUHARTOYO [03:40:37]

Ini sama dengan yang Bapak peroleh ketika penghitungan awal, kan? Itu kan sekarang yang dibantah oleh Pemohon.

1871. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:40:46]

Benar, Yang Mulia.

1872. KETUA: SUHARTOYO [03:40:54]

Mau Bapak buat tiga, empat kali pun juga, Pemohonnya masih tidak percaya, kan begitu.

1873. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:40:51]

Siap, Yang Mulia.

1874. KETUA: SUHARTOYO [03:40:52]

Oke. Nah, ketika di tingkat provinsi itu, Pak. Apakah ada ... selain hanya tanda tangan, apakah Saksi dari Pemohon mengajukan keberatan di form atau kah kemudian ada sesuatu yang dipersoalkan yang kemudian yang katanya akan diselesaikan di tingkat nasional itu? Ada tidak isu itu?

1875. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:41:21]

Kalau keberatan tidak ada, Yang Mulia.

1876. KETUA: SUHARTOYO [03:41:22]

Kapan isu itu muncul ketika itu dikaitkan dengan tidak selesai di provinsi, kemudian akan ditindaklanjuti di nasional?

1877. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:41:34]

Tidak ada, Yang Mulia.

1878. KETUA: SUHARTOYO [03:41:32]

Tidak ada. Nazaruddin Ikhwan.

1879. SAKSI TERMOHON: NAZARUDDIN IKHWAN [03:41:46]

Siap, Yang Mulia.

1880. KETUA: SUHARTOYO [03:41:51]

Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut. Sebenarnya ini tidak dipersoalkan, ya, Tanah Laut, ya?

1881. SAKSI TERMOHON: NAZARUDDIN IKHWAN [03:41:50]

Tidak dipersoalkan.

1882. KETUA: SUHARTOYO [03:41:51]

Atau Kotabaru dulu?

1883. SAKSI TERMOHON: NAZARUDDIN IKHWAN [03:41:56]

Siap, Yang Mulia.

1884. KETUA: SUHARTOYO [03:41:57]

Kotabaru, baru nanti Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin.

1885. SAKSI TERMOHON: NAZARUDDIN IKHWAN [03:42:06]

Siap.

1886. KETUA: SUHARTOYO SAKSI [03:42:24]

Gimana, yang Pak Suko, ya? Atau Nazaruddin, singkat saja, apa yang mau disampaikan untuk Tanah Laut? Tanah Laut dengan Kotabaru bedanya apa, ya?

1887. SAKSI TERMOHON: NAZARUDDIN IKHWAN [03:42:15]

Beda kabupatennya, Yang Mulia.

1888. KETUA: SUHARTOYO [03:42:20]

Satu pulau, ya?

1889. SAKSI TERMOHON: NAZARUDDIN IKHWAN [03:42:21]

Beda pulau.

1890. KETUA: SUHARTOYO [03:42:22]

Beda pulau.

1891. SAKSI TERMOHON: NAZARUDDIN IKHWAN [03:42:23]

Beda pulau.

1892. KETUA: SUHARTOYO [03:42:27]

Oke. Tapi ini tidak didalilkan oleh Pemohon, ya?

1893. SAKSI TERMOHON: NAZARUDDIN IKHWAN [03:42:30]

Ya.

1894. KETUA: SUHARTOYO [03:42:31]

Oke, apa yang mau dijelaskan, Pak? Singkat-singkat, Pak.

1895. SAKSI TERMOHON: NAZARUDDIN IKHWAN [03:42:34]

Kami menjelaskan di Kabupaten Tanah Laut. Dalam prosesnya baik di tingkat TPS, kemudian tingkat kecamatan sampai kapitulasi di tingkat Kabupaten Tanah Laut berjalan aman dan lancar, Pak, Yang Mulia, dan tidak ada keberatan dari Saksi. Dan ini juga dihadiri oleh parpol dan ditandatangani oleh parpol, baik PDIP atau PAN di setiap tingkatan secara berjenjang, dan sudah kami lakukan menurut peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Demikian.

1896. KETUA: SUHARTOYO [03:43:09]

Itu, ya, untuk di Tanah Laut, ya?

1897. SAKSI TERMOHON: NAZARUDDIN IKHWAN [03:43:14]

Ya.

1898. KETUA: SUHARTOYO [03:43:15]

Pak Suko, di Kotabaru gimana, Pak? Ini yang dipersoalkan Pemohon juga.

1899. SAKSI TERMOHON: SUKO YUWONO [03:43:20]

Izin, Yang Mulia. Pleno di Kabupaten Kotabaru berlangsung selama 7 hari, dari tanggal 26 Februari sampai tanggal 2 Maret.

1900. KETUA: SUHARTOYO [03:43:21]

Ya.

1901. SAKSI TERMOHON: SUKO YUWONO [03:43:22]

Pada saat pleno di kabupaten tidak ada keberatan dari para saksi, dan semua berjalan sesuai.

1902. KETUA: SUHARTOYO [03:43:41]

Dari Saksi Pemohon juga tidak keberatan, ya?

1903. SAKSI TERMOHON: SUKO YUWONO [03:43:44]

Tidak ada, Yang Mulia.

1904. KETUA: SUHARTOYO [03:43:47]

Terus ketika kemudian ada keberatan dari Pemohon berkaitan dengan Kotabaru ini, kapan Bapak mulai tahu?

1905. SAKSI TERMOHON: SUKO YUWONO [03:43:48]

Sejak ada Pemohon mengajukan ke (...)

1906. KETUA: SUHARTOYO [03:44:06]

MK ini?

1907. SAKSI TERMOHON: SUKO YUWONO [03:44:06]

MK.

1908. KETUA: SUHARTOYO [03:44:07]

Bukan ketika setelah ada Pleno di Nasional?

1909. SAKSI TERMOHON: SUKO YUWONO [03:44:12]

Sudah ... anunya kan sudah (...)

1910. KETUA: SUHARTOYO [03:44:13]

Sudah di MK ini?

1911. SAKSI TERMOHON: SUKO YUWONO [03:44:14]

Ya.

1912. KETUA: SUHARTOYO [03:44:17]

Baik. Muhammad Sakra Effendi (...)

1913. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD SAKRA EFENDI [03:44:21]

Siap.

1914. KETUA: SUHARTOYO [03:44:21]

Untuk Tanah Bumbu.

1915. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD SAKRA EFENDI [03:44:22]

Siap, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Saya Muhammad Sakra Efendi, Anggota KPU Kabupaten Tanah Bumbu. Ada yang kami ... yang saya sampaikan dalam kesempatan ini yang pertama berkaitan dengan proses rekapitulasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu secara berjenjang dari pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 14 Februari. Kemudian dilanjutkan dengan rekap di tingkat kecamatan, di Tanah Bumbu ada 12 kecamatan yang dimulai dari tanggal 18 sampai ... ada yang 19 (...)

1916. KETUA: SUHARTOYO [03:44:59]

Ya.

1917. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD SAKRA EFENDI [03:45:00]

Dan terakhir di tanggal 29 Februari (...)

1918. KETUA: SUHARTOYO [03:45:00]

Ada kejadian apa, Pak? Di antara hari-hari itu sampai Pleno berakhir? Anu ... berkapitulasi?

1919. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD SAKRA EFENDI [03:45:07]

Siap, pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu tidak ada kejadian apapun.

1920. KETUA: SUHARTOYO [03:45:14]

Tingkat kabupaten untuk kecamatan?

1921. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD SAKRA EFENDI [03:45:15]

Kecamatan, sampai dengan tingkat kabupaten (...)

1922. KETUA: SUHARTOYO [03:45:17]

Ya.

1923. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD SAKRA EFENDI [03:45:17]

Itu tidak ada kejadian apapun (...)

1924. KETUA: SUHARTOYO [03:45:18]

Tidak ada persoalan.

1925. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD SAKRA EFENDI [03:45:19]

Tidak ada persoalan, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu termasuk dari saksi Pemohon. Nah, itu masuk dalam alat bukti.

1926. KETUA: SUHARTOYO [03:45:32]

Oke. Oke, Pak.

1927. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD SAKRA EFENDI [03:45:35]

Siap.

1928. KETUA: SUHARTOYO [03:45:39]

Bapak tahu juga setelah di MK ini atukah ketika di perhitungan tingkat nasional?

1929. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD SAKRA EFENDI [03:45:47]

Saya mengetahui setelah masuk di Mahkamah Konstitusi.

1930. KETUA: SUHARTOYO [03:45:50]

Pak Subhani?

1931. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:45:52]

Izin, Yang Mulia. Subhani, Anggota KPU Kota Banjarmasin. Jadi pada proses rekapitulasi di Kota Banjarmasin secara berjenjang, di kecamatan tidak terjadi atau keberatan yang dilayangkan atau disampaikan oleh para saksi, dan saksi Pemohon itu hadir.

1932. KETUA: SUHARTOYO [03:46:17]

Di tingkat kabupaten bagaimana?

1933. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:46:18]

Di tingkat kabupaten, saksi menolak untuk menandatangani, saksi Pemohon.

1934. KETUA: SUHARTOYO [03:46:24]

Saksi Pemohon menolak, ya?

1935. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:46:25]

Inggih. Kemudian, KPU Kota Banjarmasin (...)

1936. KETUA: SUHARTOYO [03:46:27]

Siapa namanya, Pak?

1937. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:46:29]

Ada ... yang jadi saksi ada Pak Riza ... Pak Riza sama Gilang. Kemudian kita berikan di kejadian khusus dan keberatan untuk mengetahui alasan kenapa tidak menandatangani.

1938. KETUA: SUHARTOYO [03:46:44]

Apa alasannya?

1939. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:46:00]

Kemudian ditandatangani oleh Gilang, dia alasannya sesuai dengan yang tertulis di sini menyatakan keberatan atas hasil perolehan rekapitulasi.

1940. KETUA: SUHARTOYO [03:46:55]

Ya, artinya keberatan karena apa?

1941. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:46:58]

Keberatan karena menganggap ada peningkatan suara PAN secara signifikan. Kemudian juga menolak Sirekap sebagai alat bantu, itu saja. Tapi ketika kita minta ... kita ... data-datanya yang disampaikan mereka tidak menyampaikan karena tidak memiliki data yang disampaikan ke KPU.

1942. KETUA: SUHARTOYO [03:47:20]

Tapi mengajukan keberatan, ya?

1943. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:47:21]

Mengajukan keberatan. Kemudian, hal ini kami bawa ke tingkat (...)

1944. KETUA: SUHARTOYO [03:47:26]

Kabupaten.

1945. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:47:26]

Provinsi. Karena penyelesaian keberatan ketika di (...)

1946. KETUA: SUHARTOYO [03:47:30]

Ini keberatannya di tingkat provinsi atau di tingkat kecamatan atau kabupaten?

1947. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:47:34]

Di tingkat kota, Pak.

1948. KETUA: SUHARTOYO [03:47:36]

Kota? Di tingkat kota sudah mengajukan keberatan, tidak tanda tangan (...)

1949. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:47:39]

Ya.

1950. KETUA: SUHARTOYO [03:47:40]

Tapi tanda tangani form keberatan?

1951. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:47:42]

Siap, Yang Mulia.

1952. KETUA: SUHARTOYO [03:47:44]

Dibawa ke provinsi, apa penyelesaian di tingkat provinsi?

1953. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:47:49]

Tidak ada keberatan lagi. Tidak ... ketika dibacakan, diulang, tidak menanggapi.

1954. KETUA: SUHARTOYO [03:47:55]

Oh, ketika di provinsi?

1955. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:47:56]

Ya, langsung tanda tangan, menyetujui hasil.

1956. KETUA: SUHARTOYO [03:47:57]

Hasil apa?

1957. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:48:04]

Yang hasil rekapitulasi, izin, Yang Mulia.

1958. KETUA: SUHARTOYO [03:48:07]

Oh, tidak mempermasalahkan lagi?

1959. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [03:48:08]

Tidak mempermasalahkan, izin.

1960. KETUA: SUHARTOYO [03:48:18]

Pak Wahyudi, apa yang mau dijelaskan? Singkat saja Pak, Bapak sebagai saksi mandat Partai Golkar, ya, di Kecamatan Pulau Laut Sigam.

1961. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [03:48:26]

Siap, siap, Ketua.

1962. KETUA: SUHARTOYO [03:48:28]

Ini masuk Kabupaten? Tanah Laut?

1963. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [03:48:34]

Kotabaru.

1964. KETUA: SUHARTOYO [03:48:36]

Ya, apa Pak yang mau dijelaskan?

1965. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [03:48:38]

Mengenai saya sebagai Saksi Mandat Partai Golkar di tingkat Kecamatan Pulau Laut Sigam dan di tingkat Kabupaten Kotabaru. Mengenai hal pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan semua para saksi yang berhadir di ... dihadiri para saksi partai politik, dan panwascam, serta TNI Polri, dan wartawan. Di sana dibacakan rekapitulasi oleh tingkat PPK mengeluarkan hasil D.Hasil Kecamatan dan disepakati.

1966. KETUA: SUHARTOYO [03:49:20]

Ada yang keberatan, tidak?

1967. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [03:49:23]

Tidak ada keberatan dan tidak ada kejadian khusus (...)

1968. KETUA: SUHARTOYO [03:49:24]

Tidak ada, ketika Bapak di tingkat kabupaten masih ada yang keberatan?

1969. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [03:49:30]

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

1970. KETUA: SUHARTOYO [03:49:34]

Tidak ada, baik. Termasuk Pemohon?

1971. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [03:49:38]

Termasuk Pemohon.

1972. KETUA: SUHARTOYO [03:49:38]

Pak Azhar? Azhar?

1973. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAR [03:49:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1974. KETUA: SUHARTOYO [03:49:47]

Walaikumsalam.

1975. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAR [03:49:50]

Perkenalkan nama saya Azhar Saksi Mandat Partai Nasdem, di sini saya hanya sedikit menjelaskan bahwa proses rekapitulasi pada tingkat kabupaten (...)

1976. KETUA: SUHARTOYO [03:50:01]

Tanah Bumbu, ya?

1977. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAR [03:50:02]

Tanah Bumbu, Pak. Itu menurut kami Partai Nasdem sudah sesuai dengan mekanisme.

1978. KETUA: SUHARTOYO [03:50:05]

Ya.

1979.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAR [03:50:08]

Sesuai prosedur transparan karena di situ sudah (...)

1980.KETUA: SUHARTOYO [03:50:12]

Yang Bapak lihat, ya? Ada tidak yang keberatan, Pak?

1981.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAR [03:50:16]

Sama sekali hingga di akhir pleno, tidak ada yang keberatan (...)

1982.KETUA: SUHARTOYO [03:50:16]

Tidak ada keberatan (...)

1983.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAR [03:50:17]

Dan semua membubuhkan tanda tangan.

1984.KETUA: SUHARTOYO [03:50:18]

Tanda tangan. Baik, Muhammad Kurniawan Putra.

1985.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. KURNIAWAN PUTRA [03:50:26]

Siap. Izin, Yang Mulia. Saya Muhammad Kurniawan Putra Saksi Mandat dari Partai Demokrat untuk rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Banjarmasin Utara dan Saksi Mandat untuk rekapitulasi tingkat Kota Banjarmasin dari Partai Demokrat.

1986.KETUA: SUHARTOYO [03:50:46]

Ada apa yang dilihat ketika jadi Saksi itu?

1987.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. KURNIAWAN PUTRA [03:50:50]

Untuk di tingkat PPK itu tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan, dan seluruh saksi partai yang berhadir di rekapitulasi PPK itu menandatangani.

1988.KETUA: SUHARTOYO [03:51:02]

Di tingkat kota, Pak?

1989.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. KURNIAWAN PUTRA [03:51:04]

Untuk tingkat kota tidak ... Saksi Pemohon, Saksi PDIP.

1990.KETUA: SUHARTOYO [03:51:10]

Keberatan, ya?

1991.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. KURNIAWAN PUTRA [03:51:10]

Ya keberatan, tidak mau tanda tangan, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi (...)

1992.KETUA: SUHARTOYO [03:51:14]

Bagaimana yang sudah disampaikan tadi.

1993.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. KURNIAWAN PUTRA [03:51:17]

Siap.

KETUA: SUHARTOYO [03:51:20]

Keberatan alasannya apa yang Bapak lihat?

1994.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. KURNIAWAN PUTRA [03:51:25]

Keberatan yang saya ketahui karena kan dibagikan ke seluruh saksi parpol, jadi peningkatan suara signifikan PAN, Nasdem, Golkar, dan Gerindra, serta penurunan partai PDIP (...)

1995.KETUA: SUHARTOYO [03:51:38]

PDIP, ya.

1996.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. KURNIAWAN PUTRA [03:51:39]

Habis itu menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan, sebagai alat bantu penghitungan (...)

1997.KETUA: SUHARTOYO [03:51:46]

Oke.

1998.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. KURNIAWAN PUTRA [03:51:47]

Seingat saya itu, Pak.

1999.KETUA: SUHARTOYO [03:51:50]

Kalau Awan Subarkah, Saksi Mandat PKS untuk rekap provinsi apa, Pak?

2000.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AWAN SUBARCAH [03:51:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi saya Awan Subarkah mendapatkan mandate dari PKS untuk menjadi saksi di tingkat provinsi.

2001.KETUA: SUHARTOYO [03:52:04]

Ya.

2002.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AWAN SUBARKAH [03:52:04]

Dan sesuai dengan kami melihat dan kami amati bahwa proses rekapitulasi di tingkat provinsi berjalan sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan juga prosedur yang berlaku sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

2003.KETUA: SUHARTOYO [03:52:21]

Ada yang keberatan, Pak?

2004.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AWAN SUBARKAH [03:52:22]

Dan kami melihat tidak ada keberatan untuk di Dapil Kalsel 2 ini dan tidak ada yang keberatan, Pimpinan.

2005.KETUA: SUHARTOYO [03:52:28]

Yang berkaitan dengan PDIP yang bawaan dari keberatan Kota Banjarmasin?

2006.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AWAN SUBARKAH [03:52:35]

Yang saya lihat tidak ada keberatan juga dari PDIP.

2007.KETUA: SUHARTOYO [03:52:37]

Tidak muncul?

2008.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AWAN SUBARKAH [03:52:40]

Tidak muncul, Pimpinan.

2009.KETUA: SUHARTOYO [03:52:36]

Agus Sudarto?

2010.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SUDARTO [03:52:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Agus Sudarto, Saksi di KPU Pusat. Pada waktu itu saya tidak melihat adanya keberatan dari saksi yang lain karena biasanya yang saya pernah ikuti di beberapa Pleno di KPU Pusat form keberatan itu ada diberikan.

2011.KETUA: SUHARTOYO [03:53:19]

Bukan yang sebelumnya katanya dari mandatnya Pemohon sudah keberatan itu?

2012.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SUDARTO [03:53:33]

Kalau itu memang saya melihat.

2013.KETUA: SUHARTOYO [03:53:30]

Melihat?

2014.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SUDARTO [03:53:35]

Ya.

2015.KETUA: SUHARTOYO [03:53:39]

Kemudian betul direspons oleh Ketua KPU bahwa karena ini TPS-nya banyak kemudian supaya disalurkan ke Bawaslu itu. Ada Saudara tahu?

2016.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SUDARTO [03:53:44]

Nah, kalau itu saya kurang perhatikan, Yang Mulia.

2017.KETUA: SUHARTOYO [03:53:51]

Oke. Waktu itu yang sudah lihat bahwa saksi mandatnya Pemohon seperti apa keberatannya, Pak? PDIP.

2018.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SUDARTO [03:54:04]

Saksi mandat Pemohon itu menanyakan tentang proses rekap, hasil rekap, hasil penghitungan suara.

2019.KETUA: SUHARTOYO [03:54:17]

Tapi memang esensinya dia keberatan beliau? Keberatan?

2020.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SUDARTO [03:54:20]

Kalau itu, ya.

2021.KETUA: SUHARTOYO [03:54:22]

Mengajukan keberatan. Baik, dari Bawaslu dulu coba jelaskan Pak ini.

2022.BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:54:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Perlu kami jelaskan dari rekap nasional sampai dengan pelanggaran administrasi di Bawaslu. Masalah ini sebenarnya timbul ketika di rekap nasional. Rekap nasional kebetulan saya menghadiri dan pimpinan rapatnya Pak Hasyim pada saat itu. Kemudian Saksi Pemohon ditambah yang satu ada saksi yang menjadi pelapor di Bawaslu Pak Harli itu mengajukan banyak catatan bahwa ada perubahan-perubahan terkait dengan hasil di Dapil 2 Kalimantan Selatan. Memang pada saat itu pimpinan sidang menyatakan ini karena terlalu banyak harus dilakukan penyandingan, maka dilakukan proses penanganan di Bawaslu.

Nah, kemudian masuk laporan ke kami tanggal 16 Maret, 16 Maret kami lakukan penanganan. Sebenarnya kan ada dua penanganan yang bisa kami lakukan di saat pelaksanaan rekap. Biasanya pelaksanaan pemeriksaan cepat atau penanganan pelanggaran biasa. Yang membedakan dua hal itu sebenarnya hanya terkait dengan apakah terkait dengan kerumitan masalah. Nah, setelah kami lihat bahwa itu rumit sekali untuk diselesaikan dengan cepat karena satu hari (...)

2023.KETUA: SUHARTOYO [03:55:56]

Ya.

2024. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:56:00]

Harus diselesaikan. Maka kita putuskan Bawaslu diselesaikan dengan apa namanya ... penanganan pelanggaran administrasi biasa dengan ajudikasi. Nah, itu dilakukan proses mulai tanggal 18 Maret. Nah, putusan kita, memang ada beberapa catatan kita, putusan kita kan di tanggal ... putusan kita tanggal 21 Maret 2023. Itu belum ada permohonan ke sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (...)

2025. KETUA: SUHARTOYO [03:56:24]

Ke MK. Terus?

2026. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:56:24]

Ke Mahkamah. Kami belum tahu dari (...)

2027. KETUA: SUHARTOYO [03:56:26]

Ya.

2028. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:56:27]

Pemohon. Nah, putusan kita apa namanya ... memang berdasarkan laporan kita ada 15.000 dari tiga kabupaten ... 15 ... 15.654 itu penambahan suara PAN pada saat itu. Nah (...)

2029. KETUA: SUHARTOYO [03:56:48]

15.000?

2030. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:56:48]

Ya, itu ada di pertimbangan kami.

2031. KETUA: SUHARTOYO [03:56:52]

15.000 berapa?

2032. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:56:55]

15.654 untuk (...)

2033. KETUA: SUHARTOYO [03:56:56]

Ini hasil ... hasil penyelarasan yang dilakukan oleh (...)

2034. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:57:00]

Oleh Bawaslu.

2035. KETUA: SUHARTOYO [03:57:00]

Bawaslu.

2036. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:57:01]

Bawaslu. Kita lakukan di pemeriksaan itu. Nah, memang kendalanya kan putusannya di tanggal 21. Eh, sori, ya. Di tanggal 21 sudah ada penetapan nasional.

2037. KETUA: SUHARTOYO [03:57:17]

Ya.

2038. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:57:17]

Sudah ada peneta ... biasanya kami (ucapan tidak terdengar jelas) nasional dan masih cukup waktu KPU RI untuk mengoreksi, maka kami sampaikan dalam penetapan nasional. Itu pernah dialami oleh caleg untuk DPR RI, kalau enggak salah di Jawa Tengah. Jawa Tengah ada putusan administrasi, tapi masih cukup waktu maka kita sampaikan lakukan koreksi pada saat itu D.Hasil di daerah sana.

2039. KETUA: SUHARTOYO [03:57:40]

Ini putusan untuk penyelarasan itu diputuskan tanggal berapa?

2040. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:57:44]

Tanggal 21 Maret.

2041. KETUA: SUHARTOYO [03:57:49]

Tanggal 21 Maret.

2042. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:57:49]

21 Maret 2000 (...)

2043. KETUA: SUHARTOYO [03:57:49]

Tapi belum ada perkara di MK?

2044. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:57:50]

Belum ada perkara di MK. Cuma di amar kita memang kita tidak melakukan koreksi administrasi karena kami sadar bahwa sudah ada ... bahwa sudah ada putusan ... sudah ada penetapan hasil nasional. Itu sebenarnya berkaca dari sejarah Bawaslu (...)

2045. KETUA: SUHARTOYO [03:58:05]

Ya.

2046. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:58:05]

Pernah ditegur Hakim MK di 2019.

2047. KETUA: SUHARTOYO [03:58:09]

Pak, pengajuan permohonan di MK itu kan waktunya cepat ya, 3 hari saja, 3x24 jam. Kenapa enggak ditunggu dulu kepastian bahwa ini ada permohonan ke MK atau tidak?

2048. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:58:21]

Semen ... ini kan sementara jalan, kita akan (...)

2049. KETUA: SUHARTOYO [03:58:25]

Ya, artinya kan putu ... rekapitulasi nasional juga sudah selesai. Nah, ini ada ... ada tenggat waktu sebenarnya, ada sequence waktu yang dimungkinkan atau tidak dimungkinkan yang bisa ditunggu kepastiannya di 3 hari (3x24 jam) itu ada tidak perkara masuk di MK. Tidak ada pertimbangan itu?

2050. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:58:50]

Masalahnya kita dikejar juga oleh batas waktu penanganan pelanggaran di Bawaslu.

2051. KETUA: SUHARTOYO [03:58:56]

Ya, untuk apa, Pak? Kan sudah terlanjur diputuskan oleh rekap, selesai di tanggal 20.

2052. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:59:02]

Ya. Nah, untuk itu, izin, Majelis. Kami tidak masukkan dalam Amar.

2053. KETUA: SUHARTOYO [03:59:06]

Ya.

2054. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:59:06]

Karena begini, yang jadi pokok masalah di ... apa namanya ... karena KPU teradu ... terkait dengan Pasal 91 ayat (3) PKPU 25. Itu ... PKPU 5(ucapan tidak terdengar jelas) rekapitulasi, itu memang ada kewajiban KPU untuk melakukan apa namanya ... pembetulan seketika kalau ada persoalan-persoalan terkait data-data yang ditampilkan. Nah, hasil itu memang apa ... klausul itu memang kita harus buktikan apakah benar KPU melakukan itu dan kalau memang dilakukan (ucapan tidak terdengar jelas) pelanggaran, dan kalau terkait dengan data-data kita akan putus di Amar. Untuk itu kami tidak masukkan di Amar, Majelis. Kami masukkan di pertimbangan karena kami sadar bahwa itu sudah ada penetapan nasional. Di Amar kita hanya dua, menyatakan bahwa terlapor itu secara saya mengikuti melakukan pelanggaran administrasi di Pasal 91.

2055. KETUA: SUHARTOYO [03:59:58]

Ya.

2056. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [03:59:59]

Itu karena tidak melakukan pembetulan sebagaimana dilakukan dan kedua memberikan sebuah pernyataan.

2057. KETUA: SUHARTOYO [04:00:05]

Terus (...)

2058. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:00:05]

Kita tidak lakukan (...)

2059. KETUA: SUHARTOYO [04:00:05]

Ya, oke.

2060. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:00:06]

Koreksi administrasi karena itu sudah ada (ucapan tidak terdengar jelas).

2061. KETUA: SUHARTOYO [04:00:09]

Kekuatan mengikatnya sejauh mana untuk (...)

2062. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:00:11]

Nah, itu di (...)

2063. KETUA: SUHARTOYO [04:00:12]

Pertimbangan 15.654?

2064. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:00:14]

Ya.

2065. KETUA: SUHARTOYO [04:00:12]

Oleh Bawaslu.

2066. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:00:14]

Di pertimbangan kita sudah kami sampaikan bahwa koreksi administrasi yang sudah kami putuskan ... fakta persidangan kami sampaikan ada 15.564 penambahan suara, itu nanti untuk putusan ... untuk kepastian hukumnya kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi karena pada saat itu sudah mulai akan proses Mahkamah Konstitusi setelah ada penetapan nasional oleh KPU RI.

2067. KETUA: SUHARTOYO [04:00:41]

Ya. Ya, sudah lah ini kan barang sudah jadi, sudah selesai, tapi memang ... ya, kalau bisa memberikan masukan ke depan kalau di situasi-situasi yang kritis begitu, kritikal gitu kan, kenapa tidak ditunggu saja toh keterangan Bapak akhirnya juga nanti diserahkan kepada MK, lebih baik (...)

2068. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:01:06]

Izin, Majelis. Di Pasal 12 ada (ucapan tidak terdengar jelas), 12, peraturan Bawaslu kita, seperti yang Ahli katakan tadi, kalau saya ada gugat ... permohonan ke Mahkamah Konstitusi, kami cukup membuat kajian awal, kajian awal terkait itu. Padahal (...)

2069. KETUA: SUHARTOYO [04:01:20]

Ya.

2070. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:01:21]

Sebenarnya sudah jalan prosesnya.

2071. KETUA: SUHARTOYO [04:01:23]

Ya, tahu. Karena ini kan ketika itu memang benar belum ada, tapi kan 3x24 jamnya kan tinggal menunggu jam saja sebenarnya, kan. Itu yang ... kalau sudah memang pure tidak ada gugatan di MK, nah mungkin per apa ... dasar hukum tadi bisa Bapak pergunakan.

Ini persoalannya kan ... ini DPR RI, kemudian berkaitan dengan dapil yang krusial yang berpotensi akan berperkara di MK, kemudian di sequence waktu jeda atau jeda 3x24 jam itu ada putusan yang ... ya, memang tidak diamarkan, tapi ketika itu muncul di pertimbangan dan itu adalah sudah merupakan apa ... dorongan imajinasi bahwa ini adalah seolah bahwa ini ada kesalahan dan kemudian ada temuan sekitar 15.000 sekian, ini kan kemudian menjadi agak blunder kan untuk Mahkamah Konstitusi kalau sudah menghadapi 2 ... 2 apa ... 2 fakta yang seperti ini. Tapi nanti kami tetap akan pertimbangkan.

Nah, kemudian teknis penghitungan Bapak yang Bapak lakukan itu seperti apa?

2072. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:02:49]

Kami menyandingkan data hasil pengawasan kami, itu kan kalau dilihat di data putusan Bawaslu menyandingkan antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan.

2073. KETUA: SUHARTOYO [04:03:00]

Yang diberikan siapa?

2074. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:02]

Pemohon (...)

2075. KETUA: SUHARTOYO [04:03:02]

Dapat sumbernya, dari mana?

2076. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:03]

Ya, Pemohon menyampaikan (...)

2077. KETUA: SUHARTOYO [04:03:05]

Ya.

2078. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:05]

Pelapor menyampaikan, tapi kita punya data hasil pengawasan Bawaslu.

2079. KETUA: SUHARTOYO [04:03:08]

Dari mana?

2080. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:09]

Dari Bawaslu.

2081. KETUA: SUHARTOYO [04:03:10]

Ketika itu diminta data ke Termohon tidak?

2082. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:13]

Termohon hadir, tapi tidak menyampaikan data sandingan.

2083. KETUA: SUHARTOYO [04:03:16]

Terus diminta, tidak?

2084. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:18]

Diminta.

2085. KETUA: SUHARTOYO [04:03:18]

Supaya untuk pen (...)

2086. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:19]

Ya.

2087. KETUA: SUHARTOYO [04:03:19]

Untuk pembandingan, kalau ini (...)

2088. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:23]

Kita menyampaikan data (...)

2089. KETUA: SUHARTOYO [04:03:24]

Akan ada penyandingan yang dilakukan oleh (...)

2090. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:26]

Ya.

2091. KETUA: SUHARTOYO [04:03:26]

Bawaslu, ada permintaan itu?

2092. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:28]

Ya.

2093. KETUA: SUHARTOYO [04:03:28]

Memang tidak diserahkan?

2094. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:29]

Tidak diserahkan.

2095. KETUA: SUHARTOYO [04:03:30]

Kemudian dari Pihak Terkait PAN, ada dipanggil juga?

2096. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:03:36]

Tidak.

2097. KETUA: SUHARTOYO [04:03:37]

Tidak.

2098. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:03:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Pak Fitz dulu, Pak Fitz, ya.

2099. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [04:03:54]

Ya, Yang Mulia.

2100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:03:58]

Tadi keterangan Pak Fitz mengatakan bahwa ada keberatan sebelum penetapan hasil di tingkat nasional, ya. Itu tanggal berapa Pak Fitz, keberatannya?

2101. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [04:04:11]

Tanggal 12 Maret.

2102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:04:12]

Tanggal 12, berarti sebelum tanggal 20, ya?

2103. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [04:04:15]

Ya.

2104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:04:16]

Oke, tanggal 12. Kemudian Ketua KPU minta supaya dilakukan penyelarasan dan atas dasar itu tanggal 16 Pak Fitz ke Bawaslu, ya?

2105. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [04:04:31]

Ya, Yang Mulia.

2106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:04:32]

Oke. Di sini putusan Bawaslu ini tanggal 22. Benar, tanggal 22? Kalau tadi keterangan dari Bawaslu itu 21 atau ada putusan yang lain nih? Di Bawaslu ini, karena ada dua versi. Tanggal berapa itu, Pak Fitz? Putusan Bawaslu itu 22 atau 21? Ini hanya selisih sehari ini. Dari Bawaslu tanggal 21, ya? (...)

2107. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [04:05:06]

21. Di putusan kita ada tertulis.

2108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:05:08]

Ada, ya. Oke, rapatnya 21, dibacakan 22, ya. Oke, Pak Fitz tadi mengatakan 22, ya? Atau mungkin karena tidak pegang dokumen, ya?

2109. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FITZGERALD LINTIN [04:05:28]

Ya, Yang Mulia.

2110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:05:29]

Yang pasti 21, ya? Oke. Kemudian tadi dari KPU Kalsel, ya, itu pencermatan ulang itu tanggal berapa, Pak? Yang tadi dijelaskan, ada pencermatan ulang yang katanya itu hasilnya sama, tidak ada selisih hasil ... itu tanggal berapa itu pencermatan ulang? (...)

2111. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [04:06:09]

Izin, Yang Mulia. Dari pencermatan dari halaman 9 sampai 47 dari jawaban.

2112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:06:13]

Ya, itu tanggal berapa dimulai, Pak? Saya ingin konfirmasi terkait dengan usulan Ketua KPU supaya dilakukan penyesuaian.

2113. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [04:06:26]

Setelah ada sidang jawaban dari Termohon kemarin.

2114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:06:34]

Oh, setelah sudah masuk di MK, ya?

2115. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [04:06:35]

Sudah masuk di MK.

2116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:06:37]

Oh, jadi bukan karena ada permintaan Ketua KPU agar dilakukan penyesuaian. Oke, Pada waktu pencermatan itu siapa saja yang hadir?

2117. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [04:06:49]

Tiap kabupaten mencermati masing-masing, Pimpinan.

2118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:06:52]

Oh, tapi tidak menghadirkan pihak, ya? Misalnya Pemohon atau Pihak Terkait, tidak ya?

2119. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [04:06:59]

Pencermatannya terhadap jawaban dari kami juga, dari Pihak Termohon.

2120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:07:05]

Oh, berkaitan dengan permohonan, ya?

2121. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [04:07:07]

Ya, ini pencermatan dari jawaban kami. Bukan pencermatan ulang yang dalam forum yang besar bukan, dari data yang sebelumnya juga.

2122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:07:16]

Jadi bukan karena perintah Bawaslu, ya?

2123. SAKSI TERMOHON: RIZA ANSHARI [04:07:19]

Bukan, tidak ada.

2124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:07:21]

Oke. Ini jadi perhatian MK karena permohonan di Kalsel ini baik Kalsel 1 maupun Kalsel 2, ini kebetulan Pihak Terkaitnya PAN, ya. Jadi ini menjadi perhatian juga dari MK terkait dengan kedua permohonan ini.

Nah, karena itu saya konfirmasi itu pencermatannya ini apakah karena perintah Bawaslu? Ternyata tidak karena berkaitan dengan permohonan yang ada di MK, ya.

Baik, kemudian dari Bawaslu ini tadi sudah dijelaskan bahwa di amarnya itu tidak ada koreksi administrasi, ya, jadi hanya di pertimbangannya. Ini karena alasannya sudah diajukan di MK?

2125. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:08:14]

Alasannya pada saat itu sudah penetapan nasional.

2126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:08:17]

Oh, sudah nasional sehingga tidak mungkin mengubah, ya?

2127. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:08:20]

Tidak mungkin kami mengubah hanya menyatakan fakta terjadi.

2128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:08:23]

Ya. Yang diangkat contoh itu mana yang sempat dilakukan di Jawa Tengah tadi kalau tidak salah?

2129. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:08:28]

Itu di, di apa namanya ... banyak sekali di pertimbangan kami menyandingkan antara C.Hasil dan D.Kecamatan, sudah ada perubahan-perubahan di situ.

2130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:08:38]

Tapi itu versi Bawaslu, ya?

2131. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:08:39]

Ya.

2132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:08:40]

Versi pengawasan Bawaslu?

2133. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:08:42]

Ya.

2134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:08:42]

Tapi waktu pencermatan itu belum melibatkan KPU?

2135. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:08:47]

Waktu itu kan KPU terlapor.

2136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:08:50]

Oh, karena terlapor.

2137. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:08:50]

Kami minta KPU menyampaikan, menyampaikan bukti (...)

2138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:08:53]

Tapi data ... datanya dapat dari KPU, ya?

2139. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:08:55]

KPU tidak menyampaikan seluruh yang 600-an TPS, justru data dari Bawaslu.

2140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:09:01]

Hanya dari Pemohon?

2141. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:09:02]

Data dari Bawaslu.

2142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:09:03]

Oh, dari Bawaslu? Oke.
Baik, saya kira cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

2143. KETUA: SUHARTOYO [04:09:10]

Bawaslu atau dari Pemohon juga? Bapak tadi katanya dari Pemohon dan Bawaslu.

2144. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:09:14]

Ya. Pemohon ... pemo ... pelapor.

2145. KETUA: SUHARTOYO [04:09:15]

Ya, pelapor.

2146. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:09:16]

Kalau di kami pelapor, pelapor menyampaikan laporan dengan, dengan membaca ini kemudian (...)

2147. KETUA: SUHARTOYO [04:09:20]

Data dari dijadikan rujukan pembanding ketika menentukan ketemu 15 tadi kan?

2148. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:09:25]

Ya, kemudian pembandingnya dari data Bawaslu.

2149. KETUA: SUHARTOYO [04:09:28]

Ya, itu dia. Bawaslu dari mana, Pak?

2150. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:09:31]

Bawaslu dari Provinsi.

2151. KETUA: SUHARTOYO [04:09:33]

Bukan. Ya, Bapak peroleh dari mana data itu?

2152. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:09:36]

Data Bawaslu.

2153. KETUA: SUHARTOYO [04:09:37]

Dari Bawaslu? Oke.

2154. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:09:38]

Ya.

2155. KETUA: SUHARTOYO [04:09:42]

Silakan, Yang Mulia.

2156. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:09:43]

Sedikit saja mau memastikan saja karena ini menyangkut data, ya. Tadi disebutkan oleh Bawaslu bahwa data Bawaslu, tetapi juga berasal ... Bapak menyatakan itu bahwa ada ketika penyelarasan 15.654 itu, itu berdasarkan data Bawaslu sendiri atau juga sama dengan data mandiri dari Pemohon?

2157. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:10:18]

Kalau ... izin, Yang Mulia. Kalau lihat apa namanya ... Posita dan Petitem, pelapor pada saat itu sebenarnya ada yang tidak sesuai oleh kami dan itu biasanya itu ketika pelaporan disampaikan kami data-datanya. Sebenarnya kami berharap pada saat itu ada data dari terlapor dalam hal ini terlapor karena tidak ada, maka kami mengambil data dari hasil pengawasan Bawaslu kemudian kita sandingkan. Memang ada beberapa yang tidak sesuai, tapi ada juga yang sesuai.

2158. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:10:49]

Berarti antara data dari pelapor dengan data Bawaslu beda?

2159. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:10:56]

Ada yang berbeda, ada yang sama.

2160. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:10:58]

Ya, ada yang berbeda. Berarti kan secara umum berarti ada perbedaan, ya? Berarti tidak sama.

2161. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:11:01]

Itu yang hasil akhir yang kami periksa 15.000.

2162. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:11:04]

Nah, sementara yang Bapak jadikan sebagai penyandingannya itu data dari mana?

2163. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:11:09]

Penyandingannya data dari Bawaslu.

2164. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:11:11]

Dari Bawaslu. Data dari Bawaslu ini diperoleh dari hasil?

2165. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:11:15]

Dari hasil pengawasan.

2166. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Pengawasan. Pengawasan yang diperoleh dari? Misalnya apakah dari KPU yang memberikan.

2167. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:11:24]

Dari, dari kami, dari data Bawaslu.

2168. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:11:25]

Dari Bawaslu sendiri? Tanpa ada misalnya bersumber dari mana gitu, dia punya data-datanya. Apakah misalnya dari C-1 ... apa ... dari rek ... hasil-hasil ... apa ... D.Hasil apa semua?

2169. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:11:38]

Dari informasi ... dari ... pasti dari dasar data KPU karena kami menyangdingkan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan dari Bawaslu.

2170. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:11:39]

Atau dari sirekap, misalnya.

2171. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:11:48]

Dari Bawaslu, tetapi yang digunakan ini ... anu ya ... artinya memang dari Bawaslu dan dari mandiri tadi, tapi ada beda?

2172. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:11:59]

Ada yang berbeda.

2173. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12:03]

Perbedaannya itu di mana? Bisa diberikan sedikit penjelasan? Ada mungkin sebagai, anu saja.

2174. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:12:07]

Ada di pelaporan, izin. Kalau tidak salah itu, saya sempat baca nanti sempatnya, itu mereka mendalilkan bahwa (...)

2175. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12:18]

Ada di bukti, di sampaikan?

2176. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:12:23]

Ya, diputusan kami.

2177. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12:20]

Oh, diputusan.

2178. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:12:24]

Diputuskan kami, sebenarnya awalnya pelapor menyampaikan bahwa, ada seratusan ribu penambahan surat suara dari ... pada saat itu ... sekarang menjadi Pihak Terkait. Itu dalilnya kepada kami, kemudian hasil pemeriksaan kami hanya 15.500-an.

2179. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12:41]

Seperti itu ya, jadi 15.654 (...)

2180. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:12:41]

Ya.

2181. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12:42]

Ini berdasarkan hasil data dari Bawaslu?

2182. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:12:43]

Ya, kita sandingkan.

2183. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12:48]

Sandingkan dari data dari ... anu ... pelapor, ya?

2184. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:12:49]

Ya.

2185. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12:50]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

2186. KETUA: SUHARTOYO [04:12:51]

Baik, Yang Mulia. Dari Pemohon ada pertanyaan? Satu-dua pertanyaan, silakan.

2187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [04:12:59]

Ada, Yang Mulia. Untuk Termohon.

2188. KETUA: SUHARTOYO [04:13:03]

Silakan, Termohon yang mana?

2189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [04:13:08]

Para anggota komisioner tingkat kabupaten, Yang Mulia.

2190. KETUA: SUHARTOYO [04:13:11]

Ya.

2191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [04:13:15]

Sebenarnya hanya mau mengkonfirmasi saja karena (...)

2192. KETUA: SUHARTOYO [04:13:14]

Ya, silakan, Pak.

2193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [04:13:21]

Untuk Para Termohon, apakah benar ada dinamika intimidasi di lapangan kepada Termohon? Karena izin, Yang Mulia, kami sebenarnya dari lapangan saksi-saksi kami ini sebenarnya dengan satu lain, lain hal tidak bisa ke sini.

2194. KETUA: SUHARTOYO [04:13:38]

Ada tidak intimidasi-intimidasi dari para Komisioner?

2195. SAKSI TERMOHON: SUBHANI [04:13:42]

Tidak ada, Yang Mulia.

2196. KETUA: SUHARTOYO [04:13:43]

Tidak ada. Silakan, Pak.

2197. SAKSI TERMOHON: M. SAKRA EFFENDI [04:13:54]

Siap, untuk di Tanah Bumbu tidak ada.

2198. KETUA: SUHARTOYO [04:13:52]

Yang lain, Pak, dijawab supaya ini terkaver di berita acara sidang.

2199. SAKSI TERMOHON: NAZARUDDIN IKHWAN [04:13:52]

Untuk Tanah Laut, tidak ada.

2200. SAKSI TERMOHON: SUKO YUWONO [04:13:56]

Kotabaru, tidak ada.

2201. KETUA: SUHARTOYO [04:13:56]

Tidak ada. Cukup?

2202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [04:14:01]

Cukup, Yang Mulia.

2203. KETUA: SUHARTOYO [04:14:02]

Dari Termohon ada pertanyaan?

2204. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:14:03]

Sekiranya diperkenankan menambah penjelasan sedikit. Yang pertama, keterangan teman-teman anggota KPU provinsi maupun kabupaten/kota yang hadir. Ini dalam rangka untuk membantah Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon pada Angka 5 yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mengajukan D.Keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota.

2205. KETUA: SUHARTOYO [04:14:31]

Ya, tadi tidak. Tidak. Nanti kami yang menilai.

2206. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:14:34]

Betul.

2207. KETUA: SUHARTOYO [04:14:41]

Tapi, di tingkat Kota Banjarmasin kan ada, Pak.

2208. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:14:36]

Oke. Betul, ya.

2209. KETUA: SUHARTOYO [04:14:36]

Jangan semua tidak.

2210. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:14:38]

Betul.

2211. KETUA: SUHARTOYO [04:14:38]

Silahkan apa lagi?

2212. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:14:41]

Yang kedua, dalam rangka untuk menjawab Permohonan Pemohon yang memohonkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa apa namanya ... semua TPS di tiga kabupaten/kota, yaitu KPU ... Kotabaru=45 TPS, Tanah Bumbu=206 TPS, kemudian Kota Banjarmasin=386 TPS. Totalnya, ada 727 TPS. Ini yang sudah kami sampaikan apa itu namanya ... penyandingan datanya berdasarkan formulir hasil penghitungan suara di tingkat C. Hasil di tingkat apa namanya ... TPS kemudian diperbandingkan dengan kecamatan yang keseluruhan tidak ada selisih. Nanti secara detail akan kami jadikan alat bukti tambahan.

2213. KETUA: SUHARTOYO [04:15:31]

Ya.

2214. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:15:33]

Terima kasih.

2215. KETUA: SUHARTOYO [04:15:34]

Dari Pihak Terkait, pertanyaan?

2216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DARUL HUDA MUSTAQIM [04:15:36]

Izin, Yang Mulia. Jika diizinkan mau bertanya ke Bawaslu melalui Majelis Hakim.

2217. KETUA: SUHARTOYO [04:15:39]

Ya, mau tanya apa, pak?

2218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DARUL HUDA MUSTAQIM [04:15:39]

Terkait dengan hasil pengawasan dari Bawaslu di tingkat kecamatan, kabupaten (...)

2219. KETUA: SUHARTOYO [04:15:43]

Ya.

2220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DARUL HUDA MUSTAQIM [04:15:47]

Mau pun provinsi kan tidak ada temuan, Pak.

2221. KETUA: SUHARTOYO [04:15:48]

Ya.

2222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DARUL HUDA MUSTAQIM [04:15:50]

Ini menjadi pertanyaan kami kalau itu data keliru (...)

2223. KETUA: SUHARTOYO [04:15:51]

Dari provinsi, Pak, bisa menjelaskan?

2224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DARUL HUDA MUSTAQIM [04:15:58]

Ya. kenapa tidak diselesaikan di rekap awal? (...)

2225. KETUA: SUHARTOYO [04:15:52]

Dari tingkat bawah ada laporan tidak? Silakan, Pak.

2226. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [04:16:02]

Baik, terima kasih. Yang Mulia, sebelumnya menanggapi yang disampaikan oleh beberapa kabupaten/kota yang menyampaikan tadi Banjarmasin, Tanah Bumbu, Kotabaru. Bahwa ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam pemberian keterangan kami. Contoh misalnya, di Banjarmasin, di Banjarmasin itu memang ada keberatan yang dilakukan oleh salah satu partai politik. dengan (...)

2227. KETUA: SUHARTOYO [04:16:30]

Pemohon Partai PDIP?

2228. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [04:16:32]

Ya, PDIP, yang atas nama Gilang itu dan itu memang sudah (...)

2229. KETUA: SUHARTOYO [04:16:36]

Ya.

2230. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [04:16:36]

Sudah berkesesuaian dengan (...)

2231. KETUA: SUHARTOYO [04:16:38]

Yang di daerah lain, Pak?

2232. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [04:16:39]

Di daerah lain sama, jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari kota tadi, kabupaten itu sudah sama, dengan apa yang menjadi laporan hasil pengawasannya.

2233. KETUA: SUHARTOYO [04:16:41]

Kecuali yang kota Banjarmasin, ya?

2234. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [04:16:47]

Kecuali Banjarmasin, Banjarmasin ini pun alasannya pun yang disampaikan oleh KPU Banjarmasin ini sudah berkesesuaian juga. Jadi memang tidak ada, ya apa ... temuan dan laporan ini memang tidak ada di tingkat sampai Provinsi Kalimantan Selatan.

2235. KETUA: SUHARTOYO [04:17:05]

Oke, cukup, Pak.

2236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [04:17:06]

Satu lagi, Yang Mulia,

2237. KETUA: SUHARTOYO [04:17:07]

Apa?

2238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [04:17:08]

Di tingkat Provinsi, Bawaslu itu ada laporan, Yang Mulia.

2239. KETUA: SUHARTOYO [04:17:12]

Ya.

2240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [04:17:09]

Terhadap keberatan hasil rekapitulasi dan laporan, itu dicabut. Itu kenapa tidak menjadi temuan awal oleh Bawaslu Provinsi, itu Yang Mulia? Kenapa di sidang administrasi Bawaslu RI? Padahal menurut Perbawaslu 7/2022 itu bisa menjadi informasi awal untuk menjadi temuan, Yang Mulia.

2241. KETUA: SUHARTOYO [04:17:28]

Ya.

2242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DARUL HUDA MUSTAQIM [04:17:29]

Bisa minta penjelasan ke Bawaslu.

2243. KETUA: SUHARTOYO [04:17:32]

Betul, ya ada (ucapan tidak terdengar jelas) pencabutan kata Pihak Terkait?

2244. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [04:17:35]

Ya, betul yang Mulia.

2245. KETUA: SUHARTOYO [04:17:36]

Ya, tapi kemudian muncul lagi di tingkat nasional, Ya?

2246. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [04:17:41]

Ya, begitu, Yang Mulia.

2247. KETUA: SUHARTOYO [04:17:43]

Betul, kenapa itu tidak dijadikan pertimbangan Pak Komisioner Bawaslu RI? Karena ini pertanyaan Pihak terkait kan begitu. Pencabutan itu kenapa tidak dijadikan pertimbangan ketika memutuskan kemudian ada Putusan 002 ini?

2248. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:18:03]

Izin Yang Mulia apa namanya ... kami melakukan pemeriksaan itu berdasarkan laporan.

2249. KETUA: SUHARTOYO [04:18:11]

Laporan, laporan tidak muncul adanya pencabutan itu? Tidak muncul lah laporan itu.

2250. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [04:18:17]

Tidak muncul dari laporan itu.

2251. KETUA: SUHARTOYO [04:18:19]

Baik.

2252. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:18:25]

Saya ingin konfirmasi terkait dengan pencabutan laporannya, ya. Dari Pemohon, ini kalau saya baca di isi surat ini. Ini yang pertama di Kabupaten Tanah Bumbu, yang kedua di Kota Banjarbaru, ya. Ini pencabutannya ini kalau di suratnya ini tanggal berapanya? Ini hanya dinyatakan laporan tanggal 6, tapi tidak jelas tanggal berapa. Nah, laporan ini yang tadi ditanyakan oleh Pihak Terkait kalau sudah ada dasar kenapa kemudian dicabut itu. Lalu sampai di tingkat nasional baru dipersoalkan, tapi yang pasti ini benar, ya, laporan pencabutan ini, bisa dijelaskan?

2253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PUTU BRAVO TIMOTHY [04:19:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait pencabutan tersebut, kami tidak mendapatkan laporan yang secara persis alasannya seperti apa. Kenapa teman-teman di Kabupaten, kemudian melakukan pencabutan tersebut, Yang Mulia. Lalu berikutnya kenapa kemudian di tingkatan nasional, kemudian teman-teman saksi pada saat itu yang hadir di Pleno, untuk wilayah Kalimantan Selatan, ini melakukan keberatan karena diawali dengan adanya pencermatan di aplikasi Saksi Juang yang dimiliki oleh partai, Yang Mulia. Di situ ada terlihat kok ada perbedaan data antara yang di input di C.Hasil dengan di D.Hasil. Nah, itu yang kemudian dialami oleh teman-teman saksi pada saat pleno dan kemudian melakukan keberatan dan akhirnya kemudian melakukan pelaporan ke Bawaslu, Yang Mulia, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan.

2254. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:20:13]

Baik, terima kasih.

2255. KETUA: SUHARTOYO [04:20:17]

Baik.

2256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [04:20:18]

Tambahan, Yang Mulia.

2257. KETUA: SUHARTOYO [04:20:18]

Apa lagi?

2258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [04:20:19]

Terkait pertanyaan dari, Yang Mulia.

2259. KETUA: SUHARTOYO [04:20:21]

Ya, sudah kan? Pencabutan itu kemudian tumbuh lagi karena ada alasan-alasan baru.

2260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [04:20:29]

Pada prinsipnya sebenarnya kami mau mengupayakan kawan-kawan di Kalsel sana untuk hadir sebagai saksi, cuma satu dan lain hal kondisi darurat, sehingga mereka terpaksa tidak berani untuk datang ke sini, kira-kira begitu.

2261. KETUA: SUHARTOYO [04:20:43]

Baik. Jadi untuk Pemohon 191 melengkapi Alat Bukti P-4, P-90, P-138, P-146, P-225, P-234, P-235 sampai P-236, P-237, P-333, P-334, P-335, P-336, dan P-555. Namun bukti fisik yang belum ada yaitu P-5, ya, Pak, ya. Untuk Pemohon.

Termohon melengkapi alat bukti dalam daftar alat bukti sebelumnya, yaitu T-50, T-78, dan T-106.

Kemudian Pihak Terkait melengkapi alat bukti dengan PT-22 ... PT-22 sampai dengan PT-658, serta menambahkan alat bukti PT-661 dan PT-662.

Kemudian Bawaslu melengkapi alat bukti yang sebelumnya, yaitu PK-228 sampai dengan PK-2238 [sic!]. Kami sahkan ya, kecuali yang P-5 tadi yang dari P, yang dari Pemohon yang belum ... bukti fisiknya belum ada.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk Perkara 191. Mudah-mudahan keterangan Para Saksi bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan dalam putusan ini. Kemudian, kami ucapkan juga untuk Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta Bawaslu.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB

Jakarta, 29 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

